

**UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM
PLP2K-BK SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA BATURETNO, KECAMATAN SINGOSARI, KABUPATEN
MALANG**

(Studi di Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang)

**SKRIPSI
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh:

Silvia Marcelina Anastasia

105030101111086



Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Agus Suryono, M.S**
- 2. Drs. Minto Hadi, M.Si**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTTO**Do'a yang baik adalah
do'a yang disertai
keIKHLASAN dan
TIDAK PUTUS ASA**

(Al-Hadits)

Jangan pernah berhenti mengejar masa depan yang
cerah, karena dari sinilah awal perjuangan untuk
membangun masa yang indah nantinya, tetaplah
berada di jalan-NYA karena ikhtiar dan tawakal
adalah kuncinya.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Disusun Oleh : Silvia Marcelina Anastasia

NIM : 105030101111086

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 27 Oktober 2016

Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. Agus Suryono, M.S
NIP.19521229 197903 1 003



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP.19540127 198103 1 003

TANDA PENGESAHAN

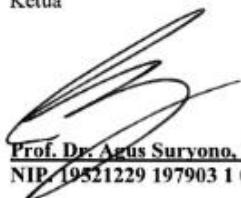
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2016
Jam : 09.00-10.00
Skripsi atas nama : Silvia Marcelina Anastasia
Judul : Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman
Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK
Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa
Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Dr. Alfi Haris Wanto, MAP, MMG
NIP. 19591227 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 28 Oktober 2016


MISTERAI
TEMPEL
19403AD7E2E2E703
6000
TRADISI
Silvia Marcelina Anastasia
NIM. 105030101111086

RINGKASAN

Silvia Marcelina Anastasia. 2016. **Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno**. Prof. Dr. Agus Suryono, M.S, Drs. Minto Hadi, M.Si, 175 Hal + xv

Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana banjir, meningkatnya potensi konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman salah satunya di Desa Baturetno Kabupaten Malang. Untuk itu perlu adanya suatu program yang mampu mengintegrasikan program-program sebelumnya maupun yang akan datang melalui program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Kendala umum yang sering dihadapi dalam program pembangunan yaitu keberlanjutan program. Untuk itu melalui program PLP2K-BK di Desa Baturetno ini, kegiatan pembangunan disusun berdasarkan struktur kawasan, saling terintegrasi dan berkelanjutan yang berpedoman pada pendekatan tridaya. Konsep tridaya sendiri yaitu daya pengembangan aspek sosial kemasyarakatan, daya pengembangan aspek lingkungan, dan daya pengembangan aspek ekonomi sebagai sarana memberdayakan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Desa Baturetno melalui program PLP2K-BK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari program PLP2K-BK. Dengan begitu dapat terlihat apa yang menjadi kendala dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh melalui program PLP2K-BK berjalan dengan baik sesuai dengan permen nomor 29 tahun 2011 dan sesuai dengan konsep tridaya. Namun masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa poin rencana pembangunan yang belum terlaksana hingga sekarang yaitu pengembangan RTH. Adapun faktor pendukung yaitu adanya komitmen dari pemerintah pusat hingga daerah, peran aktif masyarakat, dan potensi daerah yang tersedia dengan baik. Sedangkan faktor penghambat yaitu dari keterbatasan dana, terbatasnya jumlah tim teknis, dan budaya masyarakat setempat.

Kata kunci: Program PLP2K-BK, Konsep Tridaya, Kumuh

SUMMARY

Silvia Marcelina Anastasia. 2016. **Improving The Quality Of Housing And Slums throught PLP2K-BK Program Implementation As Mean Of Empeworing Rural Communities Baturetno Village.** Prof. Dr. Agus Suryono, M.S, Drs. Minto Hadi, M.Si, 175 Hal + xv

Widespread housing and slums have an impact on the increased frequency of catastrophic fires and floods, increased potential vulnerability and social conflicts, declining levels of public health, the declining quality of service settlement facilities and infrastructure Baturetno one in the village of Malang. For that we need a program that is able to integrate previously existing programs and future through the Environmental Management program of Housing and Slum-based Region (PLP2K-BK). Common obstacles encountered in the development program which is on limited budgets and program sustainability. For that through the program PLP2K-BK in this Baturetno village development activities organized by regional structures, integrated and sustainable approach guided by Tridaya. The concept itself is power Tridaya social aspects of development, power development aspects of environmental and economic aspects of the development power.

The purpose of this study was to determine the implementation of the Environmental Management Program of Housing and Slum Village Based Baturetno Region. In addition, this study also aimed to determine the enabling and inhibiting factors of the program PLP2K-BK. Thus it can be seen what the hindrances in the implementation. This research uses descriptive method with qualitative approach, with more to be a description of the results of interviews and documentation study.

The results of this study indicate that the implementation of Environmental Management of Housing and Slum Areas Based goes well in accordance with sweets number 29 in 2011 and in accordance with the concept of Tridaya. But still not up because there are some points on the development plan has not been done until now is RTH development. The factors supporting that commitment from central to local government, people's active participation, and potential areas are available with either. While the inhibiting factors are of limited funds, the limited number of technical team, and local culture.

Keywords: program of PLP2K-BK, Tridaya concept, slum areas

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku tercinta, terkasih, dan tersayang. Ibu dan bapak ku yang tak pernah lelah merawatku, mendidikku, memberikan do'a tulus, memotivasiku dan selalu mendukungku. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya dan memanjangkan usianya dalam keberkahan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, M.S, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu bersedia untuk memberikan saran, masukan, dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si, selaku Wakil Ketua Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Imam Suyono S.Sos. M.Si, selaku Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan Badan Perumahan Kabupaten Malang. Terimakasih telah menjadi narasumber dan teman diskusi yang baik selama penelitian di Badan Perumahan Kabupaten Malang.
6. Ibu Lusiana Ferelia. ST dan Ibu Taufina Luren. ST , selaku staff Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan Badan Perumahan Kabupaten Malang. Terimakasih telah menjadi narasumber dan teman diskusi yang baik selama penelitian di Badan Perumahan Kabupaten Malang.
7. Bapak Sujiono dan Bapak Suryanto Selaku Sekretaris Desa Baturetno Supiyani, serta narasumber lainnya yang sudah berkenan memberikan waktu dan kesempatannya kepada peneliti.
8. Bapak Junaedi dan Agus warga Desa Baturetno, yang telah menjadi narasumber.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Juwarno dan Ibu Endang, yang telah memberikan banyak do'a, dukungan, semangat, serta memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Adik tersayang, Rexza yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat, untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat dan Keluarga kedua Yunita, Nilam, Ari, Dika, Gandis, Sasvi, dan Emma yang telah menemani, memberikan motivasi, semangat, serta memberikan keceriaan disela-sela kejenuhan.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi angkatan Publik 2010, khususnya Indah, Gandes, Vina, Eva, Btarinda, Anik, dan Erlin sahabat seperjuangan dari semester 1 (satu) hingga sekarang, kalian memberikan warna pada masa perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, peneliti ucapkan terima kasih atas dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritikan penulis harapkan agar menyempurnakan isi dari skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembaca.

Malang, 26 Juni 2016

Silvia Marcelina Anastasia

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| MOTTO | i |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| TANDA PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI | iv |
| RINGKASAN | v |
| SUMMARY | vi |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |

| | | |
|---------------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar belakang | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 8 |
| | C. Tujuan Penelitian | 9 |
| | D. Kontribusi Penelitian | 9 |
| | E. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | |
| | A. Implementasi Kebijakan..... | 12 |
| | 1. Pengertian Implementasi Kebijakan..... | 12 |
| | 2. Proses Implementasi Kebijakan | 14 |
| | B. Kebijakan Pembangunan Wilayah Perkotaan | 21 |
| | C. Identifikasi Permasalahan Daerah Perkotaan..... | 25 |
| | D. Permukiman Kumuh | 29 |
| | 1. Pengertian Permukiman Kumuh | 29 |
| | 2. Karakteristik Perumahan dan Permukiman Kumuh..... | 33 |
| | 3. Faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan Kumuh | 36 |
| | E. Pentingnya Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman..... | 37 |
| | 1. Pengertian Perumahan dan Pemukiman | 37 |
| | 2. Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Permukiman..... | 39 |
| | 3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman..... | 40 |
| | 4. Pembangunan Infrastruktur | 43 |
| | 5. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)..... | 45 |
| | F. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat ... | 47 |
| | G. Konsep Tridaya Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman | 53 |
| | H. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)..... | 55 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis penelitian | 58 |
| B. Fokus Penelitian | 59 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian | 60 |
| D. Sumber Data | 61 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 62 |
| F. Instrumen Penelitian | 63 |
| G. Analisis data | 64 |
| H. Keabsahan data | 67 |

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 69 |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Malang | 69 |
| 2. Gambaran Umum Kecamatan Singosari | 74 |
| 3. Gambaran Umum Desa Baturetno | 76 |
| 4. Gambaran Umum Badan Perumahan Kabupaten Malang | 78 |
| B. Penyajian Data | 86 |
| 1. Upaya Peningkatan Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Memberdayakan Masyarakat Desa Baturetno | 86 |
| a) Daya Pengembangan Aspek Sosial Kemasyarakatan | 86 |
| 1) Penyiapan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) | 86 |
| 2) Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/ <i>Community Action Plan</i> (CAP) | 90 |
| b) Daya Pengembangan Aspek Lingkungan | 99 |
| 1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur) | 99 |
| 2) Peningkatan Kondisi Rumah Tinggal | 104 |
| 3) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 108 |
| 4) Konsep dan Rencana Pengembangan Wilayah | 110 |
| c) Daya Pengembangan Aspek Kegiatan Sosial Ekonomi | 123 |
| 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Memberdayakan Masyarakat Desa Baturetno | 129 |
| a) Faktor Pendukung | 129 |
| b) Faktor Penghambat | 131 |
| C. Pembahasan | 134 |
| 1. Upaya Peningkatan Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Memberdayakan Masyarakat Desa Baturetno | 134 |
| a) Daya Pengembangan Aspek Sosial Kemasyarakatan | 135 |
| 1) Penyiapan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) | 137 |
| 2) Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/ <i>Community Action Plan</i> (CAP) | 140 |

| | |
|---|-----|
| b) Daya Pengembangan Aspek Lingkungan | 142 |
| 1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar (Infastruktur) | 145 |
| 2) Peningkatan Kondisi Rumah Tinggal..... | 148 |
| 3) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)..... | 150 |
| 4) Konsep dan Rencana Pengembangan Wilayah | 152 |
| c) Daya Pengembangan Aspek Kegiatan Sosial Ekonomi | 155 |
| 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Memberdayakan Masyarakat Desa Baturetno..... | 159 |
| a) Faktor Pendukung..... | 159 |
| b) Faktor Penghambat | 162 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 164 |
| B. Saran | 167 |
| DAFTAR PUSTAKA | 169 |
| LAMPIRAN | |
| 2. Permen Nomor 29 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan (PLP2K-BK) | |
| 3. Panduan Program PLP2K-BK | |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Peran Infrastruktur..... | 44 |
| 2. | Prinsip (PLP2K-BK) | 57 |
| 3. | Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman | 65 |
| 4. | Peta Wilayah Kabupaten Malang..... | 72 |
| 5. | Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2011-2013 | 73 |
| 6. | Foto Badan Perumahan Kabupaten Malang..... | 78 |
| 7. | Susunan Organisasi Badan Perumahan Kabupaten Malang..... | 82 |
| 8. | Koordinasi Tim Pelaksana Program PLP2K-BK | 83 |
| 9. | Kegiatan <i>Community Action Plan</i> (CAP)..... | 93 |
| 10. | Isu Pokok Penataan Kawasan Desa Baturetno..... | 98 |
| 11. | Kondisi Jalan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PLP2K-BK..... | 102 |
| 12. | Kondisi Drainase Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PLP2K-BK..... | 103 |
| 13. | Kondisi MCK Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PLP2K-BK | 104 |
| 14. | Kondisi Rumah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PLP2K-BK | 108 |
| 15. | Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Baturetno..... | 129 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif..... | 67 |
| 2. | Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa ... | 70 |
| 3. | Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang | 74 |
| 4. | Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Baturetno..... | 77 |
| 5. | Mata Pencaharian Masyarakat Desa Baturetno | 78 |
| 6. | Keadaan Sumber Daya Manusia Badan Perumahan | 81 |
| 7. | Pembentukan Tim Penggerak Masyarakat (TPM)..... | 88 |
| 8. | Aspirasi Masyarakat Dalam Kegiatan Rembug Warga I..... | 94 |
| 9. | Daftar Rumah Tidak Layak Huni di Desa Baturetno | 106 |
| 10. | Program Rinci Rencana Fisik Program PLP2K-BK Tahun ke-1..... | 118 |
| 11. | Program Rinci Rencana Fisik Program PLP2K-BK Tahun ke-2..... | 119 |
| 12. | Program Rinci Rencana Fisik Program PLP2K-BK Tahun ke-3..... | 121 |
| 13. | Program Rinci Rencana Fisik Program PLP2K-BK Tahun ke-4..... | 122 |
| 14. | Program Rinci Rencana Fisik Program PLP2K-BK Tahun ke-5..... | 122 |
| 15. | Konsep Pengembangan Kegiatan Sosial Ekonomi masyarakat..... | 124 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah serta cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alenia ke empat adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menuju kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka diselenggarakan pembangunan nasional diseluruh bidang kehidupan yang saling berkesinambungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya pembangunan nasional dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan sebuah komitmen bersama demi terciptanya sebuah pembangunan nasional.

Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pemerintah harus berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dalam bidang pendidikan,

kesehatan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah kesejahteraan ini utamanya adalah masalah kemiskinan karena kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Inilah salah satu aspek yang menghambat tercapainya sebuah pemerataan dan keadilan. Hal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan, rendahnya produktifitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan

Permasalahan mendasar yang tiap tahun keberadaannya masih belum dapat dituntaskan yaitu permasalahan perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, pembinaan

generasi muda, juga dapat disebut sebagai barang modal (tidak bergerak). Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Menurut undang-undang No 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, pengertian perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan Pengertian permukiman secara jelas dan rinci dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang mengandung pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, tidak dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan pemerintah sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh. Untuk itu, perlu upaya penanganan secara terkoordinasi antar sektor melalui integrasi lingkungan permukiman kumuh terhadap sistem kegiatan kota dengan pelaksanaan berbasis kawasan sehingga penanganan dapat berkelanjutan, serta pada akan dapat mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa luas perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2004 yang tadinya sebesar 54.000 ha telah

berkembang menjadi sebesar 59.000 ha pada tahun 2009. Bahkan diperkirakan apabila tidak dilakukan penanganan maka luas perumahan dan permukiman kumuh akan tumbuh menjadi 71.860 ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun. (<http://bps.go.id/>).

Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya. Perumahan dan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu segera ditangani, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pada Sidang Umum PBB, yang diselenggarakan tahun 2000 tercapai kesepakatan tujuan pembangunan global yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas hidup 100 juta masyarakat dunia di perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020. Selanjutnya, Kongres Perumahan dan Permukiman II yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2009 yang lalu juga menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 dalam Agenda Menyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang Undang No. 4 Tahun 1992 Pasal 27 pasal 1 dan 2:

“(1) Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun

- dalam tahap pelaksanaan, serta, melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman.
- (2) Peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kegiatan-kegiatan: perbaikan atau pemugaran, peremajaan, pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.”
- Dalam rangka penanganan perumahan dan permukiman kumuh,

sejak TA 2004-2009, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan tersebut antara lain adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rusunawa dan Rusunami dan Bantuan Stimulan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa program dan kegiatan tersebut sangat perlu untuk diintegrasikan dalam skenario pengembangan kawasan. Dalam hal ini, dibutuhkan penanganan yang bersifat multisektoral dan berkelanjutan

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2010 mulai melaksanakan program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Kemenpera bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan verifikasi teknis di seluruh kabupaten/kota yang telah mengusulkan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dan kabupaten/kota pemenang dan nominasi Penghargaan Adiupaya Puritama. Karakteristik PLP2K-BK tersebut antara lain: 1) mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman terintegrasi dengan tata ruang dan sistem kota, 2) menggunakan pendekatan tridaya, 3) melengkapi

kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkungan permukiman yang layak, dan 4) mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui pendekatan Tridaya, yaitu proses terbangunnya pemberdayaan masyarakat melalui daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang layak huni dan terintegrasi secara berkelanjutan.

Mengacu pada Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya pencegahan terjadinya daerah kumuh pada hakekatnya bermuara kepada upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan serta upaya untuk memberdayakan masyarakat agar kehidupan sosial ekonominya lebih baik dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik untuk menjaga lingkungannya setelah kondisi sosial ekonominya menjadi lebih terjamin. Melalui kegiatan tersebut masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya. Adapun Sasaran Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan antara lain:

- a. Terlaksananya penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota.
- b. Tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- c. Terwujudnya masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta memeliharanya.

Mengingat situasi dan kondisi penanganan kawasan kumuh yang masih belum bisa menuntaskan penyebaran lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang bahkan tiap tahun masih terus bertambah, maka kegiatan-kegiatan penanganan kawasan kumuh khususnya perumahan dan permukiman perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah agar dapat memberikan motivasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang lingkungan, ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu melalui kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan ini diharapkan dapat mendorong penuntasan kawasan kumuh di pinggiran maupun perkotaan.

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan meneliti mengenai Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Memberdayakan Masyarakat Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Pada prinsipnya implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan dan non tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrasi yang sengaja dibentuk untuk menghasilkan dampak tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Hasil dari proses

implementasi penanganan lingkungan kumuh tentunya akan memberi dampak bagi para masyarakat dan penghidupannya. Di dalam skripsi ini penulis akan melihat sejauh mana perkembangan kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat daerah kumuh dengan adanya kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang rumuskan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memberikan judul penelitian skripsi ini dengan judul: **“Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi administrasi publik, sehingga nantinya dapat memperkaya kajian ilmiah yang perlu dijadikan bahan referensi dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tema ini.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malang serta Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Serta sebagai bahan pembanding dan pertimbangan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian terkait dengan judul atau topik yang sama. Yang terakhir yaitu memberikan informasi serta gambaran pada pembaca tentang implementasi penanganan lingkungan

perumahan dan permukiman kumuh dalam upaya memberdayakan penghidupan masyarakat dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian ini, penulis membagi laporan penelitian menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang diskripsi pendahuluan kegiatan penelitian, mengenai hal-hal yang melatar belakangi permasalahan, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang berbagai teori pendukung yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Teori tersebut didapat dari referensi buku teks, jurnal atau artikel ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti sekaligus untuk membentuk pola pemikiran dan analisis yang bersangkutan serta pemikiran yang ilmiah dalam menghadapi permasalahan tersebut dari berbagai literatur.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelitian, yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan (analisis) data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Memberdayakan Masyarakat Desa Baturetno. Serta membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaaan Masyarakat Desa Baturetno. Dalam bab ini juga akan disertai analisis yang mendalam terhadap kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut berdasarkan teori-teori yang berkaitan, serta diperkuat dengan informasi yang didapat langsung dari wawancara mendalam dengan aktor yang terlibat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi hasil akhir yaitu kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan pada pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan serta memberikan gambaran kemungkinan penelitian-penelitian lanjutan dari topik yang dibahas. Dan disertai rekomendasi-rekomendasi yang mungkin dijalankan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2010:65) merumuskan proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Kamus Webster dalam Wahab (2010:64) merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi rencana dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sangat berbeda seperti pembangunan infrastruktur fisik atau penyediaan layanan teknis atau profesional tertentu yang merupakan tanggung jawab bukan perencana tetapi tenaga teknis dan administrasi fungsional. Tidak ada keraguan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses implementasi dan bahwa tanpa mereka tidak akan ada hasil terlihat dari proses perencanaan. Dengan kata lain, rencana harus

dioperasionalkan. Jadi Honadle dalam Conyers dan Hills (1990:155) mengamati bahwa, dalam konteks pelaksanaan proyek, “implementasi” merujuk pada proses konversi sumber daya (seperti bahan, teknologi dan dana) ke barang dan jasa. Ini adalah bagian dari proses implementasi rencana dimana perencana secara khusus berkaitan. Peran perencana dalam proses pelaksanaan rencana dengan demikian berkaitan dengan mobilisasi, mengorganisir dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan yang terkandung dalam rencana.

Implementasi juga berarti kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan rencana yang ada. Oleh karena itu, Pressman dan Wildavsky dalam Parsons (2008:464) menyatakan *“implementation is a process of interaction between the settings of goals and action geared to achieve them”* (implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut). Tujuan harus didefinisikan secara jelas dan dapat dipahami dengan baik, sumber daya harus tersedia, rantai komando harus dapat menyatukan dan mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Dalam setiap perumusan suatu kebijakan (program) selalu diiringi dengan suatu implementasi. Betapapun baiknya suatu program tanpa implementasi yang benar dan baik maka tidak akan banyak berarti. Suatu program hanyalah rencana bagus di atas kertas jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Implementasi bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik

ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah dioperationalkan. Jones (1991:296) memberikan pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat terhadap masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya.

2. Proses implementasi Kebijakan

Implementasi tidak dapat dipisahkan dari tahapan lainnya, hambatan yang mempengaruhi implementasi proyek atau program ditetapkan pada tahap awal identifikasi dan penilaian alternatif tindakan selama dan sesudah implementasi. Meskipun demikian yang lebih penting bahwa perencana harus memperhatikan bagaimana rencana akan diimplementasikan. Dengan kata lain, penting untuk memperhatikan operasionalisasi rencana atau rencana implementasi, identifikasi berbagai macam aktivitas yang terkait dengan

rencana atau proyek, membuat jadwal pemakaian sumber daya (keuangan, staff, material dan peralatan) yang diperlukan untuk implementas. Tahap ini paling penting dalam proses perencanaan dan yang paling sering diabaikan sebab tidak dipandang sebagai tanggung jawab perencana. Penting membentuk struktur manajemen implementasi khusus untuk memastikan rencana diimplementasikan dengan benar (Conyers dan Hill, 1990: 80-81).

Casley dan Kumar dalam Wibawa (1994:16), menunjukkan enam langkah dalam melakukan implementasi yaitu:

- a. Identifikasi masalah, batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan dipisahkan masalah dari gejala yang mendukungnya atau rumuskan sebuah hipotesis.
- b. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut, kumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif yang memperkuat hipotesis.
- c. Pengkajian hambatan dalam pembuatan keputusan, analisa situasi politik dan organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan pertimbangkan berbagai variabel seperti komposisi staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen.
- d. Kembangkan solusi-solusi alternatif.
- e. Memperkirakan solusi yang paling layak, menentukan kriteria dengan jelas dan diterapkan untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
- f. Memantau umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan untuk menentukan tindakan yang perlu diambil.

Terdapat dua tahapan dari proses implementasi yang terdiri dari tahap interpretasi dan tahap pengorganisasian, menurut Joko Widodo (2012:90) yaitu sebagai berikut:

a. Tahap interpretasi (*interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*).

Di dalam penelitian ini termasuk dalam kebijakan manajerial, karena kebijakan manajerial di wujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (bupati atau walikota) dan kebijakan teknis operasional di wujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan, sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak hanya sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi.

b. Tahap pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung jawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja; dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

1) Pelaksana kebijakan (*policy implementor*)

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Dinas, badan, kantor, unit pelaksanaan teknis dilingkungan pemerintah daerah.
- b) Sektor swasta
- c) Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- d) Komponen masyarakat

Para pelaku kebijakan tersebut juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

2) Standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure*)

Setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

3) Sumber daya keuangan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standar prosedur operasi, langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain.

4) Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila melaksanakan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator

5) Penetapan jadwal kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

6) Tahap aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realita nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut LAN dalam Rewansyah (2010:57), menyatakan bahwa efektifitas implementasi dapat dilihat antara lain dari: (1) output kebijakan oleh badan atau pihak pelaksana; (2) pemenuhan atau ketaatan kelompok sasaran kebijakan (*target groups*) terhadap output kebijakan; (3) dampak nyata output kebijakan; (4) dampak output kebijakan berdasarkan persepsi kelompok sasaran dan (5) penyempurnaan (*feedback*) terhadap kebijakan publik.

Sementara itu menurut George C. Edwards dalam Jones (1991:320) mengungkapkan bahwa kebutuhan utama bagi keefektifan implementasi adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas maka para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Selain itu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining dalam Keban (2004:78) salah satu diantaranya adalah hakekat kerjasama yang dibutuhkan dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Menurut Gow dan Marss dalam Keban (2004:73) mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai hambatan, antara lain:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi
3. Ketidakmampuan sumberdaya manusia di bidang teknis dan administratif
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu
7. Sistem informasi yang kurang mendukung
8. Perbedaan agenda tujuan antara aktor
9. Dukungan yang berkesinambungan

B. Kebijakan Pembangunan Wilayah Perkotaan

Pembangunan wilayah, meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek yaitu: bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah *growth theory*, *rural development theory*, *agro first theory*, *basic needs theory*, dan lain sebagainya. Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Hettne, 2001).

. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu

berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah. Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai leading sektor.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten dan langgeng bagi persoalan yang dihadapi para pembuat keputusan dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan. Satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan Giarratani dalam Nugroho dan Dahuri (2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu:

1. Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*). Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.
2. Aglomerasi (*imperfect divisibility*). Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.
3. Biaya transport (*imperfect mobility of good and service*). Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Perencanaan wilayah di berbagai negara tidak sama, tergantung dari kehidupan ekonomi dan masalah yang di hadapi daerah tersebut. Secara historis setidaknya terdapat tiga pendekatan perencanaan wilayah (Jayadinata, 1999), yaitu:

- 1) Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah kota yang bersifat sosial. Pelaksanaannya meliputi perbaikan bagian kota yang keadaannya telah rusak dan tidak memenuhi standar, pemugaran kota, pembuatan kota satelit untuk membantu meringankan kota industri yang terlalu padat penduduknya. Titik perencanaan wilayah semacam ini ditujukan pada kota yang besar dan wilayah sekelilingnya (*hinterland*) yang dapat menunjang kota dalam perencanaan kota dan wilayah.
- 2) Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya pada wilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnansi industri (wilayah khusus). Dalam wilayah seperti ini pemerintah perlu mengatur intensif pembiayaan, pengaturan rangsangan untuk prasarana industri, pengaturan konsensi pajak dan sebagainya. Sehingga industri tertentu dapat berlokasi di wilayah tersebut.
- 3) Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi (perencanaan pedesaan dan wilayah). Hal ini dapat dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara pedesaan dan perkotaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 64 ayat (2) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa perencanaan kawasan permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman guna memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka

panjang. Untuk pemeratakan pembangunan harus digunakan pendekatan perwilayahan atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam satuan wilayah geografi sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (dapat juga menurut satuan daerah tata praja atau daerah administrasi). Disamping itu diperlukan desentralisasi yaitu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah regional dan lokal, dalam desentralisasi harus terdapat koordinasi yang baik serta efisien dan efektif.

C. Identifikasi Permasalahan Daerah Perkotaan

1. Masalah Permukiman

Pada dasarnya kota terdiri dari bangunan tempat tinggal, perkantoran dan perniagaan. Gambaran tentang satu kota selalu berupa susunan bangunan fisik yang berjejer sepanjang jalan ekonomi, gugus perkantoran pemerintahan dan perniagaan, perkampungan atau permukiman warga kota, rumah ibadah dan pertamanan. Seluruh bangunan fisik ini biasanya berkembang lebih lambat dibanding dengan penambahan penduduk kota, baik penambahan penduduk kota secara alami maupun karena derasnya arus urbanisasi (Marbun, 1994).

Permukiman sebagai bagian dari lingkungan hidup dan merupakan lingkungan hidup buatan adalah salah satu hasil kegiatan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Permukiman terdiri dari kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, dan berfungsi sebagai sarana tempat tinggal untuk beristirahat setelah melakukan tugas sehari-hari,

tempat bernaung dan melindungi diri maupun keluarganya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari para penghuninya. Tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan juga kualitas. Selama ini kawasan pemukiman baru lebih ditekankan pada aspek fisik bangunannya saja. Sedangkan permukiman lama yang sudah ada tumbuh dan berkembang dengan pesat tanpa terkendali karena kurang adanya tertib dan pengawasan pembangunan. Kedua hal di atas tersebut mengakibatkan semakin menurunnya kualitas permukiman dalam arti (Marbun, 1994):

1. Kepadatan bangunan yang terlalu tinggi.
2. Lenyapnya taman-taman dan ruang terbuka.
3. Tidak mencukupinya jaringan air bersih, listrik dan pembuangan air kotor.
4. Berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat pertemuan dan olahraga, rekreasi, dan lain-lain.
5. Hilangnya ciri-ciri khas atau karakter spesifik dari daerah permukiman tertentu.

Menurunnya kualitas permukiman yang disertai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya alam merupakan masalah penting bagi seluruh negara di dunia. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman merupakan prakondisi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab produktivitas manusia terutama sekali tergantung pada tersedianya wadah yang memadai untuk bekerja, beristirahat sekeluarga dan bermasyarakat.

Menurut Kamus Tata Ruang Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, agar suatu permukiman dapat dikatakan baik, maka suatu permukiman harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Lokasi kawasan yang baik, seperti tidak terganggu polusi, tidak berada di bawah permukaan air setempat, mempunyai kemiringan rata-rata, memberikan kemungkinan untuk perkembangan selanjutnya, ada keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya.
2. Kualitas hunian yang baik, seperti kualitas bahan bangunan yang memenuhi syarat, ventilasi yang cukup, kepadatan bangunan, perbandingan antara luas bangunan dengan kepadatan penghuni, tersedianya penampungan dan pembuangan kotoran manusia.
3. Ada prasarana lingkungan yang baik, seperti jalan, air bersih, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, dan tersedianya jaringan listrik. Sarana lingkungan yang sesuai dengan kepadatan penduduk, seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang terbuka hijau, dan lain-lain

2. Masalah Lingkungan

Laju urbanisasi dan pembangunan kota yang tinggi akan membawa dampak tersendiri bagi lingkungan hidup di dalam maupun di sekitar kota. Perkembangan aktivitas ekonomi, social, budaya dan jumlah penduduk

membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota. Aktivitas kota dan pertumbuhan penduduk tersebut telah menyita areal taman, tanah kosong, hutan ladang di sekelilingnya untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat pendidikan, kantor, ataupun tempat berolahraga dan untuk jalan.

Demikian pula dengan perkembangan industri dan teknologi mencemari lingkungan. Akibat dari pembangunan kota dan perkembangan teknologi ini adalah timbulnya pencemaran lingkungan yang berupa (Marbun, 1994):

1. Pencemaran udara;
2. Pencemaran air;
3. Pencemaran tanah;
4. Kebisingan.

Akibat atau bahaya yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan secara garis besar merugikan manusia, terutama mereka yang tinggal di kota. Kota-kota di Indonesia dan beberapa kota dunia, umumnya menjadi pelangan penyakit menular seperti kolera, thypus, sesak nafas dan lain-lain. Udara di kota menjadi panas dan berdebu. Air minum tercemar oleh berbagai macam bakteri dan zat kimia yang merugikan kesehatan (Marbun, 1994).

3. Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan

adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti pembangunan. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan kesehatan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital – sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2006).

D. Permukiman Kumuh

1. Pengertian Permukiman Kumuh

Sebelum mengarah kepada permukiman kumuh, perlu diketahui arti dasar dari kumuh itu sendiri, Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang

sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Definisi pemukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan kehidupan penghuni, karena keadaan keamanan dan kesehatan memprihatinkan, kenyamanan bangunan tersebut tidak memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat rendah serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat (Kamus Tata Ruang, 1997: 81);
2. Kumuh dapat diartikan mengandung sifat-sifat keusangan, banyak ditujukan pada keadaan guna lahan atau zona atau kawasan yang sulit diperbaiki, jadi yang lebih baik dibongkar, tapi juga dapat ditujukan pada keadaan yang secara fisik, belum tua tapi sudah tidak lagi memenuhi berbagai standar kelayakan (Kamus Tata Ruang, 1997: 57);
3. Siswono Yudohusodo (1991) membedakan bahwa pemukiman kumuh tidak selalu liar dan hunian liar tidak selalu kumuh, pengertian hunian liar biasanya dikaitkan dengan status kepemilikan yaitu jika dibangun diatas tanah yang bukan haknya, dan hunian liar diperkotaan sebagian besar berdiri diatas tanah negara.

Definisi diatas tersebut dpat dirumuskan bahwa pemukiman kumuh dan liar adalah sejumlah perumahan yang disebut kumuh apabila keadaannya tidak tertata dengan baik, kemudian terdapat jumlah penduduk yang padat, dan bentuk fisik bangunannya tidak sesuai untuk syarat bertempat tinggal sehingga lingkungan pemukiman terkesan kumuh

karena tidak memenuhi standar untuk bertempat tinggal ditunjang pula oleh tingginya resiko terhadap penularan penyakit dan pencemaran lingkungan.

Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan di mana pun, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif menurut Jawas Dwijo Putro (2011:20). Pemahaman kumuh dapat ditinjau dari :

1. Sebab Kumuh

Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari (1) segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara, (2) segi masyarakat/ sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah.

2. Akibat Kumuh

Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain (1) kondisi perumahan yang buruk; (2) penduduk yang terlalu padat; (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai; (4) tingkah laku menyimpang; (5) budaya kumuh; (6) apati dan isolasi.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana

jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Jawas Dwijo Putro, 2011 : 21).

Permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (13) adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan dalam Jawas Dwijo Putro (2011:22) adalah:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.

- c. Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

2. Karakteristik dan Klasifikasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Ciri lingkungan permukiman kumuh secara umum ditandai oleh ketidakjelasan status lahan dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana permukiman, antara lain:

- a. Tanah
- b. Penghuni
- c. Bangunan rumah
- d. Sarana lingkungan
- e. Prasarana lingkungan
- f. Sistem penghuni

Permukiman kumuh menurut M. Agung Ridlo (2001:24), merupakan wujud fisik yang erat kaitannya dengan kemiskinan di perkotaan yang memiliki karakteristik/ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kampung tumbuh dan berkembang secara organik dengan kondisi perumahan di bawah standard. Kondisi fisik lingkungan dan bangunan yang sangat buruk dan tidak teratur, tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan, pelayanan sarana dan prasarana lingkungan serba kurang (air bersih, saluran air limbah dan air hujan, pembuangan sampah, dan lain-lain).
- b. Lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan permukiman yang absah, legal dan permanen tetapi kondisi fisik lingkungannya semakin memburuk karena kurang pemeliharaan, umur bangunan yang menua, ketidak acuhan atau karena terbagi-bagi menjadi unit pekarangan rumah atau kamar yang semakin kecil.
- c. Pada umumnya penduduknya mempunyai status sosial dan ekonomi rendah atau berpenghasilan di bawah standar.
- d. Kepadatan dan kerapatan bangunan yang lebih besar dari yang diijinkan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.
- e. Penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat.
- f. Kebanyakan penduduknya berpendidikan rendah, berstatus rendah dan mempunyai struktur keluarga yang tidak menguntungkan.

- g. Bahan-bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan yang bersifat semi permanen.
- h. Merupakan suatu kawasan yang mempunyai fungsi kota yang bercampur dan tidak beraturan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan perkotaan yang rawan bencana.

Untuk mengidentifikasi jenis/tipe kawasan permukiman kumuh maka dilakukan penggolongan atau klasifikasi, hal ini digunakan sebagai langkah dalam penanganan selanjutnya pada kawasan tersebut agar mudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.

Eko Budihardjo (1997) mengklasifikasikan permukiman kumuh berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitasnya, ada dua jenis permukiman kumuh yaitu:

- a. Kategori *slum*, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman.
- b. Kategori *squatter*, yaitu permukiman kumuh liar yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya; di sepanjang pinggir rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah dan lainnya.

Dari segi legalitasnya, kategori permukiman liar (*squatter*) ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau pada lahan kosong milik negara.

3. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan Kumuh

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota menurut Suparlan dalam Jawas Dwijo Putro (2011:22) adalah:

1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi.
2. Faktor bencana.

Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat di antara sesama pendatang maka pendatang-pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota. Di sisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu menyediakan hunian yang layak.

Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam seperti misalnya banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat.

Penghasilan rendah, pendidikan yang sangat kurang, dan kelangkaan waktu yang tersedia oleh pekerjaan, menyebabkan masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Semakin miskin keadaan mereka, semakin besar kebutuhan untuk tinggal di pusat kota

secara liar, namun memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan atau sumber penghasilan (Paulus Wirotomo, 1997 : 15).

E. Pentingnya Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman

1. Pengertian Perumahan dan Pemukiman

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman mendefinisikan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan perumahan adalah manajemen lingkungan yang baik dan terarah, karena lingkungan suatu perumahan merupakan faktor yang sangat menentukan dan keberadaannya tidak boleh diabaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena baik buruknya kondisi lingkungan akan berdampak terhadap penghuni perumahan.

Pengertian permukiman secara jelas dan rinci dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang mengandung pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Program penataan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan untuk menanggulangi masalah-masalah permukiman bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
- c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.
- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Setelah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan pengertian dasar perumahan dan kawasan permukiman, yakni:

“Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.”

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

2. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman

Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap. Pemenuhan kebutuhan permukiman tersebut diwujudkan dengan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk:

- a. Menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman.
- b. Mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya.
- c. Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.
- d. Pelaksanaan ketentuan pembangunan kawasan permukiman tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan.

Secara lebih lanjut, pada pasal 27 Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman disebutkan bahwa dalam usaha untuk meningkatkan kualitas permukiman, pemerintah memberikan bimbingan,

bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan kawasan permukiman tersebut. Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu perbaikan atau pemugaran, peremajaan, dan pengelolaan serta pemeliharaan yang berkelanjutan.

3. Pembangunan perumahan dan permukiman

Hakekat dari perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang serta mempunyai peran sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan bentuk manifestasi jatidiri. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan pemukimannya makan terlihat jelas bahwa kualitas sumberdaya manusia dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman dimana masyarakat tinggal menempatnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.”

Pembangunan perumahan dan permukiman diyakini mampu mendorong lebih dari seratus macam kegiatan industri yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman sangat berpotensi dalam menggerakkan roda ekonomi dan upaya penciptaan lapangan kerja produktif. Bagi banyak masyarakat Indonesia terutama golongan menengah kebawah, rumah juga merupakan barang modal, karena dengan rumah ini mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam mendukung kehidupan dan penghidupannya. Karenanya, permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai persoalan yang berkaitan dengan semua dimensi kehidupan di dalam masyarakat.

Sehubungan kelestarian lingkungan, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman harus tetap memperhatikan sasaran pengelolaan lingkungan yakni:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup secara yuridis adalah apabila konsep pembangunan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan yang dikaitkan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan tersebut harus berwawasan lingkungan sebagai upaya dasar dan berencana dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana (Husein, 1992 : 18).

Berdasarkan pada konsep tersebut, setiap pembangunan pada lingkungan kawasan perumahan dan permukiman harus benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup antara lain dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, setiap pengusaha wajib memelihara kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dalam meenunjang pembangunan yang berkesinambungan.

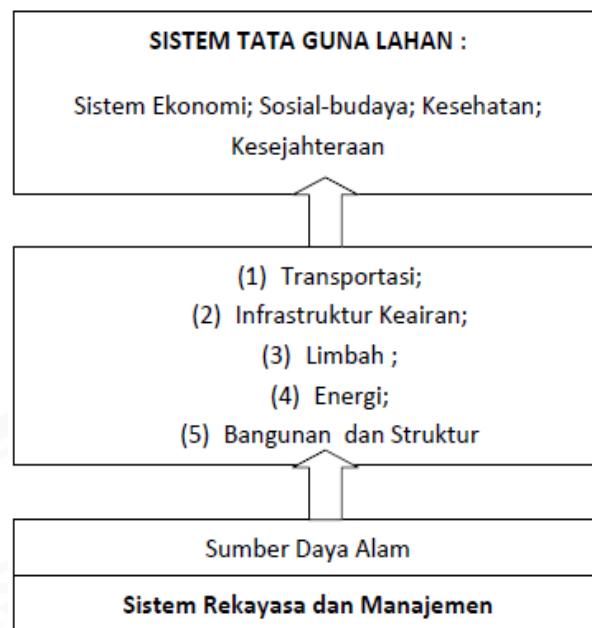
4. Pembangunan Infrastruktur

Grigg (2000) memaparkan bahwa infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini

merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana dasar dala pemukiman tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukima pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa pembangunan prasarana, sarana dan utiltas umum perumahan dilakukann oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Dalam kerangka sistem, Infrastruktur menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

Di sisi lain Grigg dan Fontane (2000) memberikan skema yang cukup jelas mengenai peran infrastruktur dalam mengkonversi sumber daya alam menjadi sumber daya yang memiliki manfaat besar bagi pengembangan system ekonomi, social budaya, kesehatan dan kesejahteraan. Seperti dijelaskan dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1. Peran Infrastruktur Sebagai Penopang/Pendukung Sistem Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan (Grigg dan Fontane, 2000)

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Hubungan pembangunan infrastruktur terhadap sistem tata guna lahan

tersebut ditegaskan oleh Grigg dan Fontane (2000) seperti pada gambar diatas. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur keairan, limbah, energi, serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.

5. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bagian dari penataan ruang yang berfungsi sebagai paru-paru kawasan perumahan dan permukiman. Kawasan hijau terdiri dari pertamanan, kawasan hijau hutan, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Fandeli, 2004). Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 pasal 26 ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman-tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Menurut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ruang terbuka hijau meliputi:

- a) Ruang terbuka hijau makro, seperti kawasan pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota dan landasan pengamanan bandar udara.

- b) Ruang terbuka hijau medium, seperti kawasan area pertamanan (*city park*), sarana olahraga, dan sarana pemakaman umum.
- c) Ruang terbuka hijau mikro, lahan terbuka yang ada di setiap kawasan permukiman yang disediakan dalam bentuk fasilitas umum seperti taman bermain (*playground*), taman lingkungan (*community park*), dan lapangan olahraga.

Peran masyarakat baik secara individu/kelompok, swasta, lembaga/badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau sebagai berikut:

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Peran masyarakat, swasta dan badan hukum dalam penyediaan RTH publik, meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH. Peran masyarakat pada RTH privat meliputi:

1. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan
2. Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) serta pengelolaan sampah

3. Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan dna lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman langsung maupun ditanam dalam pot
4. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH

F. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat

Pendekatan pembangunan yang sedang populer pada saat ini adalah pendekatan pembangunan yang mengutamakan peningkatan keberdayaab manusia atau masyarakat yang disebut pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Menurut Korten (2002:110) pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya sebagai hasil perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Definisi ini menekankan pada proses pembangunan dan fokus utamanya adalah pada peningkatan kapasitas perorangan dan institusional. Definisi ini mencakup asas keadilan, berkelanjutan dan pemerataan. Diakui bahwa masyarakat sendiri yang bisa menentukan apa yang sebenarnya yang mereka anggap perbaikan dalam kualitas hidup mereka.

Berdasarkan UU pasal 131 ayat 2 poin (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa peran masyarakat yaitu memberikan kontribusi dalam penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini

merupakan salah satu proses pemberdayaan manusia melalui rencana dan kegiatan pembangunan daerahnya. Pembangunan sosial merupakan sumber gagasan dari awal konsep pemberdayaan masyarakat, bermaksud membangun keberdayaan yaitu membangun kemampuan manusia dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Dalam pembangunan sosial ditekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Menurut Hadiman dan Midgley dalam Suharto (2005:5) model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui:

- a) Menumbuhkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu asset tenaga kerja.
- b) Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan , serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dengan cara menumbuhkan potensi diri dari masyarakat yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja, dalam setiap kegiatannya menggunakan tenaga kerja yang diambil dari masyarakat setempat.

Dasar dari proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya dan ini berguna untuk mendorong

masyarakat agar menjadi lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya atau bangkit dari keterpurukan dengan menggunakan dan mengakses sumber daya yang ada baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Seperti pendapat Hikmat (2001:100) yang menyatakan pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya, serta terpeliharanya budaya setempat.

Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam proses pemberdayaan perlu juga ditingkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, dengan memegang teguh aturan-aturan mengenai apa yang menjadi hak dan mana yang bukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan termasuk menumbuhkan perilaku yang berbudaya. Masyarakat sebagai individu tidak boleh pasrah pada keadaan yang dihadapi atas dasar pandangan hidup bahwa segala sesuatu merupakan nasib buruk bagi dirinya, oleh karena itu masyarakat harus didorong untuk dapat bangkit kembali menata kehidupannya setelah mengalami saat sulit dalam hidupnya.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Adanya proses perubahan sosial dalam proses pemberdayaan, dari yang pasif akhirnya menjadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan

pendapatnya, lebih semangat untuk merubah nasibnya. Suharto (2005:60) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan manunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersiafat fisik ekonomi maupun sosial seperti memilik kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai maya pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Dalam memberdayakan masyarakat ada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan mereka, yang saat ini merupakan kelompok lemah. Proses pemberdayaan ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannhidupnya sehingga harapan kedepannya untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat, mampu menyampaikan aspirasinya dan mempunyai mata percaharian yang merupakan sumber penghasilan mereka, dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan yang penting adalah masyarakat menjadi mandiri dalam kehidupan sehari-harinya.

Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk dapat memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki. Perencanaan dalam pembangunan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Syarat yang harus dipenuhi adalah kelengkapan indikator dan kejelasan mengenai kriteria alokasi bantuan. Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan berpusat pada rakyat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat, agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. Menurut Hikmat (2001:3) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan ketidakberdayaan. Hal ini berkaitan dan berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan manusia yang juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terdapat konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (2009) secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri

kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

G. Konsep Tridaya Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

Merupakan suatu pendekatan yang bersifat *bottom-up* karena masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama (subyek) dan juga obyek pembangunan. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilaksanakan berdasarkan Azas tridaya yang secara prinsip bertujuan mendayagunakan komponen masyarakat, usaha, ekonomi dan prasarana dan sarana lingkungannya. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan masyarakat, pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi serta pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan sebagai satu kesatuan yang yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) sesuai dengan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman Departemen Pengembangan Kawasan Kementrian Perumahan Rakyat, kegiatan

peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman yang memadukan aspek manusia, aspek lingkungan dan aspek ekonomi adalah sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Sosial Manusia

1. Memberikan dorongan percaya diri untuk dapat berkembang dan masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.
2. Pembangunan sumber daya manusia melalui jenis kegiatan yang dapat dikembangkan secara sosial ekonomi.
3. Masyarakat akan menyadari bahwa untuk dapat membangun dan bukan hanya menunggu bantuan, akan tetapi bagaimana menciptakan bantuan dan sekaligus berpartisipasi di dalamnya.

b. Pemberdayaan Fisik Lingkungan

1. Pengembangan sumber daya yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi lingkungan baik bagi keluarga maupun masyarakat.
2. Hasil yang dicapai dapat memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman.
3. Kegiatan yang dilakukan dapat menciptakan suatu bentuk lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

c. Pemberdayaan Ekonomi/Usaha

1. Kegiatan dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi individu masyarakat, keluarga maupun masyarakat secara luas.

2. Kegiatan yang dilakukan dapat menjadi cikal bakal bagi penciptaan lapangan kerja baru.

H. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2010 mulai melaksanakan program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Program ini dilaksanakan guna untuk mengintegrasikan beberapa program sebelumnya dalam skenario pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini, dibutuhkan penanganan yang bersifat multisektoral dan berkelanjutan. Objek penanganan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan adalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merupakan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya sebagai perumahan dalam rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten setempat. Untuk itu, kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) sebagai kegiatan fasilitasi dan stimulasi, ini dilaksanakan dengan berazaskan:

- a. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya, yakni mencakup 3 (tiga) fokus penanganan masyarakat dengan memperhatikan: i) tatanan sosial kemasyarakatan, ii) penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian, serta iii) pengembangan kegiatan usaha ekonominya;

- b. Pemberdayaan (aspek sosial kemasyarakatan), artinya kegiatan diarahkan pada suatu proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (*leading actors*);
- c. Perhatian dan keberpihakan dengan menempatkan aspirasi, kepentingan serta keputusan masyarakat sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan.

Rencana PLP2K-BK dilaksanakan dengan Pendekatan Tridaya dimana masyarakat dan pemerintah daerah menjadi unsur utama.

Tujuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan adalah:

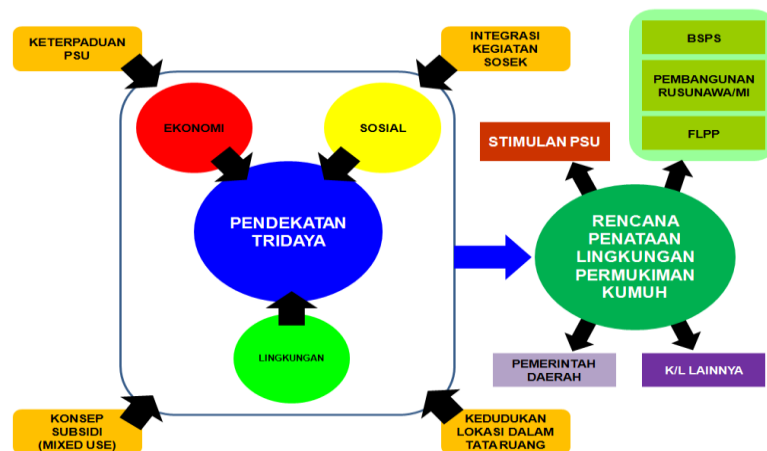
- a. Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan tridaya.
- b. Mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni.

Mengacu pada Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya pencegahan terjadinya daerah kumuh pada hakekatnya bermuara kepada upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan serta upaya untuk memberdayakan masyarakat agar kehidupan sosial ekonominya lebih baik dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik untuk menjaga lingkungannya setelah kondisi sosial

ekonominya menjadi lebih terjamin. Melalui kegiatan (PLP2K-BK) tersebut masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya.

Objek penanganan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan adalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merupakan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya sebagai perumahan dalam rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten setempat.

Gambar 2
Prinsip Penanganan Lingkungan Perumahan dan permukiman Kumuh Berbasis Kawasan



Sumber: Buku Panduan Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta yang senyatanya terjadi di lapangan mengenai upaya peningkatan perumahan dan permukiman kumuh melalui Program PLP2K-BK sebagai sarana Pemberdayaan masyarakat Desa Baturetno secara sistematis dan faktual di lapangan oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Usman dan Akbar (2008:129) merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan tentang data-data yang didapat dari lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) menyatakan bahwa penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Dalam laporan penelitian ini, keduanya dapat digunakan sebagai pelengkap sehingga nantinya pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam Sugiyono (2010:377) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini memiliki manfaat, yaitu: penetapan fokus dapat membatasi studi dan penerapan fokus tersebut berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang (Moleong, 2007:94)

Penerapan fokus dalam penelitian ini ditujukan upaya peningkatan perumahan dan permukiman kumuh melalui Program PLP2K-BK sebagai sarana memberdayakan masyarakat Desa Baturetno. Adapun yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh melalui Implementasi Program PLP2K-BK sebagai sarana Pemberdayaan masyarakat Desa Baturetno yang pelaksanaannya dilakukan menggunakan pendekatan tridaya, yang terdiri dari:
 - a. Daya Pengembangan Aspek Sosial Kemasyarakatan
 - 1) Penyiapan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM)
 - 2) Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/ *Community Action Plan* (CAP) oleh masyarakat

- b. Daya Pengembangan Aspek Lingkungan
 - 1) Penyediaan prasarana dan sarana dasar (infrastruktur)
 - 2) Peningkatan kondisi rumah tinggal
 - 3) Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH)
 - 4) Konsep dan rencana pengembangan wilayah
 - c. Daya Pengembangan Aspek Kegiatan Sosial Ekonomi
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh melalui Program PLP2K-BK sebagai sarana memberdayakan masyarakat Desa Baturetno

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian untuk memperoleh data dari sumber. Peneliti juga diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi serta kegiatan yang ada dilingkungannya. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Pemilihan lokasi penelitian pada Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang karena daerah tersebut termasuk daerah kawasan kumuh budaya pedesaan dan memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi sebagai kawasan perkebunan dan peternakan, selain itu karena Kabupaten Malang sendiri merupakan kabupaten/kota pemenang dari Penghargaan Adiupaya Puritama yang merupakan prioritas lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.

Sedangkan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga akan menghasilkan informasi data yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian, Yaitu di Badan Perumahan Kabupaten Malang dan Kantor Kelurahan Desa Baturetno

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang penting dalam penyediaan informasi yang menjadi fokus penelitian dan akan menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Menurut Lofland dalam Moleong (2007:157) menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun sumber data yang menunjang penelitian ini meliputi :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian bersumber pada informan. Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Badan Perumahan Kabupaten Malang dan Tim Pelaksana Teknis kegiatan PLP2K-BK.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti yang berasal dari sumber-sumber yang relevan, dimana tujuannya adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder meliputi : dokumen, arsip, perpustakaan, peraturan atau undang-undang, laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan laporan penelitian terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar, artikel, jurnal dan majalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah informasi data yang di dapat dari dokumen formal yang dimiliki oleh informan disini salah satunya yaitu draft petunjuk teknis dan hasil Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulakn data dan informasi (Arikunto, 2006:134). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan mengadakan beberapa pedoman pertanyaan yang ditujukan kepada nara sumber atau informan yang dapat mendukung dalam memberikan data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak yang menjadi narasumber dalam

penelitian ini yaitu Badan Perumahan Kabupaten Malang serta Kelurahan dan masyarakat di lokasi penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap keadaan yang diteliti dan kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Berkaitan dengan pengamatan ini maka peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian yaitu di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu berasal dari dokumen, buku, surat kabar, majalah, atau bisa juga di dapat melalui gambar dan catatan khusus yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibutuhkan data yang berkaitan dengan program yang dijalankan sebagai sumber data untuk menyusun laporan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Arikunto (2006:136), menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, menurut Sugiyono (2010:398).

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen penelitian yang paling utama dan mendasar, karena peneliti memiliki peran sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, dan menjadi pelapor hasil kegiatan penelitiannya, (Moleong, 2007:168).

2. Pedoman wawancara atau *interview guide*

Instrumen ini digunakan Sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Wawancara dilakukan pada informan sebagai sumber untuk pengumpulan data agar wawancara yang dilakukan terstruktur dan lancar.

3. Catatan lapangan atau *field note*

Catatan lapangan merupakan buku catatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian untuk mencatat hasil wawancara maupun pengamatan yang berisi tentang informasi dan data-data yang ada di lokasi peneliti terkait dengan penelitian.

G. Analisis Data

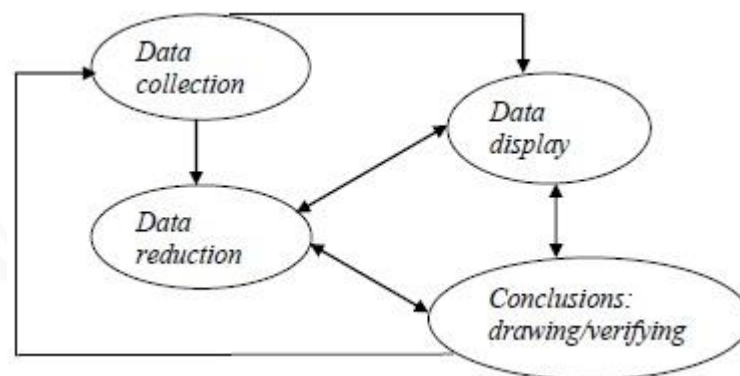
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data menurut Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Dalam proses analisis data analisis yang dilakukan terus menerus selama pengumpulan data dilapangan sampai pengumpulan data dianggap cukup dan dianggap selesai oleh peneliti. Dilaksanakan mencakup beberapa kegiatan yaitu menelaah data, pengelompokan data, menemukan apa yang dianggap penting sesuai dengan relevansi dan fokus penelitian, mempelajari serta memutuskan apa yang sudah dilaporkan. Dengan adanya analisis ini diharapkan dapat mengungkap data apa yang masih perlu dicari, berbagai pertanyaan apa yang perlu dijawab, cara apa yang harus diperbaiki oleh adanya berbagai data yang telah masuk dan telah dianalisis oleh peneliti.

Gambar 3

Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman



Sumber: *Methew B. Miles and Michael A. Huberman (2009)*

Gambar 3 menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2009:16-21), yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi;
2. *Data Display* (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami;
3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan bagan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan menganalisa data dilakukan secara bertahap dan saling berkaitan. Pertama data diperoleh dari penelitian kemudian data tersebut diproses berdasarkan fokus penelitian, dari proses ini akan didapatkan data sementara, kemudian data diproses kembali melalui seleksi, penyederhanaan dan pemfokusan yang ada dalam catatan lapangan atau bisa disebut dengan reduksi data. Selanjutnya dilakukan verifikasi data yang merupakan hal penting di dalam membuat kesimpulan secara tepat.

H. Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan dan kebenaran dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut keabsahan data. Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan, kepastian, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2007:326). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel teknik pemeriksaan data di bawah ini:

Tabel 1. Teknik Pemeriksaan Data kualitatif

| KRITERIA | TEKNIK PEMERIKSAAN |
|--|---|
| Kreadibilitas (derajat kepercayaan) | 1) Perpanjangan keikut-sertaan 2) Ketekunan pengamatan 3) Triangulasi 4) Pengecekan sejawat 5) Kecukupan referensi 6) Kajian khusus negatif 7) Pengecekan anggota |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Kepastian | 8) Uraian rinci |
| Kebergantungan | 9) Audit kebergantungan |
| Kepastian | 10) Audit kepastian |

Sumber: Moleong, 2007:32



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a) Sejarah Kabupaten Malang

Berdirinya pemerintahan di daerah Malang yang kemudian dikenal sebagai Kabupaten Malang, ditinjau dari berbagai peninggalan sejarah membuktikan adanya hubungan sejarah dengan pusat Kerajaan Kanjuruhan di sekitar daerah Dinoyo sejak abad VIII masehi. Kabupaten Malang mempunyai kesinambungan sejarah yang tua, sejak abad XX SM. Dengan abad VIII masehi sampai pembentukannya secara formal sebagai kabupaten pada abad XIX. Petunjuk adanya kesinambungan sejarah Kabupaten Malang dengan pusat-pusat pemerintahan masa lalu, berupa Piagam/Prasasti baik dari batu maupun tembaga yang dikeluarkan oleh Raja, Wakil Raja, Penguasa Kerajaan, Keluarga Raja yang menyebutkan nama-nama desa atau satuan tempat tinggal yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Malang.

Berdasarkan prasasti Kanjuruhan, tidak diragukan lagi bahwa pada abad VIII M di Malang telah ada suatu pusat pemerintahan yang pertama. Dalam prasasti Kanjuruhan (Prasasti Dinoyo) itu digunakan dua macam cara penanggalan yaitu yang pertama dengan cara Cronogram (Candrasangkala) dan dengan cara penulisan angka tahunnya. Dari unsur penanggalan Candrasangkala serta menyebutkan rasi-rasi bintang yang

disebutkn pada saat itu, maka saat itu ekivalen dan bertepatan dengan hari Jum'at, tanggal 28 Nopember tahun 760 Masehi, dan sekarang dikenal sebagai hari jadi Kabupaten Malang.

b) Kondisi Geografis dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112O17'10,90" – 112O57'00,00" Bujur Timur, 7O44'55,11" – 8O26'35,45" Lintang Selatan. Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Malang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukan tanah dan ruangnya. Adapun luas wilayah per kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Luas wilayah | |
|----|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | (Ha) | (%) thd total |
| 1 | Donomulyo | 10 Desa | 17.535 | 4,96% |
| 2 | Kalipare | 9 Desa | 13.215 | 3,74% |
| 3 | Pagak | 8 Desa | 9.010 | 2,55% |
| 4 | Bantur | 10 Desa | 17.575 | 4,97% |
| 5 | Gedangan | 8 Desa | 17.000 | 4,81% |
| 6 | Sumber majing wetan | 15 Desa | 27.160 | 7,68% |
| 7 | Dampit | 11 Desa/1 Kel | 14.895 | 4,21% |
| 8 | Tirtoyudo | 13 Desa | 22.615 | 6,41% |
| 9 | Ampelgading | 13 Desa | 20.044 | 5,67% |
| 10 | Poncokusumo | 17 Desa | 22.250 | 6,29% |
| 11 | Wajak | 13 Desa | 12.485 | 3,53% |
| 12 | Turen | 15 Desa/2 Kel | 6.420 | 1,82% |
| 13 | Bululawang | 14 Desa | 5.195 | 1,47% |

| | | | | |
|----|--------------|----------------|--------|-------|
| 14 | Gondanglegi | 14 Desa | 6.985 | 1,98% |
| 15 | Pagelaran | 10 Desa | 4.015 | 1,14% |
| 16 | Kepanjen | 14 Desa/4 Kel | 5.660 | 1,60% |
| 17 | Sumberpucung | 7 Desa | 4.138 | 1,17% |
| 18 | Kromengan | 7 Desa | 4.452 | 1,26% |
| 19 | Ngajum | 9 Desa | 6.624 | 1,87% |
| 20 | Wonosari | 8 Desa | 6.191 | 1,75% |
| 21 | Wagir | 12 Desa | 7.709 | 2,18% |
| 22 | Pakisaji | 12 Desa | 4.465 | 1,26% |
| 23 | Tajinan | 12 Desa | 4.032 | 1,14% |
| 24 | Tumpang | 15 Desa | 6.480 | 1,83% |
| 25 | Pakis | 15 Desa | 6.481 | 1,83% |
| 26 | Jabung | 15 Desa | 12.680 | 3,59% |
| 27 | Lawang | 10 Desa/ 2 Kel | 7.165 | 2,03% |
| 28 | Singosari | 14 Desa/ 3 Kel | 12.244 | 3,46% |
| 29 | Karangploso | 9 Desa | 7.115 | 2,01% |
| 30 | Dau | 10 Desa | 5.775 | 1,63% |
| 31 | Pujon | 10 Desa | 12.095 | 3,42% |
| 32 | Ngantang | 13 Desa | 15.195 | 4,30% |
| 33 | Kasembon | 6 Desa | 8.550 | 2,42% |

Sumber: Malang dalam angka 2011, BPS Kabupaten Malang

Secara administratif, Kabupaten Malang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Batas administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan

Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo

Kabupaten Malang mencakup 33 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 3347,87 km². dikelilingi oleh gunung /pegunungan Arjuno, Anjasmoro, Kelud, Bromo, Semeru dan Tengger.

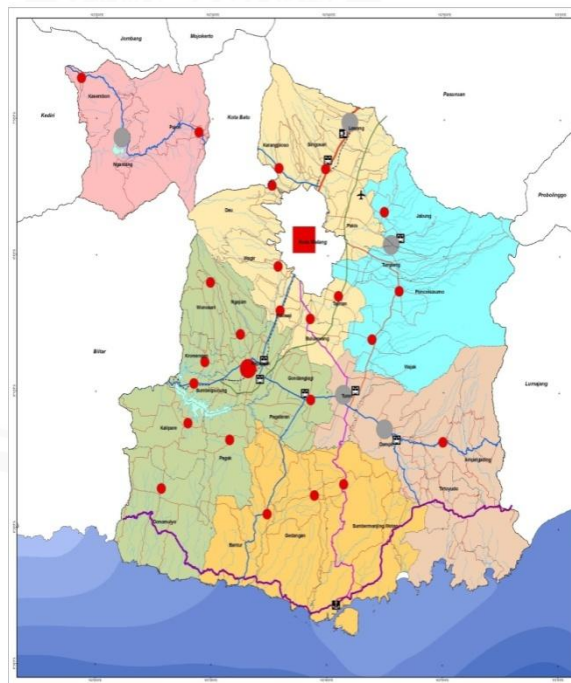
Kondisi iklim Kabupaten Malang menunjukkan nilai kelembaban tertinggi adalah 90.74 % yang jatuh pada bulan Desember, sedangkan nilai

kelembaban terendah jatuh pada bulan Mei, rata-rata berkisar pada 87.47 %. Suhu rata-rata 26.1 – 28.3 °C dengan suhu maksimal 32.29 °C dan minimum 24.22 °C. Rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 km/jam. Kecepatan angin terendah yakni berkisar pada 0.55 km/jam umumnya jatuh pada bulan Nopember dan tertinggi yakni 2.16 km/jam jatuh pada bulan September. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.800 – 3.000 mm per tahun, dengan hari hujan rata-rata antara 54 – 117 hari/tahun.

Adapun peta administrasi Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 4

Peta Wilayah Kabupaten Malang

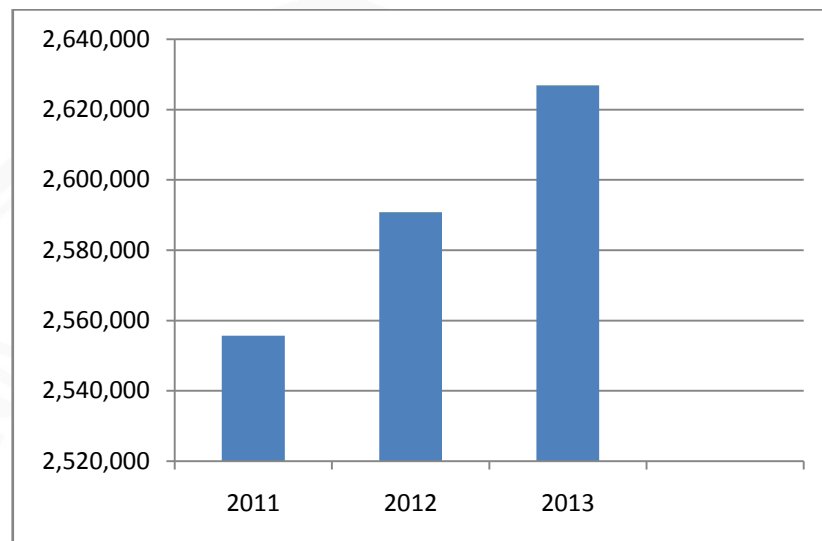


Sumber: Buku Profil Kabupaten Malang, 2011

c). Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Malang

Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Malang dari tahun 2011 sampai tahun 2013, dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 5
Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun
2011-2013



Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2013

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2011-2013 selalu meningkat. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.555.671 jiwa, pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.590.865 jiwa, dan pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.626.851 jiwa.

d). Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Malang

Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang, dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Penduduk Miskin (KK) | No | Nama Kecamatan | Jumlah Penduduk Miskin (KK) |
|----|---------------------|-----------------------------|----|----------------|-----------------------------|
| 1 | Donomulyo | 4.035 | 18 | Kromengan | 2.470 |
| 2 | Kalipare | 3.890 | 19 | Ngajum | 3.037 |
| 3 | Pagak | 3.362 | 20 | Wonosari | 3.399 |
| 4 | Bantur | 4.266 | 21 | Wagir | 2.420 |
| 5 | Gedangan | 2.503 | 22 | Pakisaji | 3.409 |
| 6 | Sumber majing wetan | 4.562 | 23 | Tajinan | 4.958 |
| 7 | Dampit | 7.375 | 24 | Tumpang | 7.071 |
| 8 | Tirtoyudo | 4.281 | 25 | Pakis | 8.581 |
| 9 | Ampelgading | 3.986 | 26 | Jabung | 6.690 |
| 10 | Poncokusumo | 7.907 | 27 | Lawang | 4.384 |
| 11 | Wajak | 5.584 | 28 | Singosari | 7.207 |
| 12 | Turen | 6.696 | 29 | Karangploso | 4.430 |
| 13 | Bululawang | 4.568 | 30 | Dau | 2.716 |
| 14 | Gondanglegi | 5.240 | 31 | Pujon | 5.033 |
| 15 | Pagelaran | 4.259 | 32 | Ngantang | 5.332 |
| 16 | Kepanjen | 5.453 | 33 | Kasembon | 3.469 |
| 17 | Sumberpucung | 3.172 | | Total | 155.745 |

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2011

2. Gambaran Umum Kecamatan Singosari

Kecamatan Singosari merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang yang terletak pada ketinggian 487 meter dpl dengan suhu rata-rata 22 °C-32°C serta curah hujan rata-rata 349 mm per tahun. Dari segi administratif wilayah Kecamatan Singosari terbagi dari 3 Kelurahan dan 14 Desa serta memiliki luas wilayah 14.876 Ha dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Lawang

Sebelah Timur : Kecamatan Jabung

Sebelah Selatan : Kecamatan Blimbing (Kota Malang)

Sebelah Barat : Kecamatan Karangploso

Kecamatan ini berada di sebelah utara [Kota Malang](#), kecamatan ini dilintasi jalur utama Surabaya-Malang dan termasuk sebagai daerah titik macet terparah di Malang. Namun dari sisi SDM Singosari bisa dikatakan sebagai salah satu dari urutan teratas kecamatan termaju dan paling terpendang di Kabupaten Malang. Terletak pada ketinggian 400-700 meter dpl, Singosari beriklim sejuk. Daerah yang lebih tinggi berada di sebelah barat di kaki [Gunung Arjuno](#) dimana sebagian besar wilayahnya diperuntukkan bagi perkebunan ([kopi](#)), kehutanan ([mahoni](#)) dan peternakan ([ayam](#)) sehingga populasi penduduknya jarang.

Meskipun sudah menjadi daerah industri namun budaya agraris masih kental di daerah ini. Hal ini bisa dilihat di pasar Singosari dimana dengan mudah dijumpai toko-toko yang menjual alat-alat pertanian tradisional seperti [cangkul](#), [sabit](#), lempak, bajak sapi dll, begitu juga dengan toko-toko yang menjual pupuk, pestisida dan benih unggul. Khusus untuk hari Senin dan Jumat akan ada pasar hewan dimana para penjualnya (blantik) dapat dikenali dengan mudah karena kebanyakan dari mereka memakai topi [kobi](#). Hasil pertanian yang utama adalah padi disusul dengan palawija dan buah-buahan seperti [duku](#), [mangga](#) dan [sawo](#). Kebanyakan buah-buahan tersebut ditanam secara sporadis di pekarangan rumah atau kebun. Beberapa daerah yang mengandalkan irigasi tadah hujan ditanami tebu selama musim penghujan seperti Dengkol, Watugede,

Baturetno dan Banjar Arum. Selain itu terdapat Balai Inseminasi Buatan di Desa Sumberawan dan Balai Benih Induk Palawija di Desa Songsong.

3. Gambaran Umum Desa Baturetno

a) Kondisi Geografis

Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang terletak di sebelah paling timur kurang lebih 6 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Singosari atau terletak sebelah utara dari pusat pemerintahan Kabupaten atau Kota Malang, dengan ketinggian rata-rata 487 m diatas permukaan air laut dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara :Desa Sidodadi Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Selatan :Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Timur :Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Barat :Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Wilayah Desa Baturetno seluas kurang lebih 541.643 Ha yang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Singosari yang cukup besar dan sangat berpotensi, dimana Desa Baturetno merupakan suatu wilayah yang strategis untuk jenis pertanian. Jenis pertanian tersebut meliputi tanaman padi, jagung, tebu, dan palawija baik untuk lahan kering (tegalan) dan lahan basah (persawahan). Desa Baturetno terbagi menjadi 4 terbagi menjadi 4 pendukuhan (Dusun) yaitu yaitu Dukuh Benel, Dukuh Nampes, Dukuh Pakel, dan , Dukuh Pakel, dan Dukuh Lowokjati yang terdiri dari 4 RW Dukuh Lowokjati yang terdiri dari 4

RW dan Dukuh Lowokjati yang terdiri dari 4 RW dan 34 Dukuh Lowokjati yang terdiri dari 4 RW (rukun warga) dan 34 RT (rukun tetangga).

Tabel 4

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Baturetno

| No | Sumber Daya Alam | Luas |
|----|-------------------------------|------------|
| 1 | Sawah irigasi teknis | - Ha |
| 2 | Sawah irigasi setengah teknis | 30 Ha |
| 3 | Sawah tadah hujan | - Ha |
| 4 | Tegal/ladang | 350.400 Ha |
| 5 | Pemukiman penduduk | 9,8 Ha |
| 6 | Tanah makan/kuburan | 1,21 Ha |
| 7 | Jalan | 1,2 Ha |
| 8 | Lahan kering lainnya | 25.582 Ha |
| 9 | Hutan negara | - Ha |
| 10 | Tanah lapangan | 1,5 Ha |
| 11 | Tanah kas desa | 11.375 Ha |

Sumber: profil Desa Baturetno, 2011

b) Kondisi Demografi

Penduduk Desa Baturetno setiap tahun mengalami mobilitas penduduk yang cukup padat, baik itu penduduk yang lahir, meninggal maupun penduduk yang pindah datang dan pindah keluar. Hal ini sangat nampak bahwa penduduk Desa Baturetno pada akhir tahun 2011 berjumlah 7.206 jiwa dan pada akhir 2014 berjumlah 7.288 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.175 jiwa/km.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Baturetno dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Baturetno

| No | Pekerjaan | Jumlah |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | Petani | 935 orang |
| 2 | Buruh tani | 597 orang |
| 3 | Buruh swasta | 585 orang |
| 4 | PNS | 23 orang |
| 5 | ABRI | 19 orang |
| 6 | Pensiunan | 20 orang |
| 7 | Industri kecil | 9 orang |
| 8 | Industri rumah tangga | 23 orang |
| 9 | Pertukangan | 57 orang |
| 10 | Perdagangan | 251 orang |
| 11 | Jasa angkutan | 65 orang |
| 12 | Bidan | 1 orang |
| 13 | Lainnya | 2.489 orang |

Sumber: Profil Desa Baturetno, 2011

4. Gambaran Umum Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang

Gambar 6

Badan Perumahan Kabupaten Malang



Sumber: Dokumen pribadi diambil pada tanggal 03 Agustus 2015

a). Tupoksi dan Struktur Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten**Malang**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang nomor 36 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang, maka Kantor Perumahan Kabupaten Malang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut :

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perumahan :**Tugas pokok adalah :**

Melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang perumahan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi adalah :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis bidang Perumahan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perumahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
6. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan;
7. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Perumahan;

8. Penetapan kebijakan, strategi dan program di bidang perumahan;
9. Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi teknis bidang perumahan;
11. Pemberdayaan pelaku bidang perumahan;
12. Pemberian fasilitas bantuan pembangunan bidang perumahan;
13. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang perumahan;

b. Struktur Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang

Kantor Perumahan Kabupaten Malang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 nomor 1/D, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang.

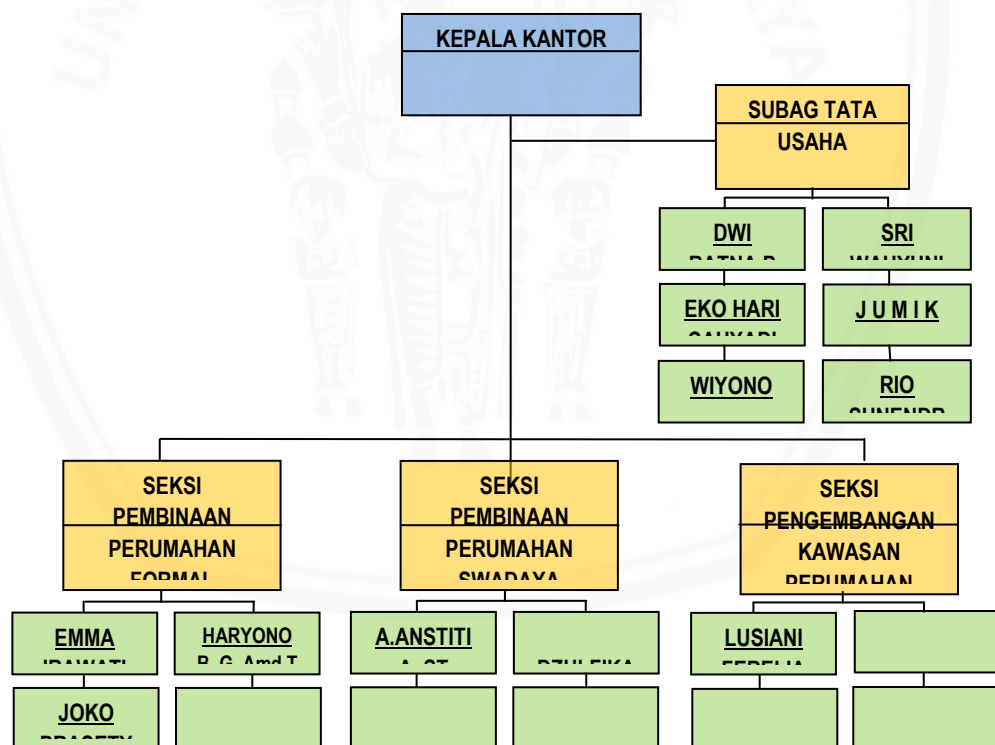
Adapun Susunan Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Perumahan
- b. Ka. Sub. Bag. Tata Usaha
- c. Seksi Pembinaan Perumahan Formal
- d. Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya
- e. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 2 | IV | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 3 | STAF | - | 6 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - |
| 4 | Tenaga Kontrak | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| JUMLAH | | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 10 | 2 |
| | | 17 | | | | 17 | | | | | |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2015

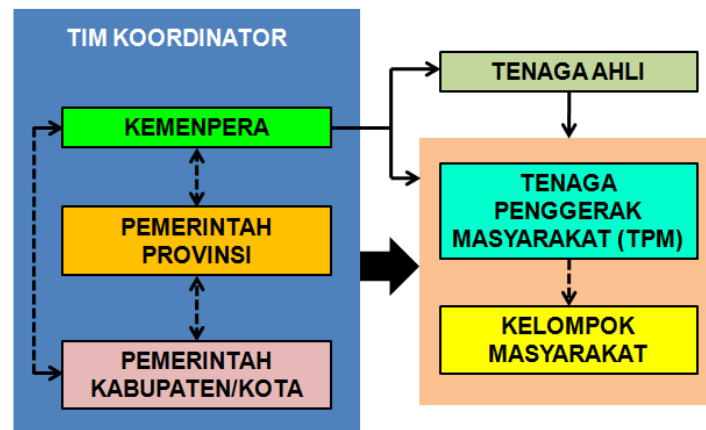
Gambar 7
Susunan Organisasi Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang



Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2015

c). **Tim Koordinasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan**

Gambar 8
Koordinasi Tim Pelaksana Program PLP2K-BK



Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

1. Tugas Tim Teknis (Kementerian Perumahan Rakyat)

Tugas Tim Teknis (Kemenpera) dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan antara lain:

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.
- b. Mengirimkan permintaan TPM kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai anggota Tim Pelaksana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan serta memfasilitasi kegiatan penyusunan dan pembangunan PSU yang merupakan rangkaian

kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan, baik yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota maupun TPM.

2. Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota

Tugas pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan antara lain:

- a. Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.
- b. Menetapkan dan melatih Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM).
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun CAP.
- d. Melakukan kunjungan lapangan bersama dengan Tim Teknis, Tenaga Ahli dan TPM.
- e. Mengalokasikan APBD untuk mendukung rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan, khususnya dalam rangka keberlanjutan, sesuai dengan indikasi program dalam perencanaan dan CAP.

- f. Berperan aktif untuk mendukung kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.
- g. Memfasilitasi dan mengawasi rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (rencana, CAP dan pembangunan PSU).
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan baik yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota maupun TPM.
- i. Menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.

3. Tugas Pemerintah Provinsi

Tugas pemerintah provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan antara lain:

- a. Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.
- b. Melakukan kunjungan lapangan bersama dengan Tim Teknis, Tenaga Ahli dan TPM.
- c. Berperan aktif untuk mendukung kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.

- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (rencana, CAP dan pembangunan PSU) baik yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota maupun TPM.
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keberlanjutan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan, sesuai dengan indikasi program dalam perencanaan dan CAP.

B. Penyajian Data

1. Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang pelaksanaanya dilakukan menggunakan pendekatan tridaya:

a. Daya Pengembangan Aspek Sosial Kemasyarakatan

1) Penyiapan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM)

Dalam menjalankan, mengawasi dan menjamin terlaksananya program PLP2K-BK ini pemerintah desa akan membentuk panitia khusus melalui tenaga penggerak masyarakat (TPM). Masyarakat sebagai penerima program telah siap menjamin ketersediaan lahan, hal ini terjadi karena program ini berlokasi di jalur sirkulasi yang telah tersedia (tidak perlu pembebasan lahan). Tim Penggerak Masyarakat (TPM) merupakan salah satu unsur penting dalam proses awal hingga akhir dalam

pelaksanaan PLB2K-BK ini. TPM sendiri merupakan tim sukarela yang mempunyai tugas-tugas pokok dalam membina dan mendampingi masyarakat Desa Baturetno. Pemilihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dilakukan oleh masyarakat setempat. TPM berasal dari masyarakat yang dipercaya dan dijadikan panutan oleh masyarakat, berdedikasi tinggi, bisa berkomunikasi dengan baik, dan punya kemauan serta pekerja keras. TPM diharapkan memiliki latar belakang minimal Sarjana S1 (Strata Satu). Setelah dilakukan pemilihan, pemerintah kabupaten/kota menetapkan 2 (dua) orang TPM pada setiap lokasi berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat. Diharapkan salah satu anggota TPM adalah wanita. Petugas TPM Desa Baturetno yang terpilih berjumlah 6 orang yakni Ibu Maslina merupakan seorang bidan di Desa Baturetno dan Bapak Suseno merupakan pensiunan PNS. Mereka berdua harus ikut terlibat dari awal hingga akhir pelaksanaan program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan. Adapun tugas TPM adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan.
- 2) Membantu mensosialisasikan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan kepada masyarakat.

- 3) Melaksanakan Survey Kampung Sendiri (SKS) bersama-sama dengan masyarakat.
- 4) Melaksanakan rembug warga.
- 5) Membantu masyarakat dalam penyusunan CAP.
- 6) Mendukung dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penataan lingkungan permukiman mereka sesuai dengan arahan dan rekomendasi Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan, CAP serta sesuai dengan kebutuhan lainnya di masing-masing lokasi.

Tabel 7
Pembentukan Tim Penggerak Masyarakat

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------------|------------|
| 1 | Suseno budiaharjo S.pd | Ketua |
| 2 | Maslina Puji A.Md | Sekretaris |
| 3 | Rudy Anggono | Anggota |
| 4 | Fahmi Khomsa, SE | Anggota |
| 5 | Arief Budiman | Anggota |
| 6 | Samsul Hadi | Anggota |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

“Tim Penggerak Masyarakat (TPM) ini sendiri sendiri fungsinya cukup besar mbak terutama dalam proses sosialisasi karena kan TPM ini berasal dari daerah itu sendiri bukan dari orang kami. Jadi bisa dengan mudah diterima dan dan berinteraksi lebih sering dengan semua masyarakat Desa Baturetno khususnya saat-saat proses sosialisasi dan proses *Community Action Plan* (CAP) yang cukup memerlukan waktu karena dalam proses tersebut semua

masyarakat diharapkan mampu merencanakan dan mengutarakan keinginan dalam pembangunan desannya. Selain itu pihak Badan Perumahan sendiri tidak bisa secara terus menerus berada di lokasi sehingga peran TPM pun cukup besar mbak dengan melakukan servey kampung sendiri juga.”(wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, pukul 09.00 WIB).

Selama masa kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan, TPM akan bertanggung jawab dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat agar dapat mendukung proses penanganan lingkungan permukiman kumuh di lokasi tempat tinggal mereka, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan stimulan fisik, maupun tahap pengawasan dan pengendalian. Selama masa tugasnya, TPM akan bertanggung jawab terhadap Tim Koordinator.

“Fase ini merupakan penjabaran poin pertama dalam konsep tridaya yaitu pengembangan aspek kemasyarakatan yang kami fokuskan untuk peran aktif warga. Tapi tujuan kami membentuk TPM ini tidak hanya berlangsung untuk jangka pendek saja mbk, kami berharap TPM ini merupakan tim yang selanjutnya akan terus berperan yang sama untuk program-program pemerintah maupun swasta selanjutnya. Karena program ini kan merupakan stimulan untuk program-program pembangunan lainnya. Jadi kami meminta pada TPM untuk tidak langsung lepas tangan setelah program ini selesai tetapi terus memantau dan menjadi media penghubung antara masyarakat Desa Baturetno dan pemerintah daerah khususnya. Setiap saat kami (pihak Pemkab) selama jangka waktu 5 tahun terus memonitor dengan berkomunikasi dengan TPM dan pihak kelurahan untuk memberikan perkembangan pembangunan dan masalah di daerah mereka maupun untuk mengevaluasi kekurangan dari program ini.”(wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, pukul 09.10 WIB).

Siklus ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan berjalan terarah dan bertahap serta

tetap berada dalam koridor yang sudah digariskan. Sejak sosialisasi awal telah terjadi proses yang cukup melelahkan, karena masyarakat cenderung belum terbiasa dengan kondisi atau proses pelaksanaan program PLP2K-BK ini. Akan tetapi dengan berbagai upaya yang dilakukan salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya rembug atau pertemuan warga untuk menggali informasi serta menanamkan kepada masyarakat bahwa program ini bersifat *bottom-up*. Pada akhirnya masyarakat akan bisa menerima dan menjalankan program ini dengan antusias. Walaupun belum terlibat secara langsung akan tetapi minimal sudah muncul kepedulian serta solidaritas warga Desa Baturetno.

2). Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/ *Community Action Plan* (CAP)

Tujuan pelaksanaan penyusunan RTK/CAP adalah agar masyarakat dapat secara mandiri merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka, serta memiliki kesadaran untuk memeliharanya secara terus menerus. Selain itu, pemerintah daerah setempat, terutama tingkat kota/kabupaten sampai dengan kelurahan/desa juga dapat memberikan dorongan dalam penciptaan lingkungan permukiman yang layak huni.

“Untuk kegiatan CAP ini sendiri mbak difokuskan sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yaitu pembentukan TPM dimana tujuannya untuk lebih menggali lebih dalam potensi masyarakat secara mandiri dan aktif dalam upaya peningkatan penanganan sosial kemasyarakatan penduduk desa Baturetno. Sehingga sedikit demi sedikit masyarakat akan menuju ke arah masyarakat madani.” (wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan

Perumahan, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, pukul 09.15 WIB).

Substansi RTK/CAP harus merupakan hasil sinergisasi antara arahan-arahan makro rencana rinci dengan hasil rembug warga. Dalam hal ini, CAP akan berisikan antara lain tentang rincian kegiatan, bentuk-bentuk penanganan, penanggungjawab kegiatan, waktu pelaksanaan, sumber pembiayaan kegiatan, dan lain-lain. Pada Tahun Anggaran 2011 ini, proses penyusunan RTK/CAP difasilitasi oleh Tim Teknis, Tenaga Ahli dan masyarakat, yang didampingi oleh TPM. Keluaran dari penyusunan RTK/CAP ini adalah indikasi program selama 5 (lima) tahun.

1) Pertemuan Pemda dan Masyarakat/*Community Action Plan* (CAP)

Tahap I

Kegiatan *Community Action Plan* (CAP) merupakan kegiatan musyawarah antara pihak pemda dan masyarakat guna untuk melakukan beberapa kegiatan sebelum pelaksanaan di lapangan. Kegiatan ini ditujukan untuk sosialisasi program, survey kampung sendiri, rembug warga I dengan pembahasan utama adalah sosialisasi program dan pembahasan potensi dan permasalahan di permukiman masyarakat, dan yang terakhir rembug warga II yang membahas pemilihan prioritas program yang dibutuhkan dikawasan perencanaan di kelurahan Baturetno. Serta membahas konsep-konsep penanganan masalah yang telah disusun.

Setelah dilakukan pembahasan potensi dan masalah, kemudian dilakukan pembahasan rumusan program yang diperoleh dari kajian usulan masyarakat. Kegiatan ini adalah untuk menentukan skala prioritas program yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam proses ini peserta memberi masukan atau rekomendasi terhadap prioritas yang diusulkan.

Community Action Plan atau rembug warga tahap I diselenggarakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2011, pukul b 19.30-23.00 WIB yang bertempat di rumah Bapak Sutrisno yang merupakan kepala RW/06 di Kelurahan Baturetno. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK dan sekaligus untuk menjaring aspirasi dari masyarakat mengenai potensi dan masalah di lingkungan RW/06 dan RW/05 yang merupakan kawasan perencanaan untuk kegiatan PLP2K-BK di Kabupaten Malang. Berikut pernyataan dari staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.

“Cara kami memberikan informasi kepada masyarakat melalui langsung mendatangi satu persatu rumah yang sebelumnya kami sudah bekerjasama dengan Tim Penggerak Masyarakat (TPM) yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Badan perumahan Rakyat dan biasanya TPM sendiri diwakili oleh masyarakat sekitar yg minimum mempunyai latar belakan pendidikan setingkat perguruan tinggi”. (wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, pukul 09.15 WIB).

Gambar 9
Kegiatan CAP (*Community Action Plan*)/ RTK



Sumber: Dokumentasi Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan Community Action Plan (CAP) I adalah sebagai berikut:

1. Tersosialisasikannya kegiatan atau program PLP2K-BK kepada masyarakat yang berada di kawasan perencanaan.
2. Tergalinya aspirasi dari masyarakat mengenai potensi dan masalah di kawasan perencanaan.

Potensi dan masalah yang dihasilkan dari aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Aspirasi Masyarakat Dalam Kegiatan Rembug Warga I di Kawasan
Perencanaan

| Aspek | Masalah |
|---------|---|
| Fisik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampah belum dikelola dengan baik karena tidak ada tempat pembuangan sampah 2. Kondisi rumah yang kurang layak dan masih banyak yang menyatu dengan kandang ternak. 3. Jalan lingkungan sebagian besar masih berupa jalan tanah dan makadam serta pola tidak konsisten. 4. Masih minimnya MCK, sehingga sungai menjadi media pembuangan 5. Kurangnya lahan terbuka (RTH) dan sempadan sungai. 6. Belum adanya pembuangan kotoran ternak 7. Minimnya penerangan jalan umum 8. Saluran drainase perlu perbaikan |
| Ekonomi | Terbatasnya lahan usaha (jalan yang menghubungkan tempat kerja dengan jalan utama) |
| Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya dana untuk membangun pos kamling 2. Belum adanya balai untuk pertemuan warga |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

2) Pertemuan Pemda dan Masyarakat/ *Community Action Plan* (CAP)

Tahap II

Community Action Plan atau rembug warga tahap II diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2011, pukul 19.30-23.00 WIB yang bertempat di rumah Bapak Sutrisno yang merupakan kepala RW/06 di Kelurahan Baturetno. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan program yang akan diprioritaskan untuk langsung ditangani yang berasal dari analisis masalah-masalah dan berbagai masukan dari masyarakat yang sebelumnya sudah dibahas dalam rembug warga I. Program yang diusulkan masyarakat dan hasil analisa lapangan lebih kepada penyediaan pembangunan sarana umum (PSU) dasar. Kebutuhan infrastruktur ini menjadi awal untuk berjalannya kegiatan sosial antar masyarakat, sebagai media peningkatan ekonomi (penghubung kebun tebu ke jalan utama) dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan yang layak dan sehat. Pengelolaan program ini dilakukan oleh pihak kelurahan, mengingat belum terbentuknya organisasi swadaya di daerah ini.

Hasil kesepakatan arahan program ini terdiri dari, peningkatan hubungan sosial sosial (dengan adanya jalan beton/jalan lingkungan), peningkatan ekonomi (jalan/gang yang menghubungkan tempat kerja/kebun tebu dengan jalan utama), usaha peningkatan kualitas kesehatan (MCK umum, penataan gang/jalan lengkap dengan drainase).

“Rembug warga sendiri tidak bisa hanya dilakukan 1 kali saja mbak karena pada suatu daerah saja sebenarnya tidak hanya ada

satu potensi dan masalah lingkungan saja yang terjadi, tetapi terdapat banyak permasalahan yang belum bisa ditangani khususnya oleh pemerintah daerah sendiri. Nah, peran pentingnya program langsung dari pusat seperti PLP2K-BK ini sangat diharapkan guna memancing banyak program lainnya dari berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Dalam rembug warga II ini masyarakat akan menerima tanggung jawab serta penjabaran akan tugas masing-masing dari pihak-pihak yang terjun langsung ke lapangan, sehingga masyarakat sudah tau antara rencana-rencana apa saja yang akan ditangani langsung maupun rencana yang merupakan rencana jangka panjang dalam program ini” (wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, pukul 09.20 WIB).

Setelah hasil dari CAP dikumpulkan selanjutnya tugas konsultan yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk merancang *Detailed Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci atau *master plan* rencana pengembangan kawasan wilayah Desa Baturetno selama jangka waktu 5 tahun dari 2011-2015. Untuk selanjutnya dilakukan pelaksanaan stimulan lanjutan fisik maupun non-fisik berdasarkan prioritas utama permasalahan di wilayah Baturetno.

Berdasarkan data di lapangan dan setelah proses *Community Action Plan* (CAP) maka dapat dapat dijabarkan isu-isu penataan kawasan yang menjadi permasalahan utama di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah yang belum memadai (belum ada pengelolaan sampah komunal)
2. Kondisi rumah yang kurang layak dan masih banyak yang menyatu dengan kandang ternak

3. Jalan lingkungan sebagian besar masih berupa jalan tanah dan makadam serta mempunyai pola yang tidak konsisten
4. Kurangnya ruang publik (RTH)

Isu-isu yang didapat dari hasil CAP tersebut merupakan rangkuman permasalahan lingkungan di Desa Baturetno. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan:

”Selama proses CAP yang dilakukakan sebanyak dua kali mendapatkan cukup banyak sekali permasalahan kawasan yang kami tampung dari masyarakat Desa Baturetno. Dari sekian banyak permasalahan tersebut kami fokuskan lagi menjadi beberapa isu pokok yang menjadi garis besar permasalahan di Desa Baturetno. Namun dikarenakan kebijakan dari pusat yakni Kementrian Perumahan Rakyat yang menyediakan dana, jadi kami tidak dapat memasukkan semua permasalahan tersebut untuk langsung ditangani. Dananya sendiri masih sangat terbatas dan kami berupaya agar tiap daerah rata, tidak berfokus pada satu daerah saja.” (wawancara dengan IS Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, pukul 09.25 WIB).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua permasalahan langsung ditangani oleh pemerintah pusat dan penyediaan dana juga menjadi salah satu permasalahan. Dilihat dari tujuan program ini sendiri adalah program stimulan atau program yang dapat memotivasi baik dari masyarakat, para pemerintah daerah, Dinas setempat lembaga lain bahkan pihak swasta untuk turut serta dalam pembangunan secara berkelanjutan dengan meneruskan rencana kegiatan yang sudah dirancang melalui program PLP2K-BK.

“Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang sendiri sudah berupaya untuk pemeratakan pembangunan di wilayah kabupaten Malang. Sehingga tiap tahun kami dapat membuat *master plan* pembangunan di daerah terpilih serta melakukan pembangunan langsung dengan menyesuaikan dana yang tersedia. Untuk pembangunan langsung di

Desa Baturetno yang dapat dilakukan oleh kami yaitu pembangunan prasarana dan sarana umum, serta perlindungan ruang terbuka hijau (RTH)” (wawancara dengan dari IS Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, pukul 09.30 WIB).

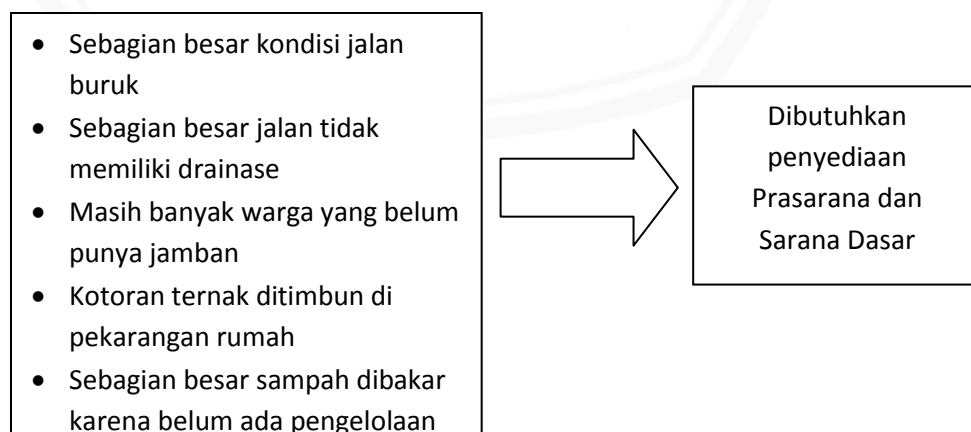
Setelah tercapainya prioritas pembangunan yang akan langsung ditangani oleh Badan Perumahan Pakyat Kabupaten Malang. Maka selanjutnya tim beserta masyarakat akan langsung bergerak untuk mempersiapkan proses pembangunan. Selain itu juga akan membuat rencana pengembangan yang menjadi program berkelanjutan dari PLP2K-BK.

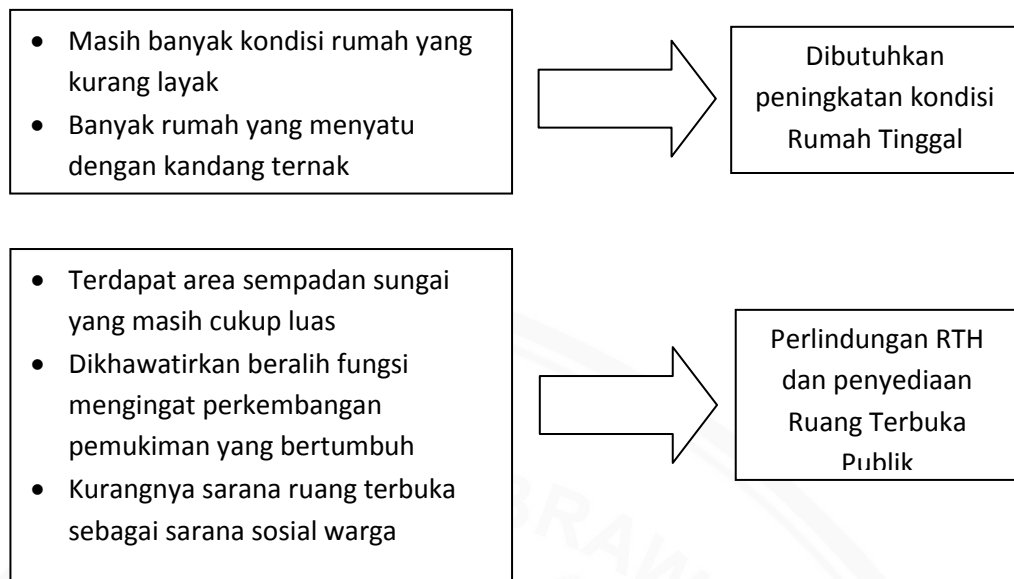
“Hasil dari CAP ini sendiri adalah untuk menentukan prioritas utama apa yang sangat diperlukan sebagai stimulan awal penanganan mbak, tapi selanjutnya bisa di kembangkan lagi mbak sebagai analisis untuk membuat rencana pengembangan dalam penanganan kawasan untuk jangka panjangnya, dalam rencana PLP2K-BK ini sendiri menggunakan rencana pengembangan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.” (wawancara dengan IS Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, pukul 09.35 WIB).

Berdasarkan isu-isu penataan kawasan tersebut, isu pokok yang menjadi dasar penataan kawasan di Desa Baturetno terdapat 3 poin pada gambar dibawah:

Gambar 10

Isu Pokok Penataan Kawasan di Desa Baturetno





Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

b. Daya Pengembangan Aspek Lingkungan

1). Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

Pembangunan infrastruktur adalah bagian yang penting dari pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik

1. Sistem sirkulasi dan jaringan jalan

Kondisi jaringan jalan di Desa Baturetno dapat dikatakan buruk karena sebagian besar jalan masih rusak dan sebagian besar masih berupa jalan tanah dan makadam. Berikut merupakan rincian jaringan jalan di Desa Baturetno:

- a) 65,5% panjang jalan desa rusak (5.475 m)
- b) 43,2% jalan desa berupa makadam (3.610 m) dan 21,2% jalan desa berupa jalan tanah (1.775 m)

c) 33% jalan kabupaten rusak (kurang lebih 2km)

Peningkatan jalan lingkungan belum dapat dilakukan warga dengan swadaya dikarenakan kemampuan ekonomi warga yang kebanyakan berpenghasilan menengah ke bawah. Diperlukan pengerasan jalan dengan biaya pemeliharaan yang minimal misalnya: rabat beton. Perkembangan permukiman yang sporadis juga mengakibatkan pola jaringan jalan di lingkungan tersebut kurang teratur dan terdapat banyak jalan lingkungan/ gang buntu dengan membentuk pola tulang ikan. Diperlukan pembangunan jalan yang menghubungkan antar blok untuk mempermudah aksesibilitas warga.

“Jalan masuk-masuk gang di desa kami ini sebenarnya cukup lebar mbak tapi kebanyakan masih berupa tanah liat tanpa got jadi sering becek kalau hujan. Sebenarnya pembangunan jalan inilah yang paling utama dibutuhkan soalnya setiap hari kami lewati untuk mengangkut segala macam pakan ternak maupun ternak kami mbak. Jadi kami sangat terbantu setelah adanya banyak perbaikan jalan di desa kami” (wawancara dengan salah satu warga Desa Baturetno, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB).

Jalan utama yang melintasi desa kondisinya cukup baik dengan perkerasan aspal walaupun sering dilalui truk pengangkut tebu dan terdapat drainase di satu sisi jalan. Jalan tersebut merupakan jalan poros utama desa dan perlu ditambah penghijauan dengan tanaman untuk mempercantik wajah desa. Selain itu masih kurangnya penerangan jalan umum dan fasilitas pejalan kaki sehingga perlu ditambah penerangan jalan umum dan trotoar. Pada jalan tersebut juga

belum terdapat penanda kawasan yang dapat dibuat gapura yang estetik sebagai penanda kawasan di jalan masuk desa.

Konsep sirkulasi dan jaringan jalan adalah dengan melakukan perbaikan jalan-jalan lingkungan yang sebagian besar masih berupa jalan tanah. Perbaikan jalan dengan rabat beton untuk menekan biaya pemeliharaan dari masyarakat yang sebagian besar masih merupakan keluarga prasejahtera. Perbaikan jalan lingkungan juga dilengkapi dengan penerangan jalan lingkungan. Sedangkan peningkatan kualitas jalan utama yaitu dengan melengkapi jalan utama dengan trotoar, penerangan jalan, dan tanaman pengarah, serta menyediakan gapura pada pintu masuk kawasan.

“Fokus utama dari permasalahan di Desa Baturetno adalah jaringan jalan yang sangat perlu untuk dibangun. Dimana akses jalan cukup berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi warga. Setiap hari baik sepeda motor, mobil pickup dan truk berlalu lalang untuk mengangkut hasil usaha warga desa mbak. Kalau akses jalannya buruk otomatis pengiriman apapun akan terganggu atau lambat jadi imbasnya ke pendapatan warga.” (wawancara dengan staf kantor Desa, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, pukul 10.15 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa jaringan jalan Desa Baturetno sangat mempengaruhi mobilitas warga yang mencakup akses keluar masuk Desa, mengingat cukup banyak angkutan yang berfungsi sebagai sarana mengangkut hasil pertanian, peternakan maupun usaha kecil warga, sehingga secara langsung akan mempengaruhi kegiatan ekonomi warga. Oleh karena itu pembangunan jaringan jalan menjadi salah satu prioritas.

Gambar 11
Kondisi Jalan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PLP2K-BK



Sumber: Dokumentasi Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

2. Sistem drainase

Drainase merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Irigasi dan drainase merupakan bagian penting dalam penataan sistem penyediaan air di bidang pertanian maupun tata ruang. Saluran drainase permukaan biasanya berupa parit, sementara untuk bawah tanah disebut gorong-gorong.

“Untuk pembangunan sistem drainase di Desa Baturetno ini sendiri digunakan untuk mengalirkan resapan air hujan dalam lingkungan

warga menuju ke badan sungai yang terdekat. Sehingga lingkungan lebih rapi dan tidak becek serta banjir lagi. Hampir semua warga sudah banyak merasakan manfaat dari pembangunan drainase ini, ini sangat membantu untuk menunjang akses pembangunan jalan dan desa menjadi lebih indah tidak terkesan kumuh.” (wawancara dengan staff Kantor Desa pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, pukul 10.20 WIB).

Konsep peningkatan sistem drainase adalah dengan penambahan saluran drainase di jalan lingkungan dan di daerah pekarangan warga. Secara umum permasalahan genangan di kawasan desa baturetno hanya pada jaringan jalan lingkungan yang belum mempunyai drainase dan pekarangan warga yang tergenang karena tidak terhubung dengan saluran drainase.

Gambar 12

Kondisi Drainase Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PLP2K-BK



Sumber: Dokumentasi Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

3. Sistem air bersih, Persampahan, sanitasi dan limbah

Sistem air bersih di desa Baturetno yang mengandalkan jaringan perpipaan dari PAM swadaya sudah berjalan dengan baik, hanya tinggal melakukan upaya pemeliharaan. Sedangkan konsep untuk penanganan sampah adalah dengan penyediaan sistem persampahan

komunal 3R dengan penyediaan TPS, tong-tong sampah, dan peralatan daur ulang sampah yang didukung oleh pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Diharapkan nilai tambah dari pengelolaan sampah dan limbah ternak menjadi pupuk organik sehingga dapat menambah penghasilan warga.

Sistem sanitasi dan limbah masih belum sepenuhnya sehat karena masih terdapat warga yang belum punya jamban dan ketersediaan MCK komunal masih terbilang kurang. Selain itu juga masih terdapat warga yang belum mempunyai septic tank. Oleh karena itu diperlukan pengadaan MCK dan septic tank komunal

Gambar 13
Kondisi MCK Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PLP2K-BK



Sumber: Dokumentasi Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2012

2). Peningkatan Kondisi Rumah Tinggal

Kecenderungan pertumbuhan bangunan di desa Baturetno semakin padat dan tidak teratur karena mengikuti pola pembagian kavling warisan di pekarangan rumah lama. Perlu dilakukan pengaturan intensitas bangunan dan jarak antar bangunan, terutama pada bangunan yang memakai bilik, untuk mengantisipasi akan

terjadinya bahaya kebakaran. Pada beberapa bagian kawasan, intensitas tidak terlalu rendah dan dimanfaatkan warga untuk pembuatan batu bata

Terdapat rumah kurang layak huni sebanyak sekitar 22 unit. Dinding rumah pada umumnya terbuat dari bilik bambu dan langsung menempel ke tanah tanpa ditopang oleh beton sehingga menyebabkan bilik bawah mudah rusak terkena air. Selain itu lantai rumah juga masih berupa lantai tanah. Struktur rumah juga kurang aman dari bencana kebakaran, gempa bumi maupun angin puting beliung.

“Dalam upaya perbaikan rumah warga ini program PLP2K-BK hanya mampu memberikan stimulan saja, berupa pemetaan fisik serta konsep penataan rumah dan belum mampu untuk menuntaskan pembangunan rumah tidak layak karena keterbatasan dana mbak. Jadi fokus kami untuk mengajak peran serta dari lembaga-lembaga lain khususnya dari kementerian lain maupun pemerintah daerah maupun swasta.”(wawancara dengan TL staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB).

Selain itu masih banyak rumah yang menyatu dengan dengan kandang sapi. Secara sanitasi menjadi kurang sehat karena kotoran sapi kerap ditumpuk di kandang atau pekarangan dan udara menjadi bau. Beternak sapi sendiri merupakan pendapatan tambahan yang diandalkan warga. Perlu disediakan sarana kandang bersama yang terpisah dari rumah tinggal dengan mempertimbangkan keamanan ternak. Kondisi ekonomi menyebabkan ketidakmampuan warga dalam meningkatkan kondisi rumah tinggalnya. Berdasarkan analisis prioritas rumah tidak layak huni yang sudah dilakukan maka perlu

peningkatan kualitas bangunan rumah warga sebanyak 22 unit yang diprioritaskan untuk program PLP2K-BK ini. Selain itu juga perlu peningkatan kualitas sanitasi dengan menyediakan lebih banyak MCK umum dan pemisahan kandang ternak dari rumah ke kandang komunal.

Tabel 9

Daftar Rumah Tidak Layak Huni di Desa Baturetno

| No | Nama | Pekerjaan | Tidak layak | Sangat tidak layak |
|----|----------|--------------|-------------|--------------------|
| 1 | Mahmud | Buruh tani | ✓ | |
| 2 | Sujiran | Buruh tani | | ✓ |
| 3 | Sujianto | Buruk pabrik | ✓ | |
| 4 | Tomo | Buruh tani | ✓ | |
| 5 | Ngadiman | Pedagang | ✓ | |
| 6 | Darmuji | Petani | ✓ | |
| 7 | Slamet | Buruh tani | | ✓ |
| 8 | Misran | Petani | ✓ | |
| 9 | Mulyanto | Petani | ✓ | |
| 10 | Muklis | Buruh pabrik | | ✓ |
| 11 | Bambang | Petani | ✓ | |
| 12 | Sunardi | Buruh pabrik | ✓ | |
| 13 | Kariman | Pedagang | | ✓ |
| 14 | Murtadji | Buruh tani | | ✓ |
| 15 | Seno | Buruh tani | ✓ | |
| 16 | Jatmiko | Buruh pabrik | ✓ | |
| 17 | Ngatemin | Pedagang | | ✓ |
| 18 | Sarwo | Petani | ✓ | |
| 19 | Jasuli | Petani | ✓ | |
| 20 | Suwardi | Buruh Pabrik | | ✓ |
| 21 | Murtaji | Buruh tani | ✓ | |
| 22 | Kardi | Buruh tani | ✓ | |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

Sesuai dengan data diatas jumlah rumah tidak layak huni maupun yang sangat tidak layak huni termasuk cukup banyak, tetapi program

PLP2K-BK ini tidak dapat menangani langsung dalam penyediaan dana alam pembangunan rumah-rumah tidak layak huni warga. Akan tetapi melalui program PLP2K-BK ini sudah membawa dampak yg cukup baik dalam upaya menstimulan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dapat terlihat dari jumlah rumah yang berhasil diperbaiki dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dimana program PLP2K-BK mulai dilaksanakan di Desa Baturetno. Sebanyak 22 rumah sudah melalui perbaikan dan renovasi total, bantuan tersebut berasal dari program-program lain yang di selenggarakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Selain itu ada juga adanya program berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Pusat melalui ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang tiap tahunnya memberikan dana khusus untuk menjalankan rencana-rencana pembangunan dari program PLP2K-BK. Serta program bedah rumah dari TNI berupa renovasi rumah tidak layak huni.

“Untuk program perbaikan rumah tinggal walaupun tidak menggunakan dana langsung dari PLP2K-BK, dapat dikatakan baik dan sesuai target sejauh ini mbak karena ada pihak dan instansi lain baik pemerintah maupun non pemerintah yg sangat membantu proses perbaikan rumah. Meskipun ada beberapa yg membuat program baru, namun tetap mereka berpedoman pada program PLP2K-BK dimana mereka tetap menggunakan poin-poin perencanaan yg ada dalam program PLP2K-BK.”(wawancara dengan TL staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.05 WIB).

Gambar 14**Kondisi Rumah Tinggal Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PLP2K-BK**

Sumber: Dokumentasi Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2012

3). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka publik cukup penting dalam penataan maupun pembangunan suatu wilayah, dikarenakan fungsi dari RTH sendiri sebagai sarana interaksi warga, menambah keindahan, rekreasi dan tempat bermain guna meningkatkan rasa kenyamanan masyarakat Desa Baturetno. Berdasarkan data lapangan di Desa Baturetno, keberadaan ruang terbuka hijau utama pada areal pekarangan dengan hamparan yang cukup luas di sebelah timur kawasan yang membentuk sempadan sungai, sempadan sungai sendiri merupakan garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan atau pagar. Keberadaan sempadan sungai tersebut terancam beralih fungsi menjadi lahan permukiman warga, mengingat kecenderungan pertumbuhan lahan permukiman mengarah ke sisi dalam jalan. Sehingga perlu ditetapkan menjadi kawasan lindung sempadan sungai untuk melindungi keberadaannya. Upaya pelestarian dapat juga sejalan dengan pendayagunaan potensi ekonomi, misalnya dengan penanaman tanaman keras yang produktif di kawasan sempadan sungai.

Sedangkan untuk ruang terbuka publik di tengah kawasan permukiman hanya berupa lapangan voli 1 unit. Selebihnya merupakan RTH privat berupa lahan pekarangan warga yang masih cukup luas, namun kurang dimanfaatkan sehingga terlihat gersang dan tidak terawat. Lahan pekarangan warga perlu dihijaukan untuk memperbaiki iklim mikro sehingga berfungsi sebagai RTH privat. Lahan pekarangan warga juga dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat dan tanaman produktif lainnya. Secara umum ketersediaan RTH di kawasan perencanaan masih belum memadai terutama untuk penyediaan ruang terbuka di tengah-tengah lingkungan untuk ruang olahraga, tempat bermain anak dan tempat berkumpul komunitas.

Konsep penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka di Desa Baturetno antara lain:

1. Pelestarian sempadan sungai yang dilakukan secara jangka pendek adalah melakukan pemugaran batas sempadan sungai dan pemasangan papan peringatan dilarang mendirikan bangunan dan menebang pohon. Sedangkan upaya jangka panjang adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat termasuk anak-anak dan remaja mengenal pentingnya melestarikan sempadan sungai sebagai perwujudan cinta dan peduli terhadap lingkungan
2. Penghijauan pekarangan dengan tanaman produktif dan tanaman obat
3. Penanaman tanaman pengarah di jalan utama desa
4. Penyediaan ruang terbuka publik di tengah-tengah permukiman

5. Pembatasan alih fungsi lahan pada lahan pertanian dan perkebunan

“Dalam upaya perencanaan pengembangan RTH ini kami awali dengan kegiatan sosialisasi mbak karena sebenarnya ketersediaan lahan RTH di desa baturetno melimpah namun berupa RTH privat. Dikarenakan keterbatasan dana, jadi kami lebih mengupayakan pendekatan secara personal untuk pengajak warga untuk memanfaatkan RTH privat secara optimal dengan menanam tanaman obat dan tanaman produktif lainnya, untuk RTH publik berupa taman bermain, sarana berkumpul dll belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang.”(wawancara dengan TL staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.10 WIB).

4). Konsep dan Rencana Pengembangan Wilayah

Dalam pelaksanaan program PLP2K-BK selain pembangunan langsung atau stimulan yang menggunakan dana yang sudah tersedia untuk program ini, poin penting dalam pelaksanaan program ini yaitu pembuatan rencana dan konsep pembangunan wilayah dimana mengacu pada konsep perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuannya untuk menyediakan dan memberikan kesempatan untuk pihak lain baik pemerintah maupun swasta untuk menggabungkan atau bersinergi guna menunjukkan kontribusi dalam pembangunan khususnya ketersediaan dana yang menjadi masalah utama. Sehingga melalui program PLP2K-BK ini semua pihak implementor untuk kegiatan pembangunan dapat terus bekerjasama secara berkesinambungan dan saling membutuhkan mengingat selama ini sudah banyak program pemerintah yang dilaksanakan namun terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya satu konsep yang pembangunan yang sama.

a. Konsep dan Rencana Pengembangan Mikro

Dalam konsep pengembangan mikro sendiri lebih difokuskan pada konsep penanganan perbaikan kawasan (*upgrading*) serta pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan yang bersifat sempit atau jangka pendek :

1. Perbaikan kawasan (*upgrading*)

- a). Peningkatan jaringan jalan dan drainase, dengan perkerasan jalan lingkungan dengan betondan pembngunan drainase. Pembangunan jalan beton dan drainase diharapkan dapat memperpanjang usia jalan sehingga dapat menekan biaya pemeliharaan dari masyarakat
- b). Penyediaan sanitasi sehat dengan penyediaan MCK komunal dan septic tank komunal yang didukung oleh kader-kader lingkungan.
- c). Penyediaan sistem persampahan komunal 3R dengan penyediaan TPS, tong-tong sampah, dan peralatan daur ulang sampah, yang didukung oleh pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- d). Renovasi rumah kurang layak, memperbaiki struktur rumah dan memisahkan kandang hewan dari rumah untuk menciptakan rumah sehat
- e). Penyediaan ruang publik yang terdiri dari taman bermain anak, balai RW, posyandu serta TPA
- f). Penghijauan di pekarangan dengan tanaman produktif dan tanaman obat serta penanaman tanaman di sepanjang jalan utama

2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Berkelanjutan

- a) Pengelolaan dan pemeliharaan kandang komunal

Kandang komunal bertujuan untuk mengelompokkan peternak dan memisahkan kandang sapi dan kandangan memisahkan kandang sapi dan kandang kambing dari rumah. Pengelompokkan peternak akan mempermudah pertukaran ikkan peternak akan mempermudah pertukaran informasi dan menyediakan kandang yang lebih layak. Pemisahan kandang dari rumah akan menciptakan rumah yang lebih sehat.

b). Pelestarian area sempadan sungai

Pelestarian sempadan sungai merupakan upaya untuk mempertahankan ruang hijau yang sekaligus akan melindungi sumber air warga. Upaya pelestarian yang dilakukan secara jangka pendek adalah melakukan pemugaran batas sempadan sungai dan pemasangan papan peringatan dilarang mendirikan bangunan dan menebang pohon. Sedangkan upaya jangka panjang adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat termasuk anak-anak dan remaja mengenai pentingnya melestarika sempadan sungai sebagai perwujudan cinta terhadap lingkungan sekitar.

Dalam konsep pengembangan mikro tetap berpedoman pada hasil *Community Action Plan* (CAP) sebagai acuan konkret terhadap masalah-masalah utama di lingkungan Desa Baturetno. Di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala seksi pengembangan kawasan perumahan mengenai perbedaan konsep pengembangan makro dan mikro:

“Untuk rencana pengembangan secara mikro ini sendiri sebenarnya hampir sama dengan konsep makro, namun untuk konsep mikro ini

lebih kami persempit untuk jangka waktu yang lebih pendek dan lebih bersifat hanya pembangunan fisik saja. Sedangkan untuk konsep makro lebih luas mencakup visi dan misi ke depan.” (wawancara dengan IS Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan pernyataan diatas konsep dan rencana pengembangan mikro ini sendiri merupakan bagian dari konsep pengembangan makro yang lebih diprioritaskan pada aspek pembangunan fisik saja. Namun tetep berdasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan, namun lebih sempit dan dengan jangka waktu yang lebih pendek.

“Dalam perencananya sendiri fokus utama adalah dari segi pembangunan fisik rencana mikro ini sesuai dengan perda, kita amankan betul Singosari mbak jangan sampai ada pembangunan tidak terkendali seperti pertanian. Jangan sampai melebihi zonasi yang ada untuk perumahan. Selain itu jangan sampai terbentuk pemukiman kumuh baru akibat pembangunan yang tidak terkendali.” (wawancara dengan TL staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.20 WIB).

b. Konsep dan Rencana Pengembangan Makro

Berdasarkan dari proses Community Action Plan (CAP) serta analisis fisik, sosial dan ekonomi di desa Baturetno ini kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat adalah sarana dan prasarana dasar, seperti kebutuhan MCK, jalan, drainase, penerangan jalan dan juga perbaikan rumah yang tidak layak huni. Desa ini termasuk kategori kumuh pedesaan, dimana kekumuhan terbentuk karena mereka kebanyakan kaum pendatang (Madura) yang datang menjadi buruh dan tinggal dengan menyewa tanah orang dan sebagian menjadi pemilik lahan tersebut. Keberadaan tegalan (kebun tebu) dan kandang ternak dibelakang

pemukiman/rumah mereka, saat ini masih menjadi sumber penghasilan utama masyarakat tersebut. Sehingga sebagai usaha mengurangi kekumuhan desa ini diperlukan pembangunan jalan lingkungan beserta drainase dan tempat pembuangan/pengolahan limbah.

Desa Baturetno juga memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik. Untuk mengurangi polusi perlu menanam pohon peneduh disepanjang jalan raya dan pekarangan rumah. Hal ini juga memperkuat ruang terbuka hijau yang berada dibelakang pemukiman sebagai pemisah antara zona pemukiman dan tegalan/kebun tebu.

Dari arahan tersebut diperlukan penanganan kawasan dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan Kampung Sehat, Hijau dan Produktif.

- Misi :
1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar
 2. Penghijauan pekarangan dan jalan serta pelestarian sempadan sungai
 3. Mewujudkan perumahan sehat yang layak dari segi konstruksi dan layak huni
 4. Mewujudkan keterpaduan pasarana dan sarana kawasa perumahan secara berkesinambungan dengan menyediakan media ruang publik sebagai wadah interaksi sosial

“Untuk konsep dan rencana pengembangan makro ini bisa disebut juga penanaman visi dan misi untuk Desa Baturetno sehingga dapat menarik sinergi program-program pembangunan lain dari pemerintah maupun dari investor swasta. Sehingga para investor bisa langsung melihat potensi serta melanjutkan rencana pembangunan saja. Jadi tidak perlu melakukan rencana dan analisis dari awal lagi mbak”

(wawancara dengan TL staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.20 WIB).

Konsep penanganan kawasan secara makro adalah perbaikan kawasan (upgrading) serta pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan. Gagasan penanganan adalah menyediakan sarana prasarana lingkungan yang layak serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui pembinaan kelompok ternak di kandang komunal, penghijauan pekarangan dengan tanaman obat dan tanaman produktif serta pelestarian sempadan sungai. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan:

“Kecamatan Singosari dimana Desa Baturetno ini berada sudah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan dimana tertuang di dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan mbak. Penetapan zona perkotaan tersebut bertujuan untuk mengamankan Kecamatan Singosari dari pembangunan yang tidak terkendali disaat pembangunan ekonomi meningkat.”(wawancara dengan TL staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.25 WIB).

Konsep penanganan kawasan untuk mewujudkan misi penanganan kawasan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar
 - a) Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan drainase
 - b) Menambah penerangan jalan dan tempat umum
 - c) Menyediakan MCK umum dan *septic tank* komunal
 - d) Menyediakan TPS dan pengelolaan sampah komunal

2. Penghijauan pekarangandan jalan serta pelestarian sempadan sungai
 - a) penghijauan pekarangan dengan penyediaan tanaman obat dan tanaman produktif
 - b) penanaman vegetasi pengarah di jalan utama
 - c) perlindungan sempadan sungai melalui pengukuhan batas dan penerapan batas dan aturan bersama
3. Mewujudkan rumah sehat yang layak dari segi kontruksi dan layak huni
 - a) Renovasi rumah kurang layak huni
 - b) Pemisahan kandang sapi dirumah ke kandang komunal
4. Mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan secara berkesinambungan dengan menyediakan media ruang publik sebagai wadah interaksi sosial
5. Penyediaan ruang publik di tengah-tengah pemukiman sebagai taman bermain anak, tempat pertemuan warga, posyandu, poskamling, dan ruang evakuasi.

Sedangkan konsep penanganan perbaikan kawasan (upgrading) serta pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan kawasan (upgrading)

Peningkatan jaringan jalan dan drainase, sanitasi, persampahan, kondisi rumah dan ruang publik di kawasan permukiman padat penduduk
2. Pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan

- a). Pengelolaan dan pemeliharaan kandang komunal
- b). Pelestarian area sempadan sungai

Merujuk pada konsep makro tersebut, tema penanganan kawasan yang akan diangkat dalam konsep ini adalah:

Baturetno: “Desa Sehat, Hijau dan Produktif”

“Selain itu mbak rencana pengembangan makro ini juga diharapkan berdampak positif terhadap perubahan pandangan masyarakat akan desanya sendiri dengan adanya pemberian konsep Desa sehat, hijau dan produktif ini masyarakat akan lebih bersemangat dan bangga akan desanya. Sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap tingkah laku masyarakat khususnya dalam menjaga wilayahnya sendiri dan sadar akan pentingnya kebersihan, kenyamanan dan kelayakan dalam menuju masyarakat madani.”(wawancara dengan TL staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.30 WIB).

Dalam Implementasi program PLP2K-BK telah disusun program-program yang terencana secara rinci atau *Detailed Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci, dimana proyek pengembangan yang direncanakan dalam jangka waktu 5 tahun sejak program PLP2K-BK ini resmi mulai dilaksanakan di Desa Baturetno yakni pada tahun 2011 hingga 2015. Dalam rencana rinci ini memuat berbagai macam sektor pembangunan aspek fisik . Aspek fisik sendiri meliputi penataan jalan umum dan drainase, pembangunan MCK umum, pengelolaan persampahan, revitalisasi rumah tidak layak huni, perlindungan sempadan sungai, dan penyediaan ruang terbuka publik. Selain itu juga ada rencana rinci non-fisik dimana berfokus pada pengembangan daya aspek sosial dan kemasyarakatan dari sektor

ekonominya. Selama jangka waktu 5 tahun ini perkembangan pembangunan akan terus dipantau oleh semua sektor dari masyarakat, pemda hingga pemerintah pusat selama 3 bulan sekali. Walaupun tujuan program PLP2K-BK ini tidak melakukan proses pembangunan langsung secara total sesuai rencana pembangunan kawasan secara luas, dimana hanya pembangunan yang bersifat stimulan saja sesuai dengan anggaran yang tersedia. Yang meliputi pembangunan jaringan jalan desa, saluran drainase dan sanitasi. Diharapkan program ini dapat menjadi stimulan dari program lanjutan dari instansi terkait yang berpedoman pada rencana pembangunan rinci 5 tahun.

“Jadi sebenarnya program ini sendiri seperti *master plan* Desa Baturetno untuk jangka panjang. Program PLP2K-BK kan tidak bisa meng”cover” atau menyediakan seluruh dana pembangunan yang dibutuhkan, karena setiap tahun program ini harus berpindah lokasi dari satu desa ke desa lainnya untuk proses pemerataan. Jadi selain melakukan beberapa pembangunan pada sektor yang menjadi prioritas masalah utama di Desa Baturetno kami pihak Kementrian Perumahan Rakyat juga membuat sebuah DED/*master plan* nya pembangunan Desa Baturetno mbak yang selanjutnya membutuhkan sinergi dari pihak-pihak lain baik dari pemerintah maupun swasta agar seluruh rencana pembangunan dapat terlaksana.”(wawancara dengan TL staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, pukul 10.35 WIB).

Tabel 10
Program Rinci Rencana Fisik Program PLP2K-BK
Desa Baturetno Tahun ke-1

| Program | Sub program | | Vol | Satuan | Lokasi program | Penanggung jawab | Sumber dana |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|-----|----------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Penataan jaringan drainase | A.1 | Drainase di rw3 | 722 | m ³ | Jalan raya 2 sisi | Kemenpera, kemenpu, pemkab, paguyuban | APBD, APBN, CSR, swadaya |
| | A.2 | Drainase di jalan dlm kampung | 288 | m ³ | rw3 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| Perbaikan dan pengembangan jalan, perlengkapan jalan, jalur hijau | B.1 | Pembuatan jalan beton | 3600 | m ² | rw3 | Kemenpera, kemenpu, pembkab | APBD, APBN, CSR, swadaya |
| | B.2 | Trotoar jalan | 1200 | m ² | Jalan raya baturetno | | |
| | B.3 | Gorong-gorong | 697 | m ¹ | Jalan raya baturetno | | |
| | B.4 | Penerangan jalan umum pejalan kaki | 12 | Unit | rw3 | | |
| | B.5 | Penerangan jalan umum jalan raya | 26 | Unit | Jalan raya baturetno | | |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2011

Pada tahun pertama pelaksanaan program ini yaitu pada tahun 2011 dimana awal dilaksanakannya, program PLP2K-BK di Desa Baturetno mulai dari proses perencanaan dan proses pembangunan langsung. Pada tahun ini terlihat beberapa pembangunan yang sudah dilakukan sebagai upaya stimulan. Pada pembangunan drainase poin A.1 dan A.2 sudah terlaksana oleh badan perumahan Kab. Malang, perbaikan dan pengembangan jalan kampung pada poin B.1 dan B.2 sudah terlaksana oleh badan perumahan Kab. Malang. Untuk poin B.3 sudah terlaksana oleh bantuan dana ADD dari Pemkab tiap tahunnya. Selanjutnya untuk poin B.4 dan B.5 sebagian sudah terlaksana oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan melalui Dinas PU.

Tabel 11

**Program Rinci Rencana Fisik Program PLP2K-BK
Desa Baturetno Tahun ke-2**

| Program | Sub program | | Vol | Satuan | Lokasi program | Penanggung jawab | Sumber dana |
|--|-------------|----------------------------|------|----------------|----------------------|---|--------------------------|
| Perbaikan dan pengembangan jalan, perlengkapan | A.1 | Pembuatan jalan lingkungan | 1200 | m ² | rw3 | Kemenpera, kemenpu, pembkab, paguyuban | APBD, APBN, CSR, swadaya |
| | A.2 | Penanaman pohon | 150 | Buah | Jalan raya baturetno | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|------|----------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| n jalan, jalur hijau | | | | | | | |
| Pengelolaan limbah melalui MCK | B | Pembuatan MCK umum | 2 | Titik | rt3,4,6 | Kemenpera, kemenpu, pemkab, paguyuban | APBD, APBN, CSR, swadaya |
| Pengelolaan persampahan | C.1 | Pengadaan tong sampah | 180 | Buah | rw5, 6,7,8 | Kemenpera, kemenpu, pemkab, paguyuban | APBD, APBN, CSR, swadaya |
| | C.2 | Pengadaan kendaraan sampah | 2 | Unit | rw3 | | |
| | C.3 | Tempat pengolahan sementara | 2 | Titik | rw3,4 | | |
| Revitalisasi rumah tidak layak huni | D | Perbaikan rumah layak huni | 22 | Unit | rw3 | Kemenpera, pemkab | APBD, APBN, CSR, swadaya |
| Perlindungan sempadan sungai | E | Pemagaran | 1500 | m ² | rw3,4 | Pemkab, paguyuban | APBD, CSR, swadaya |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2012

Pada tahun kedua pelaksanaan program ini yaitu pada tahun 2012 ada beberapa rencana pembangunan belum terlaksana dan belum maksimal. Pada poin A.1 dan A.2 belum terlaksana dengan baik, beberapa titik jalan lingkungan dan penanaman pohon hanya sedikit yang di laksanakan. Dana pembangunan yang berasal dari ADD (Alokasi Dana Desa) dari pemkab. Untuk poin B, pembangunan satu unit MCK umum yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Pada poin C.1, C.2 dan C.3 masih belum ada penanganan secara terprogram, sejauh ini pelaksanaannya hanya dilakukan oleh beberapa warga saja secara swadaya. Selanjutnya untuk poin D telah dilaksanakan revonasi rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit, yang pelaksanaan dan dana berasal dari Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang beserta anggaran dari ADD. Selanjutnya pada poin E pelaksanaannya hanya dilakukan oleh beberapa warga saja secara swadaya.

Tabel 12
Program rinci rencana fisik program PLP2K-BK
Desa Baturetno Tahun ke-3

| Program | Sub program | | Vo 1 | Satuan | Lokasi program | Penanggung jawab | Sumber dana |
|-------------------------------------|-------------|---|---------|--------|-------------------|--|-------------------------------|
| Revitalisasi rumah tidak layak huni | A. 1 | Perbaikan rumah tidak layak huni | 22 | Unit | rw3 | Kemenpera, pemkab | APBD, APBN, CSR, swadaya |
| | A. 2 | Pembuatan kandang ternak dan pengolahan pupuk organik | 2 | Unit | rw3,4 | Kemenpera, kementan, pemkab, paguyuban | APBD, APBN, investor, swadaya |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2013

Pada tahun ketiga pelaksanaan program ini yaitu pada tahun 2013 penanganan lingkungan hanya berfokus pada poin A.1 program revitalisasi rumah tidak layak huni saja mengingat ada 22 rumah yang menjadi prioritas penanganan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama yang prosesnya dilakukan secara bertahap. Setelah pada tahun 2012 dilakukan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit rumah. Maka pada tahun ketiga ini dilakukan renovasi rumah sebanyak 12 unit. Jadi untuk penanganan rumah tidak layak huni sudah dilaksanakan secara maksimal berdasarkan rencana pada program PLP2K-BK. Pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang serta bantuan bedah rumah dari TNI . Selain itu untuk poin A.2

penanganan bersifat swadaya oleh masyarakat dibantu melalui sosialisasi kesehatan dari dinas terkait. Untuk pembuatan kandang tetap pada lokasi rumah, namun dibuat beberapa meter lebih jauh sesuai standar kesehatan.

Tabel 13
Program rinci rencana fisik program PLP2K-BK
Desa Baturetno Tahun ke-4

| Program | Sub program | | Vol | Satuan | Lokasi program | Penanggung jawab | Sumber dana |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-----|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Penyediaan ruang terbuka publik | A.1 | Taman bermain anak | 400 | m ² | Rw3, 4 | Kemenpera, kemenpu, pemkab, paguyuban | APBD, APBN, CSR, swadaya |
| | A.2 | Balai RW | 64 | m ² | Rw3, 6 | | |
| | A.3 | Pos Kamling 2×3m | 2 | Unit | Rw3 | | |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2014

Pada tahun keempat pelaksanaan program ini yaitu pada tahun 2014 terfokus pada rencana penyediaan ruang terbuka publik, pada poin A.1 masih belum ada penanganan untuk pembangunan dan penyediaan taman bermain anak. Untuk poin A.2 belum ada penanganan dan untuk poin A.3 penanganan dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui dana ADD sebanyak 2 unit pos kamling. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penanganan pengembangan ruang terbuka publik (RTH) di Desa Baturetno masih belum berjalan dengan baik.

Tabel 14
Program Rinci Rencana Fisik Program PLP2K-BK
Desa Baturetno Tahun ke-5

| Program | Sub program | | Vol | Satuan | Lokasi program | Penanggung jawab | Sumber dana |
|------------|-------------|-------|-----|----------------|----------------|------------------|-------------|
| Penyediaan | A | Taman | 400 | m ² | Rw3, 4 | Kemenpera, | APBD, |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--|--|--|----------------------------|-----------------------|
| ruang terbuka publik | | bermain anak | | | | kemenpu, pemkab, paguyuban | APBN, CSR, perusahaan |
|----------------------|--|--------------|--|--|--|----------------------------|-----------------------|

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2015

Pada tahun terakhir pelaksanaan program ini yaitu pada tahun 2015 di fokuskan pada rencana pengembangan ruang terbuka oleh pemerintah maupun dinas lainnya belum terlaksana. Hanya ada beberapa tanah lapang kosong yang oleh masyarakat secara swadaya di rubah menjadi lapangan sepak bola atau voli namun tidak permanen.

c. Daya Pengembangan Aspek Kegiatan Sosial Ekonomi

Konsep pengembangan aktivitas sosial ekonomi kawasan adalah dengan melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan membentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat. Kelompok usaha yang potensial untuk berkembang di Desa Baturetno adalah kelompok ternak sapi, kelompok pembuat pupuk organik, kelompok usaha olahan tebu, serta kelompok usaha makanan kecil, dan juga tidak terbatas pada usaha lainnya. Keadaan penduduk di Desa Baturetno menurut mata pencaharian sebagian besar sebagai petani, buruh tani, pedagang dan buruh swasta. Pada umumnya tipologi sosial masyarakat di Desa Baturetno cenderung mengarah ke kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Beberapa indikasi yang memperkuat pernyataan tersebut adalah pola mata pencaharian penduduk yang lebih mengarah kepada sektor pertanian (buruh tani 56,4% dan petani 15,6%). Selain sektor pertanian, usaha lain yang cukup berkembang antara lain

peternakan, industri kecil pengolahan makanan, usaha angkutan umum, pedagang pasar, warung/toko dan tukang jahit.

Dalam upaya peningkatan kegiatan usaha ekonomi Desa Baturetno pada program PLP2K-BK ini telah dibuat rencana program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pendapatan warga dengan cara memberikan stimulan bantuan dan pembimbingan khususnya dalam bidang peningkatan potensi ekonomi daerah dalam bidang pertanian dan peternakan. Selain itu juga memberikan gambaran potensi-potensi baru yang dapat dijadikan sumber mata pencaharian alternatif bagi warga Desa Baturetno.

Dengan semakin baiknya sarana dan prasarana di Desa Baturetno khususnya pada akses jalan dan transportasi, maka diharapkan adanya peningkatan ekonomi masyarakat. Karena peningkatan aspek ekonomi daerah itu sendiri tidak dapat terlepas dari faktor lingkungan dan masyarakat. Setelah adanya penanganan aspek sosial kemasyarakatan dan aspek lingkungan di Desa Baturetno maka harus diiringi dengan pengembangan perekonomian masyarakat agar konsep tridaya dalam program PLP2K-BK ini diterapkan secara sempurna.

Tabel 15
Konsep Pengembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat
Desa Baturetno

| Program | Sub program | | Vo l | Satua n | Lokas i progra m | Penanggu ng jawab | Sumber dana |
|--|-------------|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Peningka tan usaha rumah tangga | A.1 | Pengadaan alat untuk usaha rumah tangga | 5 | Kelo m Pok | Kaw. Peren canaa n | DISPERI NDAGKO P, KSM | APBD, CSR, SWADA YA |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|----|----------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | A.2 | Pelatihan pembuatan produk olahan tebu | 5 | Kelompok | Kaw. Perencanaan | | |
| Peningkatan kelompok tani | B.1 | Pelatihan penanaman bibit unggul dan tanaman produktif | 2 | Kelompok | Kaw. Perencanaan | DISHUTBUN, DKP, DPU CIPTA KARYA, KSM | APBD, CSR, SWADAYA |
| | B.2 | Penyediaan mesin pengolahan sampah untuk pupuk organik | 1 | Unit | Kaw. Perencanaan | | |
| Peningkatan usaha peternakan | C.1 | Sosialisasi dan pembentukan kelompok ternak di kandang komunal | 30 | Orang | Kaw. Perencanaan | DISNAKIKAN, KSM | APBD, CSR, SWADAYA |
| | C.2 | Pelatihan peternakan dan penggemukan sapi | 30 | Orang | Kaw. Perencanaan | | |
| | C.3 | Pengadaan bibit sapi untuk kelompok ternak | 50 | Ekor | Kaw. Perencanaan | | |
| | C.4 | Penguatan kapasitas kelompok ternak | 1 | Orang | Kaw. Perencanaan | | |
| Peningkatan peralatan sosial kemasyarakatan | D.1 | Peralatan karang taruna dan rumah baca | 1 | Set | Kaw. Perencanaan | DINSOS, KANWIL DEPAG, DINKES, KSM | APBD, CSR, SWADAYA |
| | D.2 | Perlengkapan masjid dan mushola | 2 | Unit | Kaw. Perencanaan | | |
| | D.3 | Peralayan posyandu balita dan lansia serta ambulan desa | 1 | Unit | Kaw. Perencanaan | | |

Sumber: Data Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2015

Dalam konsep rencana pengembangan ekonomi masyarakat di Desa

Baturetno terdapat 4 poin prioritas yaitu peningkatan usaha rumah tangga,

peningkatan kelompok tani, peningkatan usaha peternakan dan peningkatan peralatan sosial kemasyarakatan. Program-program tersebut merupakan penjabaran dari potensi sumber daya yang ada di Desa Baturetno, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya mengingat di daerah ini untuk pemanfaatan lahan dan sumber dayanya nya masih belum terkelola dengan baik.

Dalam upaya peningkatan peningkatan usaha rumah tangga pada poin A.1, melalui dana APBD yang di sediakan oleh Pemkab telah diberikan bimbingan dan bantuan alat cetak batu bata yang lebih efektif untuk meningkatkan produksi pembuatan batu bata di Desa baturetno. Ketersediaan lahan dan bahan baku untuk pembuatan batu bata tersedia dengan baik, hal ini dapat diartikan bahwa potensi sumberdaya ini dapat di jadikan sumber mata pencaharian baru maupun sumber mata pencaharian tambahan bagi warga Desa Baturetno. Selanjutnya untuk poin A.2, Pemkab melalui pihak kelurahan dan koperasi dilakukan pengarahannya untuk inovasi pengolahan tebu menjadi sari tebu menggunakan alat pemeras tebu sederhana yang dapat dijadikan minuman dan dijual secara langsung. Masyarakat diberikan kemudahan untuk mengajukan kredit pembelian alat pemeras tebu yang kebijakannya dibuat oleh koperasi dan dan kelurahan.

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor utama mata pencaharian masyarakat untuk itu diperlukan pengembangan dan pelatihan yang efektif dan efisien bagi warga Baturetno. Pada program peningkatan kelompok tani pada poin B.1 pelatihan penanaman bibit unggul

dan tanaman produktif Pemkab bekerjasama dengan dinas pertanian dan para mahasiswa dari bidang terkait memberikan inovasi teknik penanaman dan pelatihan peningkatan produksi masa panen tebu sesuai musim. Selain itu juga untuk produksi padi diadakan pembimbingan penanaman bibit unggul guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Pada poin B.2 penyediaan mesin pengolah sampah untuk pupuk organik hingga sekarang masih belum ada sama sekali baik pelaksanaan maupun berupa bimbingan dari institusi pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu juga belum ada program yang terintegrasi dengan upaya produksi pupuk organik. Namun, beberapa warga desa baturetno secara mandiri dapat memanfaatkan kotoran ternak mereka sebagai pupuk di kebun mereka melalui cara tradisional guna mengurangi pengeluaran dalam penyediaan pupuk.

Usaha peningkatan usaha peternakan tidak terlepas dari pengaruh sektor peternakan yang juga menjadi salah satu potensi daerah Desa Baturetno, mengingat seolah sudah menjadi budaya warga secara turun menurun untuk beternak sapi sebagai pendapatan tambahan. Selain itu yang menjadi permasalahan utama lingkungan yaitu warga Desa Batuetno yaitu kandang yang masih menjadi satu dengan rumah tinggal. Kondisi ini tentunya berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan apalagi kotoran ternah belum terkelola dengan baik. Untuk poin C.1 yaitu sosialisasi dan pembentukan kelompok ternak di kandang komunal yaitu dengan usaha memisahkan ternak sapi dari rumah, dimana sapi-sapi warga ditempatkan di kandang bersama untuk warga. Pemdes bekerjasama dengan dinas peternakan

dan kesehatan kabupaten malang melakukan sosialisasi serta pembentukan beberapa kelompok ternak yang akan ditempatkan di kandang komunal yang disediakan oleh pemerintah kabupaten selain itu untuk mendukung peningkatan daya jual dan produksi juga disediakan tempat lelang/pasar sapi untuk mempermudah sarana jual beli dan berjalan dengan cukup baik dengan selalu ramainya antusias perdagangan jual beli sapi. Untuk poin C.2 yaitu pelatihan peternakan dan penggemukan sapi dilakukan oleh dinas peternakan dan kesehatan hewan beserta bekerjasama dengan mahasiswa peternakan untuk melakukan sosialisasi dan pemberian cara-cara inovatif dalam upaya penggemukan sapi. Sedangkan untuk poin C.3 yaitu pengadaan bibit sapi untuk kelompok ternak dan poin C.4 yaitu penguatan kapasitas kelompok ternak belum ada tindak lanjut dan terlaksana.

Sedangkan untuk program peningkatan peralatan sosial kemasyarakatan belum ada tindak lanjut hingga tahun ini.

“Dalam upaya pengembangan sektor sosial ekonomi di Desa Baturetno ini cukup membuahkan hasil yang signifikan mbak, contohnya perbandingan pendapatan hasil panen salah satu sektor ekonomi masyarakat yaitu di bidang pertanian dan perkebunan pada tahun 2012 dan 2014 naik 50%. Dari hasil tebu yang kira-kira 20 jutaan menjadi 40 jutaan, selain itu padi panen padi terkecil yang awalnya 2 jutaan menjadi 4 jutaan. Selain itu faktor perbaikan infrastruktur sehingga transportasi pengangkutan lebih baik juga menjadi salah satu faktor penunjang di bidang pengembangan ekonomi ini.” (wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, pukul 09.00 WIB).

Gambar 15**Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Baturetno**

Sumber: Dokumentasi Badan Perumahan Kabupaten Malang, 2015

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno

a. Faktor Pendukung

Berikut adalah penjabaran tentang faktor pendukung dalam Implementasi Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Menurut staf seksi pengembangan kawasan perumahan yaitu:

“Faktor pendorongnya secara keseluruhan yaitu dari sumber daya manusianya, peran masing-masing sesuai tupoksinya mbak. Itu kunci keberhasilan suatu program mbak.” (wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, pukul 09.10 WIB).

- 1) Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan pusat untuk terus melakukan kegiatan stimulan dengan melaksanakan program PLP2K-BK setiap tahunnya dengan lokasi yang berbeda pada daerah yang terpilih dan tetap memonitor segala bentuk pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun perencanaan di tiap-tiap lokasi pelaksanaan program PLP2K-BK
- 2) Pengalokasian APBD untuk mendukung rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan, khususnya dalam rangka keberlanjutan, sesuai dengan indikasi program dalam perencanaan dan CAP.
- 3) Adanya koodinasi dari Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang dan pemerintah desa dengan instansi lainnya baik pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik sosial, lingkungan dan ekonomi selama jangka waktu perencanaan selama 5 tahun ke depan. Yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dan mendorong peran aktif dan kontribusi dari instansi lain tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lusiana Fereliah selaku staf seksi pengembangan kawasan perumahan dijelaskan beberapa faktor pendukung kegiatan PLP2K-BK, yaitu:

“Intinya yah jaga koordinasi yang baik bersama instansi terkait seperti pihak TPM, kelurahan, Badan Perumahan Kabupaten Malang serta instansi-instansi lain yang berkontribusi selama pelaksanaan pembangun selama 5 tahun itu mbak. Tanpa adanya keberlanjutan koordinasi otomatis tidak jalan konsep-konsep pembangunan yang sudah di buat.”(wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, pukul 09.15 WIB).

- 4) Peran aktif dan kontribusi masyarakat Desa Baturetno dalam pelaksanaan Program PLP2K-BK. Peran aktif warga mulai dari pembentukan Tim Penggerak Masyarakat (TPM) hingga keterlibatan seluruh warga dalam pembuatan perencanaan pembangunan serta pelaksanaannya, dimana warga juga menyediakan tenaga mereka dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desanya.
- 5) Potensi sumber daya baik potensi wilayah maupun SDM di Desa Baturetno tersedia dengan baik. Ketersediaan lahan, potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan sumber menjadi faktor berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

b. Faktor Penghambat

Menurut Ibu Lusiana selaku staf seksi pengembangan kawasan perumahan, menjelaskan bahwa:

“Permasalahan yang cukup mempengaruhi sebenarnya ketersediaan dana mbak, jadi untuk itu kami hanya mampu membuat stimulan saja, pada dasarnya program PLP2K-BK ini kan untuk memperoleh dana dari instansi-instansi lain yang turut berkontribusi dalam melaksanakan berbagai pembangunan yang sudah direncanakan di dalam program PLP2K-BK ini.”(wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, pukul 09.20 WIB).

Lebih lanjut lagi penjelasan yang diutarakan oleh Ibu Lusiana:

“Dikarenakan program PLP2K-BK ini dilaksanakan setiap tahunnya di berbagai daerah yang berbeda dan dengan keterbatasan dana yang ada. Pembangunan di tiap-tiap daerah tingkat keberhasilannya tidak sama karena tidak semua daerah mempunyai koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerahnya.”(wawancara dengan LF staf Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, pukul 09.25 WIB).

Sedangkan menurut Bapak Imam Suyono selaku kepala seksi pengembangan kawasan perumahan:

“Keterlibatan instansi lain baik pemerintah maupun swasta disini memegang peranan yang cukup penting dalam keberhasilan rencana program 5 tahun, namun untuk merangkul pihak-pihak tersebut cukup sulit. Karena hal ini mengandalkan sepenuhnya pihak Pemkab atau Badan Perumahan maupun provinsi dan pusat dalam menjalin sinergi. Dikarenakan peran masyarakat sendiri masih lemah.”(wawancara dengan IS kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, pukul 09.30 WIB).

- 1) Penyediaan dana dalam melaksanakan seluruh rencana-rencana dalam konsep pembangunan wilayah Desa Baturetno membutuhkan dana yang besar. Dengan ketersediaan dana yang sangat minim, program PLP2K-BK ini hanya mampu memberikan stimulan dan memerlukan sinergi dari pihak lain untuk menyelesaikan keseluruhan poin-poin pembangunan yang sudah disusun dalam PLP2K-BK.
- 2) Terbatasnya jumlah tim teknis sebagai aktor implementasi. Dalam hal ini Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang masih kurang dalam menyediakan tim teknisnya selama proses monitoring dan evaluasi selama kurun waktu 5 tahun, sehingga masih sering terjadi perbedaan perkembangan hasil pembangunan (*miss communication*) dengan pihak

kelurahan maupun masyarakat. Sehingga beberapa pembangunan belum terlaksana dan belum ada tindak lanjut.

- 3) Kolaborasi antar instansi di dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Berbasis Kawasan (PLP2K–BK) di Desa Baturetno masih ada yang mengalami ketimpangan, karena masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda akan pembangunan sehingga proses pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas menjadi terhambat dikarenakan konflik di dalam pemahaman atas perencanaan pembangunan.
- 4) Politik, ekonomi, dan lingkungan. Karena Faktor sosial budaya masyarakat yang masih tradisional dan cenderung kumuh, sehingga beberapa masyarakat masih kesulitan dalam menyesuaikan perubahan lingkungannya. Khususnya dalam masalah kandang ternak yang menjadi satu dengan rumah warga.
- 5) Masyarakat Desa Baturetno belum bisa mendapatkan *channeling* kemitraan bersama dengan swasta. Karena masyarakat tidak memiliki daya tawar kekuatan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kemitraan masyarakat dengan pihak swasta belum dapat direalisasikan di Desa Baturetno dan masih mengandalkan sepenuhnya peran dari pemerintah daerah.
- 6) Tidak semua masyarakat mengetahui secara menyeluruh esensi dari program PLP2K–BK. Dimana, dengan adanya program ini masyarakat

di wilayah Desa Baturetno mengajukan aspirasinya akan kebutuhan di bidang pembangunan baik sosial, lingkungan dan ekonomi.

C. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, maka peneliti berusaha untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana metode ini di tunjukan untuk dapat melukiskan atau menggambarkan upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh melalui Program PLP2K-BK sebagai sarana Pemberdayaan masyarakat Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan tridaya serta mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni. Kemudian memaparkan dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program PLP2K-BK, baik dari segi pendukung maupun penghambat. Berikut ini secara berturut-turut disajikan analisis dan interprestasi data-data yang dimaksud:

- 1. Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK sebagai sarana Pemberdayaan masyarakat Desa Baturetno yang pelaksanaanya dilakukan menggunakan pendekatan tridaya.**

a) Daya Pengembangan Aspek Sosial Kemasyarakatan

Pengembangan masyarakat (Sosial Development) tiap langkah rencana yang ada di program PLP2K-BK ini selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat yang efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang akses dalam program kegiatan setempat. Menurut Hadiman dan Midgley (Suharto, 2005:5) model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Analisis tentang usaha pengembangan aspek sosial kemasyarakatan di Desa Baturetno telah sesuai dengan teori tersebut dimana masyarakat Desa Baturetno sendiri di diberdayakan untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka sendiri melalui upaya-upaya stimulan dan rencana pembangunan wilayah dan ekonomi. Berdasarkan pasal 131 ayat 2 poin (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa peran masyarakat yaitu memberikan kontribusi dalam penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dan masyarakat Desa Baturetno sendiri dengan

cukup baik sudah mampu memutuskan dan merencanakan pemecahan masalah di desanya. Selain itu program ini sudah mampu menumbuhkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja dalam setiap kegiatannya, dimana menggunakan tenaga kerja yang diambil dari masyarakat setempat. Berdasarkan analisis dari 2 pelaksanaan tahapan yang dilakukan dalam proses PLP2K-BK yaitu penyiapan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/ *Community Action Plan* (CAP), maka hal ini sesuai dengan konsep tridaya dari Kementerian Perumahan Rakyat yang pertama yaitu pemberdayaan sosial manusia dimana didalam pelaksanaannya mengedepankan:

4. Memberikan dorongan percaya diri untuk dapat berkembang dan masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan yang akan dan sedang dilakukan. Melalui TPM dan pelaksanaan CAP masyarakat Desa Baturetno sudah mampu menyampaikan aspirasi dan aktif dalam proses perencanaan dan tindak lapangan.
5. Pembangunan sumber daya manusia melalui jenis kegiatan yang dapat dikembangkan secara sosial ekonomi. Melalui CAP kontribusi masyarakat meningkat dengan cepat, dimana awalnya penduduk Desa Baturetno cenderung tidak peduli terhadap lingkungannya sekarang sudah mampu menjaga dan memperhatikan kebersihan rumah maupun jalan lingkungan. Pembentukan TMP di Desa Baturetno selama jangka waktu 5 tahun pelaksanaan PLP2K-BK ini mampu

memberikan informasi perkembangan pembangunan dan masalah di daerah mereka maupun untuk mengevaluasi kekurangan dari program ini serta mengawasi pelaksanaan penanganan dari rencana pembangunan oleh pihak-pihak dari lembaga lain.

6. Masyarakat akan menyadari bahwa untuk dapat membangun dan bukan hanya menunggu bantuan, akan tetapi bagaimana menciptakan bantuan dan sekaligus berpartisipasi di dalamnya. Melalui TPM yang bekerjasama dengan kelurahan mereka sudah mampu untuk menjabarkan visi dan misi dalam pembangunan di Desa mereka sehingga program-program lain yang bersinergi dengan program PLP2K-BK ini biasa cepat terlaksana tanpa ada proses rembug warga lagi, karena rencana pembangunan desa mereka sudah tersedia.

1) Penyiapan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM)

TPM (tim penggerak masyarakat) dalam kegiatan PLP2K-BK ini ikut serta merencanakan dan menganalisis permasalahan di daerahnya sendiri menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang aspiratif, representatif, mengakar dan mampu memperkuat aspirasi atau suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal apapun dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya sehingga mampu mengangkan harga diri serta harkat dan martabat warga Desa Baturetno

sendiri karena mampu ikut serta dalam segala proses perencanaan pembangunan desanya. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hikmat (2001:3) konsep dimana pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan serta pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketidakberdayaan. Peran TMP dalam tugasnya yaitu mendukung dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penataan lingkungan permukiman mereka sesuai dengan arahan dan rekomendasi Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat terlihat dari sudah terlaksananya peran dan tugas TMP yaitu mulai dari mengikuti rapat koordinasi, sosialisasi program, melakukan survey kampung sendiri, melaksanakan rembuk warga dan membantu pembuatan CAP.

Untuk peran serta dan kontribusi TPM warga Desa Baturetno sendiri sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari antusias dan banyaknya keikutsertaan warga dalam kegiatan CAP, karena TMP yang mengajak para warga secara pribadi untuk mengikuti semua proses dari perencanaan hingga pelaksanaan fisik. selain itu TMP sendiri bukan dipilih oleh pihak kelurahan namun sukarela sendiri atas dasar mengajukan diri. Hal ini menunjukkan jika masyarakat memiliki rasa

tanggung jawab yang cukup besar terhadap pembangunan di desanya. keberhasilan dari terbentuknya dan tugas dari TPM ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah khususnya Badan Perumahan Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten selaku Badan Perumahan Rakyat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam salah satu tugasnya yaitu selalu mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan. Peran sosialisasi dari pemda tentang kegiatan PLP2K-BK ini menjadi pilar utama dalam keberhasilan Tim Penggerak Masyarakat dimana TMP ini secara terus-menerus dilatih oleh Badan Perumahan yang sudah menjadi tugasnya yaitu dengan melatih, memberikan motivasi dan kewenangan terhadap TPM dalam menjalankan tugasnya sebagai roda penggerak seluruh masyarakat Desa Baturetno. Sehingga mampu membuat TPM ini merasa percaya diri, mempunyai jiwa kepemimpinan dan mampu untuk mengajak semua warga Desa dalam berkontribusi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Desanya.

2) Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/ *Community Action Plan* (CAP) oleh masyarakat.

Kegiatan *Community Action Plan* (CAP) merupakan kegiatan musyawarah atau rembug warga antara pihak pemda dan masyarakat guna untuk melakukan beberapa kegiatan sebelum pelaksanaan di lapangan. Tujuan pelaksanaan penyusunan RTK/CAP adalah agar masyarakat dapat secara mandiri merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka, serta memiliki kesadaran untuk memeliharanya secara terus menerus

Dalam memberdayakan masyarakat ada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan mereka, yang saat ini merupakan kelompok lemah. Proses pemberdayaan ini dilakukan di Desa Baturetno melalui kegiatan CAP untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhann hidupnya sehingga harapan kedepannya untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat, mampu menyampaikan aspirasinya dan mempunyai mata percaharian yang merupakan sumber penghasilan mereka, dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan yang penting adalah masyarakat menjadi mandiri dalam kehidupan sehari-harinya. Proses CAP di Desa BAaturetno ini sudah mampu menggali pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya dan ini berguna untuk mendorong masyarakat agar menjadi lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya atau bangkit dari keterpurukan dengan

menggunakan dan mengakses sumber daya yang ada baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya

Pelaksanaan kegiatan CAP yang dilakukan selama 2 tahap ini berjalan lancar dan cukup baik, dimana peran serta masyarakat Desa Baturetno dalam menyampaikan opini dan permasalahan yang ada di Desanya cukup besar. Selain itu keikutsertaan masyarakat dalam perannya ikut merencanakan rencana pembangunan jangka panjang untuk desanya sudah baik dan cukup aktif dimana dalam setiap rembug warga yang diadakan hampir setiap kepala keluarga hadir dan memberikan kontribusinya dalam setiap keputusan-keputusan yang dibuat sehingga proses dan tujuan dari CAP sendiri sudah tercapai yaitu memberdayakan masyarakat dengan cara masyarakat dapat secara mandiri merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suharto (2005:60) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan manunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya. Selain itu peran TPM dalam memfasilitasi masyarakat dalam menyusun CAP juga berpengaruh terhadap kontribusi seluruh masyarakat.

b. Daya Pengembangan Aspek Lingkungan Fisik

Mengacu pada Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya pencegahan terjadinya daerah kumuh pada hakekatnya bermuara kepada upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta upaya untuk memberdayakan masyarakat agar kehidupan sosial ekonominya lebih baik dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik untuk menjaga lingkungannya setelah kondisi sosial ekonominya menjadi lebih terjamin. Hal ini menjadi tujuan dari upaya pengembangan aspek lingkungan fisik di Desa Baturetno. Selain itu berdasarkan analisis lingkungan di Desa Baturetno, jika disandingkan dengan teori M. Agung Ridlo (2001:24) Desa Baturetno termasuk lingkungan permukiman kumuh, dimana lingkungan permukiman yang absah, legal dan permanen tetapi kondisi fisik lingkungannya semakin memburuk karena kurang pemeliharaan, umur bangunan yang menua, ketidak acuhan atau karena terbagi-bagi menjadi unit pekarangan rumah atau kamar yang semakin kecil dan telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, dan budaya, dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Analisis keadaan

lingkungan di Desa Baturetno baik rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Jawas Dwijo Putro, 2011:21).

Melalui kegiatan (PLP2K-BK) tersebut masyarakat Desa Baturetno sudah difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya. Pengembangan dan perlindungan lingkungan (Environmental Protection) dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun lingkungan buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serai dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahann yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Dari analisis diatas menunjukkan dengan adanya penataan/perbaikan kawasan kumuh khususnya Desa Baturetno setelah adanya program ini sudah mulai terasa manfaatnya dari sektor lingkungan dari semakin mudahnya mobilitas warga dengan semakin meningkatnya kualitas sarana infrastruktur, tempat tinggal, RTH serta keindahan dan kebersihan Desa. Sesuai dengan

syarat-syarat dari kamus tata ruang Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum suatu permukiman dapat dikatakan baik.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan analisis menunjukkan ada dampak antara pengembangan lingkungan dengan perubahan tingkat kekumuhan. maka hal ini sesuai dengan konsep tridaya dari Kementrian Perumahan Rakyat, yang kedua yaitu pemberdayaan fisik lingkungan dimana didalam pelaksanaannya mengedepankan:

4. Pengembangan sumber daya yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi lingkungan baik bagi keluarga maupun masyarakat. Melalui penanganan fisik lingkungan di Desa Baturetno sudah mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam hal perbaikan kualitas hidup masyarakat, dengan pembangunan jalan, drainase, rumah tidak layak huni, MCK, penerangan jalan mampu menambah keindahan membuat Desa Baturetno dari tahun ke tahun.
5. Hasil yang dicapai dapat memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman. Melalui CAP seluruh permasalahan di Desa Baturetno ditampung, namun tetap ada beberapa permasalahan fisik yang belum bisa ditangani hingga sekarang karena keterbatasan dana dan sinergi dari lembaga lain. Namun untuk permasalahan yang menjadi prioritas utama di Desa Baturetno sudah dapat ditangani dengan cukup baik.

6. Kegiatan yang dilakukan dapat menciptakan suatu bentuk lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Penanganan aspek lingkungan di Desa Baturetno sendiri mampu mempengaruhi aspek lain seperti meningkatnya ekonomi masyarakat serta sarana untuk berkumpul warga guna membahas dalam upaya menangani permasalahan-permasalahan baru lain yang kemungkinan muncul mengingat perkembangan jaman yang cepat.

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar (infrastruktur)

Kondisi prasarana dan sarana dasar lingkungan yang baik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam suatu lingkungan permukiman yang akan berfungsi sebagai pendukung aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan usaha produksi serta kesehatan masyarakat Desa Baturetno. Dengan peran dan fungsi ini, maka keberadaan dan kondisi infrastruktur dalam suatu lingkungan permukiman khususnya di Desa Baturetno sangat penting untuk disediakan secara baik, tepat dan efisien. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kodoatie (2005), pentingnya kerangka sistem, infrastruktur menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Prasarana dan sarana dasar adalah bersifat layanan umum (*public service*) dan bukan bersifat individual (*personalize*), kerusakan dalam

sektor atau lokasi akan dapat dirasakan dampaknya oleh banyak orang atau lokasi (masal). Dengan sifat ini, maka semua permasalahan dan solusi harus dikaji secara bersama pula. Infrastruktur juga bersifat (*integrated system*) yang berarti bahwa persoalan pada suatu tempat atau sektor bisa disebabkan oleh sektor atau tempat lainnya. Ketersediaan secara fisik saja belum dapat menjamin fungsi infrastruktur, diperlukan aspek pemeliharaan dan pengoperasian yang baik pula. Dengan sifat ini maka dalam aspek perencanaan, perancangan, pembangunan, pengawasan sampai operasional/pemeliharaan sangat diperlukan partisipasi semua masyarakat Desa Baturetno maupun pihak pemerintah secara berkelanjutan dalam upaya untuk dapat mencapai sasaran yang tepat serta menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dalam diri seluruh masyarakat Desa Baturetno.

Dalam pelaksanaan program PLP2K-BK ini perbaikan sistem sirkulasi dan jaringan jalan, sistem drainase, sanitasi, persampahan dan limbah menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan dimana menyesuaikan dengan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat sebagai stimulan. Dalam hal ini Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang dan masyarakat Desa Baturetno telah mampu melakukan pembangunan beberapa infrastruktur vital sesuai target stimulan seperti jaringan jalan, drainase, sanitasi (MCK) dan penerangan jalan, hal ini sesuai dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa pembangunan prasarana,

sarana dan utilitas umum perumahan dilakukann oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang . Untuk sisanya pembangunan dilakukan oleh lembaga-lembaga antar pemerintah maupun swasta melalui sinergi program. Sehingga indikasi dari tujuan stimulan dalam PLP2K-BK ini cukup berhasil dengan adanya keberlanjutan program dan keikutsertaan lembaga lain yang hampir tiap tahun dilaksanakan di Desa Baturetno. Sehingga dari tahun ke tahun pembangunan infrastruktur di Desa Baturetno cukup baik

Berdasarkan analisis hasil penanganan infrastruktur di Desa Baturetno dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini menjadi tonggak utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial. Hal ini dikarenakan dengan semakin baiknya fasilitas sarana dan prasarana dasar maka aktivitas dan mobilitas warga semakin baik dan lancar sehingga mampu mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial warga dengan kata lain mampu mempersingkat waktu perjalanan yang sebelumnya cukup susah karena infrastruktur jalan yang buruk. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grigg dan Fontane (2000) yang memberikan skema yang cukup jelas mengenai peran infrastruktur dalam mengkonversi sumber daya alam menjadi sumber daya yang memiliki manfaat besar bagi pengembangan sistem ekonomi, social budaya, kesehatan dan kesejahteraan

2. Peningkatan Kondisi Rumah Tinggal

Bagi masyarakat Indonesia terutama golongan menengah kebawah, rumah juga merupakan barang modal, karena dengan rumah ini mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam mendukung kehidupan dan penghidupannya. Karenanya, permasalahan perumahan dan permukiman di Desa Batuetno tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai persoalan yang berkaitan dengan semua dimensi kehidupan di dalam masyarakat. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang serta mempunyai peran sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan bentuk manifestasi jatidiri. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan pemukimannya maka terlihat jelas bahwa kualitas sumberdaya manusia dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman dimana masyarakat tinggal menempatinnya.

Permasalahan utama yang banyak ditemui di rumah-rumah warga Desa Baturetno ini yaitu letak rumah warga dan kandang sapi dibiarkan menyatu dan hanya dibatasi sekat tripleks atau anyaman bambu, hal ini sudah berlangsung secara turun-menurun sehingga menjadi budaya warga dimana mereka merasa aman jika kandang sapi mereka menyatu dengan rumah dengan alasan keamanan ternak mereka dari para pencuri. Namun hal tersebut justru menimbulkan masalah baru yang sangat cukup

mempengaruhi keadaan lingkungan Desa Baturetno. Secara sanitasi rumah warga menjadi kurang sehat karena kotoran ternak sering ditumpuk di kandang atau di pekarangan dan udara menjadi tidak bersih dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu beberapa rumah yang menjadi target renovasi program PLP2K-BK yaitu rumah warga miskin yang sudah tidak layak atau bahkan tidak layak huni dengan prioritas keamanan bangunan yang mengancam keselamatan karena dapat sewaktu-waktu roboh menimpa para penghuninya.

Sesuai dengan program PLP2K-BK yang didalamnya memasukkan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai prioritas jangka panjangnya. Di dalam kegiatan stimulan ini dana yang tersedia tidak memadai untuk melakukan renovasi rumah tidak layak huni sehingga pelaksanaannya menunggu dari kegiatan sinergi lembaga-lembaga lain secara bertahap. Dari data yang diperoleh dari tahun 2012-2015 target rencana renovasi rumah tidak layak huni di Desa Baturetno terlaksana dengan baik. Dimana target renovasi 22 rumah tidak layak huni berhasil dilaksanakan dari dana dan sinergi lembaga-lembaga lain dimana untuk penanganan rumah tidak layak huni sudah dilaksanakan secara maksimal berdasarkan rencana pada program PLP2K-BK, selain itu juga pemindahan kandang ternak yang menyatu dengan rumah ke kandang komunal yang disediakan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang serta program bedah rumah dari TNI. Dan hal ini sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Hal ini menunjukkan pemerintah mempunyai tanggung jawab dan peran besar dalam tercapainya pembangunan secara berkelanjutan dan terorganisir sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal, efektif dan efisien.

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau atau taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi atau masyarakat sekitar. Desa Baturetno membutuhkan taman yang mempunyai fungsi sebagai paru-paru daerah (sirkulasi udara dan penyinaran), menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan. Analisis ini sesuai konsep RTH oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang dimana Desa Baturetno membutuhkan ruang terbuka hijau mikro, yakni lahan terbuka yang ada di setiap kawasan permukiman yang disediakan dalam bentuk

fasilitas umum seperti taman bermain (*playground*), taman lingkungan (*community park*), dan lapangan olahraga.

Berdasarkan konsep penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka di Desa Baturetno yang sudah disusun yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat termasuk anak-anak dan remaja mengenal pentingnya melestarikan sempadan sungai sebagai perwujudan cinta dan peduli terhadap lingkungan serta penghijauan pekarangan dengan tanaman produktif dan tanaman obat serta penyediaan ruang terbuka publik di tengah-tengah pemukiman. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Fandeli (2004) dimana ruang terbuka hijau diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Sehingga fungsi dari RTH ini sendiri akan mampu untuk mempengaruhi kualitas suatu kawasan dimana penanganan konsep pengembangan RTH di Desa Baturetno ini menyesuaikan dengan faktor-faktor kebiasaan masyarakat dan karakteristik wilayah.

Berdasarkan analisis dari data yang didapat, pada kenyataannya konsep dan rencana penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka di Desa Baturetno yang sudah disusun melalui PLP2K-BK ini tidak berjalan dengan baik. Mulai tahun 2011 hingga 2015 belum ada pembangunan atau perbaikan sarana RTH. Hanya ada bimbingan dan sosialisasi karena ketersediaan lahan RTH di desa baturetno melimpah namun berupa RTH privat. Jadi pihak Pemkab bersama kelurahan lebih mengupayakan pendekatan secara personal untuk mengajak warga untuk memanfaatkan

RTH privat secara optimal dengan menanam tanaman obat dan tanaman produktif lainnya. Selain itu pembangunan fisik hanya berupa pos kamling sebanyak 2 unit yang berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD). Hingga tahun ini hanya ada beberapa warga saja yang memanfaatkan RTH privat secara baik, selebihnya tidak ada perubahan yang berdampak pada perubahan kualitas RTH. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak berjalan dengan baik walaupun penanganan RTH di Desa Baturetno termasuk dalam 3 isu pokok penataan kawasan.

4. Konsep dan Rencana Pengembangan Wilayah

Perencanaan wilayah di berbagai daerah tidak sama, tergantung dari kehidupan ekonomi dan masalah yang di hadapi daerah tersebut. Tujuan dari disusunnya konsep dan rencana pengembangan wilayah di Desa Baturetno sendiri bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, selain itu untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif. Upaya yang dilakukan selama proses pembuatan konsep dan perencanaan pengembangan daerah Baturetno berhasil menghasilkan 2 konsep yaitu konsep dan rencana pengembangan mikro serta konsep dan rencana pengembangan makro

yang keduanya dibedakan menjadi rencana jangka pendek (pembangunan fisik) dan rencana jangka panjang (pembangunan fisik serta visi dan misi) . Kedua rencana ini disusun berdasarkan analisis permasalahan di Desa Baturetno serta peran masyarakat dalam kontribusinya yang cukup besara dalam proses pembuatan konsep ini. Hal ini sudah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 pasal 64 ayat (2) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa perencanaan kawasan permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman guna memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Rencana pengembangan aspek fisik Desa Baturetno pada program PLP2K-BK telah disusun dan terencana secara baik dan rinci dalam konsep baik mikro maupun makro pada proyek pengembangan yang direncanakan melalui *Detailed Engineering Design* (DED) dalam jangka waktu 5 tahun sejak program PLP2K-BK ini resmi mulai dilaksanakan di Desa Baturetno yakni pada tahun 2011 hingga 2015 dengan memperhatikan lokasi dari Kecamatan Singosari dimana Desa Baturetno ini berada sudah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan dimana tertuang di dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan. Hal ini bertujuan memperkecil kesenjangan sosial antara Desa Baturetno dengan pusat Kecamatan Singosari dikarenakan jaraknya yang cukup dekat dan mudah diakses. Perencanaan ini sesuai dengan teori

pendekatan perencanaan wilayah oleh Jayadinata (1999) yang menjelaskan bahwa perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi (perencanaan pedesaan dan wilayah). Hal ini dapat dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara pedesaan dan perkotaan.

. Berdasarkan dari data yang diperoleh serta hasil dari analisis dari tahun 2011 hingga 2015, maka secara keseluruhan konsep dan rencana pengembangan wilayah di Desa Baturetno sudah terlaksana dengan baik dan hampir memenuhi semua target rencana pembangunan fisik. Namun masih ada beberapa dari poin-poin rencana yang hingga sekarang belum ada tindak lanjut dan terbengkalai. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah yang karena target-target pembangunan fisik yang menjadi prioritas sudah terlaksana dengan baik.

Dengan cukup baiknya pelaksanaan dari rencana-rencana pembangunan aspek fisik tersebut, maka hal ini juga cukup mempengaruhi budaya masyarakat yang sebelumnya terbiasa tidak peduli dengan lingkungannya sekarang sudah semakin sadar dan peduli. Jadi secara tidak langsung konsep perencanaan ini berdampak positif terhadap perubahan pandangan masyarakat akan desanya sendiri. Melalui konsep Desa sehat, hijau dan produktif ini masyarakat Desa Baturetno menjadi bersemangat dan bangga akan desanya. Sehingga mempengaruhi setiap tingkah laku masyarakat khususnya dalam menjaga wilayahnya sendiri dan sadar akan pentingnya kebersihan, kenyamanan dan kelayakan.

Selain itu jika dilihat dari sinergi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan maupun swasta khususnya dalam masalah penyediaan dana yang diharapkan dapat terjadi di dalam pelaksanaan rencana pembangunan fisik ini terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan tugas pemerintah Kabupaten yaitu mengalokasikan APBD untuk mendukung rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan, khususnya dalam rangka keberlanjutan, sesuai dengan indikasi program dalam perencanaan dan CAP cukup terpenuhi dengan baik. Walaupun untuk koordinasi masing-masing lembaga masih kurang baik mengingat masih belum terpenuhi semua target. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif guna menunjukkan kontribusi dalam pembangunan khususnya ketersediaan dana yang menjadi masalah utama. Sehingga melalui program PLP2K-BK ini semua pihak implementor untuk kegiatan pembangunan dapat terus bekerjasama secara berkesinambungan dan saling membutuhkan.

c. Daya Pengembangan Aspek Kegiatan Usaha Ekonomi

Pengembangan ekonomi (*Economic Development*) dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya ke arah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin atau bahkan pengangguran perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan. Dengan

tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial. Dalam upaya peningkatan kegiatan usaha ekonomi Desa Baturetno pada program PLP2K-BK ini telah dibuat rencana program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pendapatan warga dengan cara memberikan stimulan bantuan dan pembimbingan khususnya dalam bidang peningkatan potensi ekonomi daerah dalam bidang usaha rumah tangga, pertanian dan peternakan. Namun tidak terlepas juga dari peran dari pembangunan fisik dimana secara tidak langsung kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis kawasan di Desa Baturetno juga memberikan dampak secara ekonomi bagi individu masyarakat, keluarga maupun masyarakat secara luas. Walaupun sampai saat ini belum terlihat secara signifikan namun masyarakat telah merasakan kemudahan dalam bidang transportasi dengan semakin baiknya sarana jalan dan drainase, air bersih dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan mobilitas warga khususnya sarana angkutan untuk kegiatan pertanian maupun peternakan meningkat sehingga perlahan dapat meningkatkan pendapatan warga. Dalam jangka panjang juga diharapkan dapat berfungsi sebagai cikal bakal dalam penciptaan lapangan kerja baru dimana di daerah Baturetno ini sendiri masih sangat banyak sekali untuk potensi lahan kosong yang belum digunakan secara maksimal.

Berdasarkan data yang didapat maka prioritas pengembangan kegiatan ekonomi Desa Baturetno yaitu pada usaha rumah tangga, usaha pertanian dan peternakan. Untuk poin-poin perencanaannya sendiri mengacu pada sumber daya dan potensi alam yang tersedia di wilayah Desa Baturetno. Hal ini sesuai

dengan pedoman pada pilar perencanaan pembangunan daerah menurut Hoover dan Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri, 2004) yaitu keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*) dimana pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.

Perencanaan pengembangan ekonomi di Baturetno ini sesuai dengan salah satu konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (2009) yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Namun pada kenyataannya masih kurang maksimal dikarenakan masih kurangnya kerjasama dari antar lembaga pemerintah maupun swasta. Sehingga poin-poin pengembangan ekonomi masyarakat ada beberapa yang belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Selain itu juga masih kurangnya kualitas SDM masyarakat dalam menerima dan menerapkan secara maksimal sosialisasi maupun inovasi baru dari

pengembangan ekonomi di Baturetno dan cenderung adanya masyarakat yang masih menggunakan budaya tradisional, contohnya beberapa warga yang masih menggabungkan antara rumah dan kandang ternak padahal pada konsepnya sudah diberikan pengarahannya untuk diberi jarak tertentu beberapa meter ataupun dipindahkan ke kandang komunal.

Pelaksanaan dari perencanaan pengembangan aspek ekonomi di Desa Baturetno hingga saat ini berjalan cukup baik dengan adanya beberapa sumber pendapatan lain warga yang sebelumnya belum di tekuni contohnya pembuatan batu bata serta pupuk yang berasal dari kotoran ternak, adanya sosialisasi kandang komunal, peningkatan kuantitas dan kualitas tanaman padi dan perkebunan tebu. Sehingga secara kasar terjadi peningkatan pendapat masyarakat contohnya dalam sektor pertanian dan perkebunan mencapai 50% hingga tahun 2015. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan analisis menunjukkan adanya peningkatan kegiatan usaha ekonomi masyarakat Desa Baturetno, maka hal ini sesuai dengan konsep tridaya dari Kementrian Perumahan Rakyat yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi/usaha dimana didalam pelaksanaannya mengedepankan:

3. Kegiatan dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi individu masyarakat, keluarga maupun masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaan pengembangan sektor ekonomi Desa Baturetno berjalan

cukup baik sehingga menimbulkan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, semakin terlatihnya masyarakat dalam memanfaatkan potensi di daerahnya, serta melatih kemandirian warga dalam mengembangkan usaha ekonominya.

4. Kegiatan yang dilakukan dapat menjadi cikal bakal bagi penciptaan lapangan kerja baru. Melalui program PLP2K-BK ini telah mampu mengembangkan potensi sumberdaya baru di Desa Baturetno yaitu usaha pembuatan batubata dan pengelolaan tebu. Sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan maupun sumber mata pencaharian baru bagi warga Desa Baturetno.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program PLP2K-BK Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian yang diperoleh apabila dikaitkan dengan teori terkait faktor-faktor yang mendukung dan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining dalam Keban (2004:78) salah satu diantaranya adalah hakekat kerjasama yang dibutuhkan dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan pusat untuk terus melakukan kegiatan stimulan dengan melaksanakan program PLP2K-BK

setiap tahunnya dengan lokasi yang berbeda pada daerah yang terpilih dan tetap memonitor segala bentuk pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun perencanaan di tiap-tiap lokasi pelaksanaan program PLP2K-BK. Hal ini menunjukkan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi baik para implementator maupun masyarakat sehingga mampu termotivasi dalam setiap proses pelaksanaan. Dikarenakan program ini tiap tahun mampu menstimulan dan merencanakan pembangunan di tiap wilayah berbed, sehingga peluang untuk pemerataan pembangunan menjadi semakin besar. Selain itu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam usaha mengalokasikan dana APBD untuk mendukung rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan, khususnya dalam rangka keberlanjutan setiap tahunnya, sesuai dengan indikasi program dalam perencanaan dan CAP.

Adanya koodinasi dari Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang dan pemerintah desa dengan instansi lainnya baik pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik sosial, lingkungan dan ekonomi selama jangka waktu perencanaan selama 5 tahun ke depan dibutuhkan kerjasama serta komunikasi yang baik antar pelaku pembangunan. Yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dan mendorong peran aktif dan kontribusi dari instansi lain tersebut. Para aktor pelaksana khususnya pemerintah dan masyarakat mampu memahami apa saja rencana jangka panjang selama 5 tahun atau keberlanjutan pembangunan melalui penerapan visi dan misi daerah mereka. Selain itu

dapat mengaplikasikan hak dan kewajiban masing-masing dari pelaku pembangunan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edwards dalam Jones (1991:320) mengungkapkan bahwa kebutuhan utama bagi keefektifan implementasi adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas maka para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan.

Peran aktif dan kontribusi masyarakat Desa Baturetno dalam pelaksanaan Program PLP2K-BK. Peran aktif warga mulai dari pembentukan Tim Penggerak Masyarakat (TPM) hingga keterlibatan seluruh warga dalam pembuatan perencanaan pembangunan serta pelaksanaannya, dimana warga juga menyediakan tenaga mereka dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desanya. Peran aktif masyarakat merupakan faktor pendukung penting dalam program PLP2K-BK ini, tanpa kontribusi masyarakat yang besar tujuan dari pelaksanaan program ini tidak akan terwujud.

Potensi sumber daya. Ketersediaan sumberdaya baik potensi wilayah maupun SDM di Desa Baturetno tersedia dengan baik. Ketersediaan lahan, potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan sumber menjadi faktor berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Di desa baturetno ketersediaan sumberdaya nya tersedia

dengan baik dan prospek kedepannya cukup menjajikan sehingga perencanaan pembangunan yang dibuat terfokus pada pengembangan potensi-potensi tersebut

b) Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian yang diperoleh apabila analisis dengan teori terkait faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam implementasi kebijakan, menurut Gows dan Mors dalam Keban (2004 : 78) yaitu politik, ekonomi, dan lingkungan dan kekurangan dalam bantuan teknis

Keterbatasan dana. Penyediaan dana dalam melaksanakan seluruh rencana-rencana dalam konsep pembangunan wilayah Desa Baturetno membutuhkan dana yang besar. Dengan ketersediaan dana yang sangat minim, program PLP2K-BK ini hanya mampu memberikan stimulan dan memerlukan sinergi dari pihak lain untuk menyelesaikan keseluruhan poin-poin pembangunan yang sudah disusun dalam PLP2K-BK.

Terbatasnya jumlah tim teknis sebagai aktor implementasi. Dalam hal ini Badan Perumahan Rakyat Kabupaten Malang masih kurang dalam menyediakan tim teknisnya selama proses monitoring dan evaluasi selama kurun waktu 5 tahun, sehingga masih sering terjadi perbedaan perkembangan hasil pembangunan (*miss communication*) dengan pihak kelurahan maupun masyarakat. Sehingga beberapa pembangunan belum terlaksana dan belum ada tindak lanjut.

Politik, ekonomi, dan lingkungan. Karena Faktor sosial budaya masyarakat yang masih tradisional dan cenderung kumuh, sehingga

beberapa masyarakat masih kesulitan dalam menyesuaikan perubahan lingkungannya. Khususnya dalam masalah kandang ternak yang menjadi satu dengan rumah warga.

Masyarakat Desa Baturetno belum bisa mendapatkan kegiatan kemitraan bersama dengan swasta secara mandiri. Karena masyarakat tidak memiliki daya tawar kekuatan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kemitraan masyarakat dengan pihak swasta secara mandiri belum dapat direalisasikan di Desa Baturetno dan masih mengandalkan sepenuhnya peran dari pemerintah daerah. Selain itu tidak semua masyarakat mengetahui secara menyeluruh esensi dari program PLP2K-BK. Dimana, dengan adanya program ini masyarakat di setiap wilayah Desa Baturetno mengajukan aspirasinya akan kebutuhan di bidang pembangunan baik sosial, lingkungan dan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

d. Daya pengembangan aspek sosial kemasyarakatan

Pengembangan aspek sosial kemasyarakatan di Desa Baturetno melalui 2 aspek kegiatan dasar yaitu dalam proses pembentukan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dan kegiatan pembuatan CAP (*community action plan*)/ kegiatan pembuatan perencanaan pembangunan daerah. Kontribusi masyarakat Desa Baturetno dalam kedua kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik. Masyarakat mampu ikut serta secara aktif dalam setiap proses baik dalam perencanaan maupun kegiatan penanganan langsung. Hal ini terlihat dari antusias dan cukup aktifnya warga dalam kegiatan TMP dan CAP. Sumber daya manusia meningkat akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat pendapatan ekonomi dan berdampak pada kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sendiri. Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu terus adanya penataan kualitas kawasan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang pada dasarnya dimulai pada pemberdayaan manusianya untuk ikut berperan dalam prosen perencanaan pembangunan serta pengawasannya agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi dengan baik.

e. Daya pengembangan aspek lingkungan

Pengembangan aspek lingkungan meliputi kegiatan stimulan dan perencanaan pengembangan dan pembangunan kawasan Desa Baturetno

selama 5 tahun kedepan mulai 2011-2015. Melalui kegiatan stimulan yaitu meliputi 3 pokok utama permasalahan lingkungan Desa Baturetno yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan kondisi rumah tinggal dan pengembangan RTH sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari peningkatan sarana dan prasarana dasar khususnya jalan dan drainase di Desa Baturetno menjadi lebih baik yang sebelumnya cenderung kumuh dan tidak terawat, namun untuk pengembangan RTH masih belum terlaksana dengan baik hanya berupa sosialisasi dan swadaya dari masyarakat sendiri. Selain itu untuk rencana pengembangan kawasan yang merupakan hasil sinergi dari berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya target yang terpenuhi dari poin-poin dalam perencanaan jangka panjang tersebut yang sudah terlaksana selama jangka waktu 5 tahun dan adanya sinergi dan kerjasama dari instansi lain. Namun masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik.

f. Daya pengembangan aspek kegiatan sosial ekonomi

Pengembangan aspek kegiatan sosial ekonomi Di Desa Baturetno termasuk dalam rencana jangka panjang 5 tahun kedepan sehingga poin-poin dalam perencanaan pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan analisis dari potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Berdasarkan data yang diperoleh maka prioritas pengembangan kegiatan ekonomi Desa Baturetno yaitu pada usaha rumah tangga, usaha pertanian

dan peternakan. Kesimpulan dari hasil pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Baturetno hingga tahun 2016 terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya sinergi dan kerjasama dari instansi lain baik pemerintah maupun swasta sehingga poin-poin dalam kegiatan pengembangan ekonomi hampir terpenuhi seluruhnya. Selain itu dengan adanya pengembangan sektor ekonomi ini mampu meningkatkan pendapatan warga setiap tahunnya, hal ini tidak terlepas dari faktor pengembangan sektor sosial kemasyarakatan dan pengembangan fisik lingkungan yang berjalan secara beriringan.

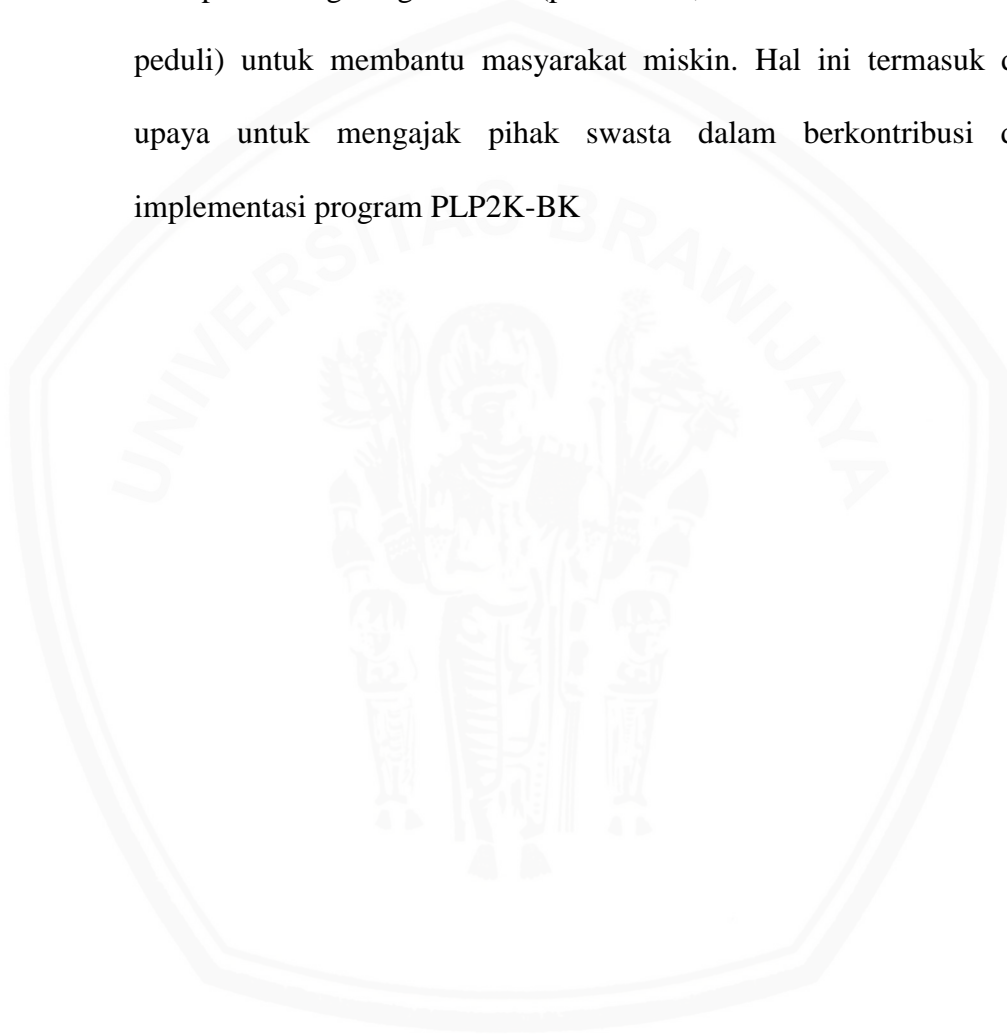
- d. Faktor pendukung dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh melalui program PLP2K-BK sebagai sarana memberdayakan masyarakat Desa Baturetno yaitu pengalokasian APBD untuk mendukung program PLP2K-BK, peran aktif dan kontribusi masyarakat Desa Baturetno dalam pelaksanaan Program PLP2K-BK, serta potensi sumber daya baik potensi wilayah maupun SDM di Desa Baturetno tersedia dengan baik.
- e. Sedangkan faktor penghambat dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh melalui program PLP2K-BK sebagai sarana memberdayakan masyarakat Desa Baturetno yaitu terdiri dari keterbatasan dana stimulan, terbatasnya jumlah tim teknis, faktor sosial budaya masyarakat, serta tidak semua masyarakat mengetahui secara menyeluruh esensi dari program PLP2K-BK dan belum mampu melakukan *channeling* secara mandiri.

B. Saran

1. Perlunya mengoptimalkan koordinasi antar instansi pelaksana penataan permukiman kumuh agar lebih efektif dalam melaksanakan perencanaan program kegiatan permukiman kumuh dengan menetapkan formasi kewenangan pelaksanaan yang mumpuni dan sesuai sehingga mampu bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai perencanaan yang diharapkan.
2. Perlunya pemerintah mengupayakan konsistensi dalam pelaksanaan rencana program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai perencanaannya, serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari segi pemeliharaan lingkungan hidupnya melainkan juga pada kualitas perekonomian masyarakat terutama warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.
3. Untuk pihak Badan Perumahan Kabupaten Malang dan Kelurahan perlu meningkatkan sinergi dan komunikasi secara berkelanjutan dalam memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing yang salah satunya adalah memaksimalkan *monitoring* (pengawasan) lapangan, evaluasi dan membangun harmonisasi terhadap stakeholder lainnya, agar kondisi sebenarnya masyarakat dapat diketahui dan dapat dirumuskan strategi apa yang perlu dilaksanakan jika terjadi kendala selama pelaksanaan program.
4. Perlu adanya penguatan organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang representatif, aktif, tanggap dan akuntabel

yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin baik pedesaan maupun perkotaan dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

5. Memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia usaha dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin. Hal ini termasuk dalam upaya untuk mengajak pihak swasta dalam berkontribusi dalam implementasi program PLP2K-BK



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asmawi Rewansyah. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusainanas Prima.
- Bjorn Hettne. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chafid Fandeli. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapannya Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Charles O. Jones. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Conyers, dan Hill. 1990. *Introduction to Development Planning in the Third World*. Scotland: C.R. Barber & Partners.
- David Korten. 2002. *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Eko Budihardjo. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Andi Offset
- Grigg, N, dan Fontane G. Darel. 2000. *Infrastructure System Management and Optimization, Paradigm and Strategy Of Infrastructure Management*. Diponegoro University
- Gunawan Sumodinigrat. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Husein H. M. 1992. *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jayadinata, T. Johara. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung
- Joko Widodo. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya
- Marbun BN. 1994. *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*. Jakarta: Rajawali Press
- Mathew B. Miles, and Michael A. Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode Baru Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI press
- Mohammad Agung Ridlo. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*. Semarang: Unissula Press
- Hikmat R. Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Hugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Husaini Usman, Purnomo S. Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara
- Paulus Wirotomo. 1997. *Analisis Dan Evaluasi hukum Tertulis Tentang Tata Cara Pemugaran Pemukiman Kumuh/Perkotaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Robert J. Kodoatie. 2005. *Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia
- Siswono Yudohusodo. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Bharakerta
- Solichin Abdul Wahab. 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Wayne Parsons. 2008, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Penerbit: Kencana, Jakarta
- Yeremias T. Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

JOURNAL DAN PENELITIAN

Jawas Dwijo Putro. 2011. *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya. JURNAL TEKNIK SIPIL UNTAN / VOLUME 11 NOMOR 1 – JUNI 2011*

Mustofa Kamal. *Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal*. Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota: Universitas Diponegoro Semarang

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Panduan Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

INTERNET

Kamus Tata Ruang. 1997. Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, diakses pada tanggal 4 Maret 2014 dari <http://departemenpu.co.id>

Andika. 2012. Permukiman Kumuh di Perkotaan dan Permasalahannya, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 dari <http://andikasblogspot.com>

Diah Novitasari. 2010. Pemukiman Kumuh di Pinggiran Kota, diakses pada tanggal 28 Juli 2012 dari <http://fisip.uns.ac.id/>

www.kemenpera.go.id

<http://bps.go.id>



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa fungsi Tim Penggerak Masyarakat (TPM)?
2. Bagaimana pembentukan TPM di Desa Baturetno?
3. Apa fungsi Rencana Tindak Komunitas/*Community Action Plan* (CAP)?
4. Bagaimana proses kegiatan CAP di Desa Baturetno?
5. Apa hasil dari CAP di Desa Baturetno?
6. Apa prioritas utama pembangunan dalam PLP2K-BK di Desa Baturetno?
7. Bagaimana kontribusi masyarakat Desa Baturetno dalam pelaksanaan PLP2K-BK?
8. Bagaimana kondisi sirkulasi dan jaringan jalan di Desa Baturetno?
9. Apa fokus utama permasalahan lingkungan di Desa Baturetno?
10. Bagaimana fungsi dan kondisi drainase di Desa Baturetno?
11. Bagaimana pelaksanaan peningkatan kondisi rumah tinggal di Desa Baturetno?
12. Apakah peningkatan kondisi rumah tinggal di Desa Baturetno sudah sesuai sesuai dengan target rencana?
13. Bagaimana perkembangan upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Desa Baturetno?
14. Bagaimana dampak dari perbaikan prasarana dan sarana dasar di Desa Baturetno?
15. Apa perbedaan konsep pengembangan kawasan seraca mikro dan makro ?
16. Bagaimana konsep pengembangan kawasan secara mikro di Desa Baturetno?
17. Bagaimana konsep pengembangan kawasan secara makro di Desa Baturetno?
18. Apakah tujuan jangka panjang dari konsep rencana pengembangan secara makro di Desa Baturetno?
19. Apakah tujuan utama dari konsep dan rencana pengembangan wilayah di Desa Baturetno?

20. Bagaimana dampak dari usaha pengembangan sektor ekonomi di Desa Baturetno?
21. Apa faktor pendukung dari implementasi program PLP2K-BK di Desa Baturetno?
22. Apa faktor penghambat dari implementasi program PLP2K-BK di Desa Baturetno?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**Data Diri**

Nama : Silvia Marcelina Anastasia
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 4 Maret 1992
Alamat Asal : Perum. Lawang View No.C8/14 Kec. Lawang
Alamat Malang : Perum. Lawang View No.C8/14 Kec. Lawang
Agama : Islam
NIM : 105030101111086
Fakultas/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya
No.Hp/Email : 081233694105/silvianastasia80@gmail.com
Motto Hidup : Setiap tindakan ada konsekuensi
Hobi : Berenang

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 1 Lawang
2. SLTP/MTS : SMPN 1 Singosari
3. SMA/MA : SMAN 1 Lawang
4. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi

Pengalaman Organisasi : Sanggar Seni Mahasiswa (SSM) FIA UB



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 131, 2012

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH
BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, perlu upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kebijakan, strategi serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis;
- b. bahwa pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pemberian bantuan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2BK-BK).

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Tahun 2008 Nomor 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Nomor 6 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan :

1. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan yang selanjutnya disebut dengan PLP2K-BK adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui pendekatan tridaya, perbaikan dan pembangunan perumahan, penyediaan PSU yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dan mengintegrasikan konsep penanganannya dengan memanfaatkan potensi wilayah di sekitarnya;
2. Pendekatan Tridaya adalah upaya pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/masyarakat;
3. Rencana PLP2K-BK adalah dokumen perencanaan, yang disusun sebagai acuan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berbasis kawasan;
4. *Detailed Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci;
5. Tenaga penggerak masyarakat PLP2K-BK selanjutnya disingkat TPM PLP2K-BK adalah masyarakat lokal untuk menjadi pendamping masyarakat selama pelaksanaan program PLP2K-BK;
6. Rencana Tindak Komunitas yang selanjutnya disingkat RTK atau *Community Action Plan* (CAP) adalah metode untuk merangsang proses perencanaan yang berbasis pada keterlibatan aktif masyarakat yang berada di wilayah perencanaan;
7. Pusat kegiatan adalah kawasan di mana berbagai kegiatan masyarakat seperti perdagangan, jasa pelayanan dan/atau pemerintah serta sarana sosial budaya berkumpul;
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya;
9. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian;
10. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman;

12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
13. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian;
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
15. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat
16. Kementrian adalah Kementrian Perumahan Rakyat

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP

Pasal 2

PLP2K-BK bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan Tridaya.
- b. mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni.

Pasal 3

Sasaran PLP2K-BK meliputi:

- a. terlaksananya penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota.
- b. tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- c. terwujudnya masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta memeliharanya.

Pasal 4

Lingkup pengaturan pedoman PLP2K-BK mencakup:

- a. tugas dan tanggung jawab.
- b. pola penanganan.
- c. prosedur penyelenggaraan PLP2K-BK.
- d. pendanaan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Tugas dan tanggungjawab dalam PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi tugas Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

Tugas dan tanggungjawab Kementerian dalam penyelenggaraan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan program dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- b. melakukan verifikasi administrasi dan teknis.
- c. menetapkan lokasi penerima program berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dan hasil verifikasi.
- d. memfasilitasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED serta pelaksanaan dan supervisi pembangunan stimulan PSU pada lokasi penanganan yang telah ditetapkan.
- e. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan, penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam penyelenggaraan program.
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program.
- g. menyerahkan hasil pelaksanaan stimulan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota.
- h. Melakukan pembinaan penyelenggaraan program.

Pasal 7

Tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program.
- b. melakukan seleksi terhadap usulan lokasi program dari pemerintah kabupaten/kota.
- c. mengajukan usulan lokasi kepada Kementerian berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota.
- d. melakukan koordinasi dengan Kementerian untuk verifikasi administrasi dan teknis.
- e. mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan program melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- g. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program kepada Kementerian.

Pasal 8

Tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program
- b. mengajukan usulan lokasi kepada pemerintah provinsi
- c. menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah
- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- e. mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan program melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pada tahun pertama dan kedua sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.

- g. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pada tahun pertama dan kedua kepada Kementerian;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program dalam rangka keberlanjutan.
- i. memfasilitasi penyiapan TPM
- j. memfasilitasi penyusunan RTK/CAP
- k. mengelola dan memelihara hasil penyelenggaraan program.

BAB IV POLA PENANGANAN

Pasal 9

- (1) Pola penanganan PLP2K-BK adalah melalui pemugaran.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

BAB V PROSEDUR PENYELENGGARAAN PLP2K-BK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Prosedur penyelenggaraan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi kriteria pemilihan lokasi dan tahapan penyelenggaraan program.
- (2) Ketentuan mengenai Tahapan Penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Kriteria Pemilihan Lokasi

Pasal 11

- (1) Kriteria pemilihan lokasi meliputi:
 - a. kriteria wajib;
 - b. kriteria kompetitif.
- (2) Kriteria wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi sesuai dengan peruntukan perumahan dalam RTRW Kota/Kabupaten;
 - b. sudah ditetapkan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh pemerintah kabupaten/kota;

- c. luas lokasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar dan mengelompok dalam satu hamparan;

(3) Kriteria kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kabupaten/kota sudah memiliki rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) atau dokumen perencanaan sejenis;
- b. lahan legal dan bebas dari sengketa;
- c. memiliki potensi perekonomian yang dapat dikembangkan;
- d. terdapat program penanganan kumuh;
- e. terdapat keterlibatan masyarakat;
- f. tersedia alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan;
- g. intensitas kekumuhan cukup tinggi;
- h. intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi;
- i. merupakan pemenang dan/atau nominasi Adiupaya Puritama;
- j. merupakan lokasi percontohan yang ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Tahapan Penetapan Lokasi

Paragraf 1 Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Sosialisasi PLP2K-BK bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai program penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Sosialisasi PLP2K-BK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian.
- (3) Sosialisasi PLP2K-BK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Paragraf 2 Usulan

Pasal 13

(1) Usulan PLB2K-BK dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pemerintah kabupaten/kota menyampaikan usulan calon lokasi PLP2K-BK kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian;
- b. pemerintah provinsi menyampaikan usulan kabupaten/kota dan calon lokasi PLP2K-BK kepada Kementerian;
- c. Kementerian menyusun daftar calon lokasi PLP2K-BK sesuai dengan usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah provinsi;

- (2) Dalam hal usulan PLB2K-BK pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Verifikasi Usulan Lokasi

Pasal 14

- (1) Verifikasi usulan PLP2K-BK meliputi administrasi dan teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data lokasi;
 - b. surat usulan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. surat usulan pemerintah provinsi;
 - d. surat pernyataan bupati/walikota;
 - e. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau pemerintah provinsi untuk Provinsi DKI Jakarta;
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi dengan peruntukan perumahan dalam RTRW kota/kabupaten;
 - b. keberadaan dokumen RP3KP atau dokumen perencanaan sejenis;
 - c. luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. tingkat kepadatan penduduk di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. pola hunian;
 - f. kedekatan dengan pusat-pusat kegiatan;
 - g. keberadaan program sejenis;
 - h. kesiapan masyarakat;
 - i. proporsi alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan;
 - j. intensitas kekumuhan;
 - k. intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan;
 - l. kesiapan lahan (sengketa/legalitas);

Pasal 15

- (1) Verifikasi usulan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Kementerian serta dapat melibatkan pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Keputusan Menteri.

Paragraf 4
Penetapan Lokasi

Pasal 16

- (1) Lokasi PLP2K-BK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan lokasi PLP2K-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil verifikasi terhadap usulan PLP2K-BK.

Bagian Empat
Pelaksanaan PLP2K-BK

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PLP2K-BK terdiri atas:
 - a. penyiapan dan tugas TPM;
 - b. penyusunan Rencana PLP2K-BK;
 - c. pelaksanaan RTK/CAP;
 - d. penyusunan DED;
 - e. pelaksanaan stimulan PSU;
 - f. pelaksanaan tindak lanjut program;
 - g. pelaporan;
- (2) Pelaksanaan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

Paragraf 1
Penyiapan TPM

Pasal 18

- (1) Penyiapan TPM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pemilihan TPM;
 - b. pelatihan TPM;
- (2) Pemilihan TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat setempat dengan kriteria meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. berdomisili di lokasi penanganan;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang sosial dan kemasyarakatan atau minimal sarjana;
 - d. direkomendasikan oleh masyarakat di lokasi penanganan;
 - e. memiliki pemahaman mengenai program-program pemerintah yang terkait dengan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- (3) Pelatihan TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Substansi pelatihan TPM sekurang-kurangnya mencakup materi tentang:
 - a. program PLP2K-BK;
 - b. perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam sistem kawasan dan sistem perkotaan;

- c. PSU lingkungan;
- d. konsepsi dan implementasi Tridaya;
- e. pendekatan pembangunan dan pemrograman;
- f. komunikasi dan sosialisasi;
- g. penyusunan RTK/CAP;

Pasal 19

- (1) Tugas TPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. membantu mensosialisasikan PLP2K-BK kepada masyarakat;
 - b. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) bersama-sama dengan masyarakat;
 - c. mendorong masyarakat untuk melaksanakan survey kampung sendiri (SKS) dan rembug warga;
 - d. membantu masyarakat dalam penyusunan RTK/CAP;
- (2) Rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pertemuan masyarakat dalam rangka membahas dan menyepakati daftar kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang difasilitasi oleh TPM.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana PLP2K-BK

Pasal 20

- (1) Tahapan penyusunan Rencana PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf b meliputi:
- a. persiapan pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan survey dan pengumpulan data lapang;
 - c. pelaksanaan kajian dan analisis data lapang;
 - d. pelaksanaan tinjauan dan akomodasi hasil Rencana Tindak Komunitas (RTK);
 - e. penyusunan dokumen Rencana PLP2K-BK;
- (2) Data lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya mencakup:
- a. identifikasi isu dan permasalahan pada lokasi penanganan;
 - b. identifikasi daya dukung lingkungan;
 - c. identifikasi kondisi dan kualitas bangunan pada lokasi penanganan;
 - d. identifikasi potensi lingkungan, ekonomi, dan sosial yang dapat dikembangkan pada lokasi penanganan;
 - e. identifikasi pemangku kepentingan;
- (3) Substansi dokumen Rencana PLP2K-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana struktur dan pola tata ruang kawasan;
 - b. rencana penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman;
 - c. indikasi tipe dan jumlah rumah yang akan dikembangkan;
 - d. rencana pengembangan kelembagaan sosial kemasyarakatan;
 - e. rencana pengembangan potensi perekonomian;
 - f. rencana program penanganan, pembiayaan dan sumber pendanaan, serta peran dari masing-masing sektor terkait selama jangka waktu perencanaan;
 - g. indikasi rencana pembangunan fisik pada wilayah-wilayah prioritas di dalam kawasan;

- h. mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program;
- (4) Dokumen Rencana PLP2K-BK ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Paragraf 3 Pelaksanaan RTK

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan RTK /CAP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan hasil rembug warga yang meliputi:
 - a. sosialisasi ke masyarakat di lokasi penanganan;
 - b. pengumpulan aspirasi masyarakat;
 - c. penyusunan dan penyepakatan daftar kebutuhan;
 - d. penyusunan dan penyepakatan rencana kerja dan pelaku;
- (2) Hasil pelaksanaan RTK/CAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi penyusunan Rencana PLP2K-BK.

Paragraf 4 Penyusunan DED

Pasal 22

- (1) Penyusunan DED sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk komponen PSU yang akan dibangun melalui stimulan PSU.
- (2) DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari instansi teknis yang berwenang.

Paragraf 5 Pelaksanaan Stimulan PSU

Pasal 23

- (1) Stimulan PSU sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Penetapan Menteri, Dokumen Anggaran Pembangunan (DIPA), dan DED.
- (2) Pelaksanaan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen DED yang telah disusun.
- (3) Dalam hal perubahan lokasi dan/atau perubahan alokasi anggaran, Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk wajib mengoordinasikan dengan Deputy untuk mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam hal perubahan pelaksanaan stimulan PSU terkait dengan kondisi lapang, wajib dilakukan revisi DED serta mendapat persetujuan dari Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk.

- (5) Kementerian melaksanakan serah terima hasil pelaksanaan stimulan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Ketentuan mengenai serah terima pelaksanaan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelaksanaan Tindak Lanjut Program

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut program sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen Rencana PLP2K-BK yang telah disusun.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi dan diwujudkan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan tindak lanjut program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dimungkinkan untuk memberikan bantuan stimulan lanjutan pada lokasi penanganan.

Bagian Lima
Pengawasan dan Pengendalian PLP2K-BK

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLP2K-BK.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai dengan Kementerian dan dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian Kementerian dimungkinkan untuk memberikan bantuan stimulan lanjutan pada lokasi penanganan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan PLP2K-BK meliputi:
 - a. pelaporan teknis yang terdiri dari kemajuan pelaksanaan fisik dan realisasi keuangan; dan
 - b. pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLP2K-BK;
- (2) Pelaporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelaksana PLP2K-BK yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan hasil pelaporan dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Kawasan setiap bulan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dengan tembusan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan PLP2K-BK berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari APBN digunakan untuk:
 - a. pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK pada tahun pertama dan kedua;
 - b. insentif sebagai dukungan terhadap keberlanjutan program penyelenggaraan PLP2K-BK;
- (3) Sumber pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota dapat dialokasikan dalam rangka tindak lanjut program di lokasi penanganan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 296 /421.205/2014

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No : 14993/UN10.3/PG/2014 Tanggal : 18 November 2014 Perihal : Riset/Survey

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Riset/Survey** oleh :

Nama / Instansi : Silvia Marcelina Anastasia / Mhs. Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Perumahan Lawang View No.14
Thema/Judul/Survey/Research : Implementasi Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) di Desa Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang
Daerah/tempat kegiatan : Di Desa Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang
Lamanya : 20 November 2014 s/d 20 Januari 2015
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 19 November 2014

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**



NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Badan Perumahan Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang
4. Sdr. Camat Singosari Kab. Malang
5. Sdr. Kepala Desa Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang
6. Sdr. Mhs/Ybs
7. Arsip

